



PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA CIREBON TAHUN 2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Cirebon



KONTAK PERASAAN : 081 71 222 71

Konultasi Keluarga dan Perempuan, Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak



SEKOLAH KELUARGA CIREBON



DP3APPKB KOTA CIREBON



PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA CIREBON TAHUN 2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Cirebon



KONTAK PERASAAN : 081 71 222 71

Konsultasi Keluarga dan Perempuan, Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak



SEKOLAH KELUARGA CIREBON



DP3APPKB KOTA CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan yang telah diberikan sehingga tim penulis dapat menyelesaikan penulisan buku Profil Gender dan Anak Kota Cirebon Tahun 2026. Penulisan buku ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kondisi, kebutuhan serta persoalan yang dihadapi perempuan dan anak terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

Buku ini memuat data terpilah yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan, kebijakan dan program dalam upaya mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan di Kota Cirebon, sehingga pengambilan kebijakan yang responsif gender dapat terwujud secara optimal.

Buku ini dapat diselesaikan berkat jalinan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan beberapa pihak terkait, oleh karena itu pada kesempatan ini tim penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Wali Kota Cirebon;
2. Wakil Wali Kota Cirebon;
3. Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
5. Dinas Sosial Kota Cirebon;
6. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon;
7. Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
8. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon;
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon;
10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon;
11. Dinas Perhubungan Kota Cirebon;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon;
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon;
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon;

16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon;
17. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon;
18. Pengadilan Negeri Cirebon;
19. Pengadilan Agama Cirebon Kelas IB;
20. Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon;
21. Badan Pusat Statistik Kota Cirebon;
22. PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon;
23. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cirebon;
24. Semua pihak yang terlibat serta berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Cirebon, April 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Cirebon,

SUWARSO BUDI WINARNO
NIP. 197501011995031001



Capaian Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	Sumber Data
Gambaran Umum			
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	75,97 Tahun	Badan Pusat Statistik
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,45 Tahun	Badan Pusat Statistik
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,54 Tahun	Badan Pusat Statistik
4	Pengeluaran Riil per Kapita	Rp13.341.000	Badan Pusat Statistik
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,99	Badan Pusat Statistik
Bidang Kependudukan			
6	Jumlah Penduduk	359.150 Jiwa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Angka Beban Ketergantungan	43,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Rasio Jenis Kelamin	100,66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,71 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Kepadatan Penduduk	9.097 Orang/Km ²	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Jumlah Penduduk berdasarkan Kepemilikan KTP	260.666 Orang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Persentase Penduduk < 18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	96,04 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Akta Kematian yang Dikeluarkan Selama 2025	3.441 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Kepala Rumah Tangga Perempuan	29.104 Orang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pendidikan			
15	Angka Partisipasi Sekolah	7-12 Tahun : 99,98 Persen 13-15 Tahun : 94,31 Persen 16-18 Tahun : 84,39 Persen 19-23 Tahun : 31,78 Persen	Badan Pusat Statistik
16	Angka Partisipasi Murni	SD : 97,04 Persen SMP : 73,31 Persen SMA : 67,30 Persen	Badan Pusat Statistik
17	Angka Partisipasi Kasar	SD : 109,12 Persen SMP : 97,18 Persen SMA : 92,41 Persen	Badan Pusat Statistik



No	Indikator	Capaian	Sumber Data
Bidang Kesehatan			
18	Angka Kematian Ibu	6 Kasus	Dinas Kesehatan
19	Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	96,82 Persen	Dinas Kesehatan
20	Pelayanan Antenatal Care	91,37 Persen	Dinas Kesehatan
21	Angka Kematian Bayi	16 per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan
22	BBLR yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Persen	Dinas Kesehatan
23	Kunjungan Bayi ke Pelayanan Kesehatan	99,44 Persen	Dinas Kesehatan
24	Kunjungan Balita ke Pelayanan Kesehatan	100,43 Persen	Dinas Kesehatan
25	Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif	79,31 Persen	Dinas Kesehatan
Bidang Ketenagakerjaan			
26	Angkatan Kerja	108.855 Jiwa	Badan Pusat Statistik
27	Bukan Angkatan Kerja	25.451 Jiwa	Badan Pusat Statistik
28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,02 Persen	Badan Pusat Statistik
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,41 Persen	Badan Pusat Statistik
30	Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	Jasa = 80,95 Persen Manufaktur = 17,97 Persen Pertanian = 1,08 Persen	Dinas Tenaga Kerja
Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan			
31	Upah Rata-Rata Pekerja Per Bulan di Indonesia	Laki-Laki = Rp 3.610.000 Perempuan = Rp 2.820.000	Badan Pusat Statistik
32	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	34,29	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	44,52	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34	Sumbangan Pendapatan Perempuan	31,77	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
35	Indeks Pemberdayaan Perempuan	81,14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Indikator	Capaian	Sumber Data
Bidang Hukum dan Sosial Budaya			
36	Jumlah Perceraian	Cerai Talak = 153 Kasus Cerai Gugat = 584 Kasus	Badan Pusat Statistik
37	Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah	7 Orang	Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B
38	Penduduk Menjadi Korban Kejahatan	Laki-Laki = 0,60 Persen Perempuan = 0,08 Persen	Badan Pusat Statistik, 2024
Sektor Publik			
39	Jumlah Anggota DPRD	35 Orang	Sekretariat DPRD
40	Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	12 Orang	Sekretariat DPRD
41	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)	7.280 Orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Profil Anak			
42	Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Penduduk <18 Tahun	98.488 Jiwa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
43	Pemustaka Anak	TK/SD : 4.633 Jiwa SMP : 1.279 Jiwa SMA : 2.108 Jiwa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
44	Permohonan Dispensasi Nikah	7 Orang	Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B
45	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	28 Lembaga	Dinas Sosial
46	Jumlah Posyandu	345 Posyandu	Dinas Kesehatan
47	Anak Usia Dini yang Mengikuti Pendidikan PAUD	1.497 Anak	Dinas Pendidikan
48	Ruang Bermain Anak	2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
49	Zona Selamat Sekolah	16 Lokasi	Dinas Perhubungan
50	Sekolah Luar Biasa	5 Sekolah	Dinas Sosial
51	Status Gizi Anak Usia 0-5 Tahun	Stunting : 2.227 Jiwa Gizi Buruk : 163 Jiwa Gizi Kurang : 1.121 Jiwa Wasting : 1.284 Jiwa	Dinas Kesehatan
52	Jumlah BBLR yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	296 Bayi	Dinas Kesehatan
53	Jumlah Bayi Usia 0-6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif	1.667 Bayi	Dinas Kesehatan



No	Indikator	Capaian	Sumber Data
54	Jumlah Siswa Sekolah	SD : 33.996 Siswa SMP : 18.461 Siswa SMA : 22.842 Siswa	Dinas Pendidikan
55	Kasus Kekerasan pada Anak	39 Kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
56	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum	9 Kasus	Balai Pemasarakatan Kelas I dan Pengadilan Negeri Cirebon
57	Jumlah Anak Terlantar	90 Jiwa	Dinas Sosial
58	Anak Terinfeksi HIV/AIDS	0-4 Tahun : 4 Orang 5-14 Tahun : 1 Orang 15-19 Tahun : 12 Orang	Komisi Penanggulangan AIDS



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Capaian Tahun 2025	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	5
1.4 Sumber Data.....	6
1.5 Sasaran	6
1.6 Output.....	7
1.7 Hasil yang Diinginkan	7
Bab 2 Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	9
Bab 3 Gambaran Umum	14
3.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah	14
3.2 Administrasi Pemerintahan	14
3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	16
Bab 4 Data Gender Bidang Kependudukan	23
4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin	23
4.2 Rasio Jenis Kelamin.....	25
4.3 Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk.....	25
4.4 Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Anak.....	27
4.5 Kepala Rumah Tangga Perempuan.....	29
Bab 5 Data Gender Bidang Pendidikan	32
5.1 Angka Partisipasi Sekolah	35
5.2 Angka Partisipasi Kasar	36
5.3 Angka Partisipasi Murni	37



Bab 6 Data Gender Bidang Kesehatan	44
6.1 Pelayanan Kesehatan Ibu	46
6.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	46
6.1.2 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes).....	47
6.1.3 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Antenatal Care)	48
6.2 Pelayanan Kesehatan Anak	49
6.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)	49
6.2.2 Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah	50
6.2.3 Cakupan Kunjungan Bayi.....	51
6.2.4 Cakupan Kunjungan Anak Balita	52
6.2.5 Bayi yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	54
Bab 7 Data Gender Bidang Ketenagakerjaan	57
7.1 Komposisi Penduduk Usia Kerja	58
7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60
7.3 Tingkat Pengangguran	62
7.4 Lapangan Usaha	64
7.5 Status Pekerjaan Utama	66
Bab 8 Data Gender Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan	71
8.1 Pencari Kerja dan Pemenuhan Lowongan Pekerjaan.....	71
8.2 Upah Rata-Rata Pekerja Per Bulan Menurut Jenis Kelamin.....	74
8.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76
Bab 9 Data Gender Bidang Hukum dan Sosial Budaya	79
9.1 Gender Bidang Hukum	79
9.2 Gender Bidang Sosial Budaya	82
Bab 10 Data Gender di Sektor Publik	86
10.1 Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif.....	88
10.2 Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif	90
Bab 11 Profil Anak Kota Cirebon	95
11.1 Hak Sipil dan Kebebasan	95
11.1.1 Akta Kelahiran	95
11.1.2 Fasilitas Informasi Layak Anak	96
11.1.3 Forum Anak	98
11.2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	100



11.2.1 Perkawinan Anak	100
11.2.2 Lingkungan Keluarga (LKSA dan PSAA).....	100
11.2.3 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif.....	103
11.2.4 Ruang Bermain Anak yang Ramah Anak	106
11.2.5 Rute Aman Selamat Sekolah (RASS).....	106
11.2.6 Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas	107
11.3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	108
11.3.1 Gizi Kurang, Gizi Lebih, Pendek (Stunting).....	108
11.3.2 Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Persalinan.....	109
11.3.3 Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	110
11.3.4 Layanan Kesehatan Ramah Anak	111
11.3.5 Kawasan Tanpa Rokok (KTR).....	112
11.3.6 Air Layak Minum.....	112
11.4 Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang	113
11.4.1 Wajib Belajar 12 Tahun	113
11.4.2 Kebudayaan yang Melibatkan Anak Kota Cirebon	114
11.4.3 Sekolah Ramah Anak.....	114
11.5 Perlindungan Khusus	116
11.5.1 Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran.....	116
11.5.2 Anak Rentan Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	117



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Cirebon	15
Tabel 3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon Menurut Dimensi Pembentuknya, Tahun 2022-2025	18
Tabel 6.1	Cakupan Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan (Linakes).....	47
Tabel 6.2	Cakupan Kunjungan Bayi ke Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon Tahun 2025	52
Tabel 6.3	Cakupan Kunjungan Balita ke Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon Tahun 2025	53
Tabel 7.1	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kota Cirebon, 2025	60
Tabel 10.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Dinas/Instansi Pemerintah, 2025	90
Tabel 11.1	Kepemilikan NIK dan Akta Kelahiran Anak di Kota Cirebon, 2025.....	96
Tabel 11.2	Lembaga Layanan Informasi Anak di Kota Cirebon, 2025.....	97
Tabel 11.3	Rekapitulasi Pemustaka Anak, 2025	97
Tabel 11.4	Jumlah Fasilitas Layanan Anak di Kota Cirebon, 2025	98
Tabel 11.5	Kegiatan Forum Anak di Kota Cirebon Selama Tahun 2025.....	99
Tabel 11.6	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Cirebon, 2025	101
Tabel 11.7	Banyaknya Posyandu di Kota Cirebon, 2025	104
Tabel 11.8	Anak Usia Dini yang Mengikuti Pendidikan PAUD di Kota Cirebon, 2025	104
Tabel 11.9	Ruang Bermain Anak di Kota Cirebon, 2025.....	106
Tabel 11.10	Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Cirebon, 2025	107
Tabel 11.11	Kontribusi Pemerintah Kota Cirebon terhadap Penyandang Disabilitas, 2025	107
Tabel 11.12	Nama Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Cirebon, 2025.....	108
Tabel 11.13	Data Status Gizi Anak Usia 0-5 Tahun di Kota Cirebon, 2025.....	109
Tabel 11.14	Cakupan BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Kota Cirebon, 2025	110
Tabel 11.15	Bayi Usia 0-6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Cirebon, 2025	111



Tabel 11.16	Program Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Akses Penyediaan Air Minum Layak di Rumah Tangga, 2025.....	113
Tabel 11.17	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Selama Dua Tahun Terakhir.....	113
Tabel 11.18	Banyaknya Siswa SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat di Kota Cirebon, 2025	114
Tabel 11.19	Banyaknya Kasus Kekerasan pada Anak di Kota Cirebon, 2025.....	116
Tabel 11.20	Banyaknya Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Cirebon, 2025	116
Tabel 11.21	Banyaknya Anak Terlantar di Kota Cirebon, 2025	117
Tabel 11.22	Data Anak Terinfeksi HIV/AIDS di Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Umur, 2025	118
Tabel 11.23	Daftar Penerima Bantuan Dana Pendidikan Bagi Anak Terdampak HIV/AIDS di Kota Cirebon, 2025	118
Tabel 11.24	Daftar Penerima Bantuan Susu Formula Bagi Anak Terdampak HIV/AIDS di Kota Cirebon, 2025.....	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Keadaan Geografis Kota Cirebon.....	15
Gambar 3.2	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	18
Gambar 3.3	Dimensi Pengetahuan	19
Gambar 3.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025	19
Gambar 3.5	Dimensi Standar Hidup Layak	20
Gambar 3.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah III Ciayumajakuning Menurut Dimensi Pembentuknya Tahun 2025.....	21
Gambar 4.1	Piramida Penduduk Kota Cirebon, 2025	24
Gambar 4.2	Rasio Jenis Kelamin, 2025	25
Gambar 4.3	Distribusi Penduduk Kota Cirebon, 2025.....	26
Gambar 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP, 2025	27
Gambar 4.5	Akta Kelahiran yang Dikeluarkan Selama 2025	28
Gambar 4.6	Akta Kematian yang Dikeluarkan Selama 2025.....	29
Gambar 4.7	Banyaknya Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin, 2025.....	30
Gambar 5.1	Persentase Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025 .	34
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025	34
Gambar 5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Cirebon, 2025	38
Gambar 6.1	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, 2025.....	47
Gambar 6.2	Cakupan Pelayanan Antenatal Care di Kota Cirebon Tahun 2025	48
Gambar 6.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup, 2025	49
Gambar 6.4	Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kecamatan per Jenis Kelamin, 2025	50
Gambar 6.5	Cakupan BBLR yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon, 2025.....	51
Gambar 6.6	Cakupan Kunjungan Balita (%), 2025.....	54
Gambar 6.7	Cakupan Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Kecamatan, 2025	55
Gambar 7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2022-2025....	62



Gambar 7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cirebon, 2025	64
Gambar 7.3	Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2025 ..	66
Gambar 7.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2025	67
Gambar 7.5	Pemenuhan Lowongan Permintaan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2025.....	68
Gambar 8.1	Pencari Kerja dan Pemenuhan Lowongan Pekerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2025	73
Gambar 8.2	Upah Rata-Rata Pekerja Per Bulan Menurut Jenis Kelamin, 2023-2025.....	75
Gambar 8.3	Indeks Pemberdayaan Perempuan di Kota Cirebon, 2022-2024.....	77
Gambar 9.1	Persentase Data Perceraian di Kota Cirebon, 2025	81
Gambar 9.2	Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah di Kota Cirebon, 2025.....	82
Gambar 9.3	Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecahan Seksual Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025	84
Gambar 10.1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon, 2025	89
Gambar 10.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Cirebon, 2025	93
Gambar 11.1	Permohonan Dispensasi Nikah, 2025.....	100
Gambar 11.2	Layanan Kesehatan Ramah Anak di Kota Cirebon, 2025.....	111
Gambar 11.3	Implementasi Sekolah Tanpa Rokok di Kota Cirebon, 2025	112
Gambar 11.4	Implementasi Kebudayaan Anak, 2025.....	114
Gambar 11.5	Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Cirebon, 2025	115



1

Pendahuluan

2

Penyusunan Data Terpilah

3

Gambaran Umum

4

Gender Bidang Kependudukan

5

Gender Bidang Pendidikan

6

Gender Bidang Kesehatan

7

Gender Bidang Ketenagakerjaan

8

**Gender Bidang Ekonomi dan
Pemberdayaan**

9

**Gender Bidang Hukum dan
Sosial Budaya**

10

Gender di Sektor Publik



11

Profil Anak Kota Cirebon

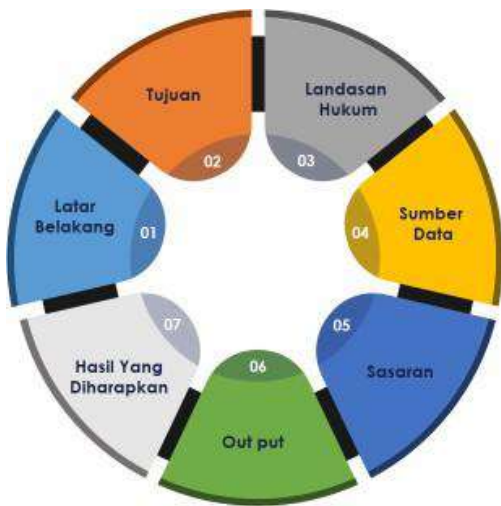
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender. Keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai dimensi kehidupan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan.



Pengarusutamaan Gender (*gender mainstreaming*) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (*marginalisasi, stereotype, subordinansi, kekerasan dan beban ganda*). Sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan nonpemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan.

Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender



(PUG). Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk: (i) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, termasuk anak, dalam dimensi tempat dan waktu (ii) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan (iii) mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki. Data gender adalah data yang menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan, serta disparitasnya, sehingga dapat dirumuskan isu gender. Melalui data gender ini selain dapat dirumuskan isu gender, dapat pula sebagai bahan pengambilan keputusan berkaitan dengan kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Permasalahan ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Hal ini berarti ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan merupakan masalah yang masih dihadapi di masa mendatang. Menindaklanjuti persoalan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender menurut jenis kelamin dan data anak di daerahnya melalui Permen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Permen Nomor 4 Tahun 2023 juga mengamanatkan pentingnya data gender dan anak sebagai dasar pengambilan keputusan penting menyangkut kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat. Penyelenggaraan data gender dan anak disini merupakan suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis

kelamin dan umur, serta data kelembagaan PUG yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Data terpilah menurut jenis kelamin bermanfaat untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi/kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda. Penggunaan data gender ini adalah untuk melakukan analisis gender, dan menentukan intervensi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Tahapan penyusunan data dan informasi meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender.

Agenda pembangunan *Sustainable Goals* (SDGs) isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Salah satu tujuan pembangunan pada era SDGs adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Akan tetapi masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index* atau GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (*Gender Empowerment Index* atau GEM). Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan pengalaman sebagai laki-laki. Data menurut jenis kelamin ini merupakan data dasar untuk melakukan analisis gender dan harus dikombinasi dengan variabel-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosial-ekonomi, latar belakang, budaya, kecacatan. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin juga menjadi inti dalam menghasilkan Gender Statistik yaitu informasi yang mengandung isu gender, sebagai hasil dari analisis gender.

Data yang menjadi basis pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan kontekstualitas dan tidak mampu mengungkap perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, mengakibatkan kesulitan dalam mengenali masalah-masalah gender yang ada. Karena kesetaraan dan keadilan gender belum mencapai tahapan yang diharapkan semua pihak, oleh karena itu pemerintah melalui berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan yang secara garis besar terkait dengan urusan wajib pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.2 Tujuan



Publikasi Data Terpilah Gender ini disusun untuk melihat perkembangan Data Terpilah Gender dan Anak di Kota Cirebon sepanjang tahun 2025 serta memotret tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak merupakan bagian dari konsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk membangun landasan pembangunan yang kuat agar pembangunan dapat terwujud dengan berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Penyusunan statistik gender Kota Cirebon ini dimaksudkan untuk menyajikan fakta dan kondisi pencapaian pembangunan masyarakat berperspektif gender, dan fakta terkait kondisi anak di Kota Cirebon. Data Terpilah Gender dan Anak diperlukan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi perempuan dan laki-laki pada bidang-bidang utama, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, pertanian, perlindungan perempuan dan anak, serta keluarga berencana. Statistik gender juga diharapkan mampu menggambarkan keunikan isu-isu gender maupun isu-isu perlindungan anak yang khas di Kota Cirebon. Data Terpilah Gender dan Anak Kota Cirebon ini disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:



1. Tersedianya data dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan sebaran penduduk;
2. Tersedianya data terpilah gender di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan anak, dan bidang-bidang yang menjadi isu gender khas di Kota Cirebon;
3. Tersedianya hasil analisis tentang capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Cirebon. Hal ini dilihat berdasarkan indikator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor publik, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan dalam distribusi pendapatan;
4. Meningkatkan aksesibilitas Perangkat Daerah dalam mengumpulkan, melaporkan data terpilah, sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender;
5. Memperkuat kelembagaan terkait pengelolaan data gender dan anak;
6. Membangun mekanisme dan mendorong pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi dalam upaya ketersediaan data gender dan anak di Kota Cirebon;
7. Mendorong pemanfaatan data gender dan anak untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di Kota Cirebon;
8. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi gender dan anak;
9. Bahan untuk mengambil kebijakan untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum pendataan dan pengolahan data terpilah gender dan anak di Kota Cirebon tahun 2026 adalah sebagai berikut:



1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4 Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam Profil Gender dan Anak Kota Cirebon Tahun 2026 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu data sekunder yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon dan Perangkat Daerah Kota Cirebon yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Cirebon Tahun 2026.



1.5 Sasaran

Penggalian data gender yang menyangkut semua isu dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, pertanian, politik, sosial budaya, hukum dan data anak meliputi tumbuh kembang, kelangsungan hidup, perlindungan data kelembagaan yang meliputi kelembagaan PUG, kelembagaan PUHA di wilayah Kota Cirebon.





1.6 Output

Mengidentifikasi perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki termasuk anak dalam dimensi tempat dan waktu;

Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah kebutuhan pengalaman perempuan dan laki-laki;

1.7 Hasil Yang Diinginkan

1. Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2026;
2. Data gender dan anak untuk memberikan acuan bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
3. Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga sektoral dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan data gender dan anak;
4. Base data gender dan anak, dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.



PEDOMAN PENYUSUNAN

1. SPESIFIK

Dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan

2. DAPAT DIPERCAYA

Dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian



3. DAPAT DIUKUR

Dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar



4. RELEVAN

Data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan

5. BERKELANJUTAN

Penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan

BAB II

PENYUSUNAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpisah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan pengalaman sebagai laki-laki.

Data menurut jenis kelamin ini merupakan data dasar untuk melakukan analisa gender dan harus dikombinasi dengan variabel-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosial ekonomi, latar belakang, budaya dan kecacatan.



Data terpisah berdasarkan jenis kelamin juga menjadi inti dalam menghasilkan Gender Statistik yaitu informasi yang mengandung isu gender, sebagai hasil dari analisis gender.

Kegunaan data gender ini adalah:

1. Mengidentifikasi perbedaan (kondisi/kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda.
2. Melihat hasil dari intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak.
3. Sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua yang bekerja untuk mewujudkan kesetaraan gender.
4. Sebagai input untuk melakukan analisis gender.
5. Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki.
6. Sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua yang bekerja untuk mewujudkan

kesetaraan gender.

Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan (fakta) dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat ‘bercerita’ banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya.

Data tidak dapat dibaca sebelum diolah. Proses pengolahan itulah yang disebut dengan informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi merupakan nilai yang telah memiliki makna bagi seseorang.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak, yang dimaksud dengan data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang menggambarkan peran, kondisi umum, dan status serta kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya serta kekerasan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak pasal (10) mengungkapkan bahwa penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan dan pemanfaatan data yang sistematis, komprehensif, serta berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. **Data terpilah** adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi

kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya serta kekerasan. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Penyelenggaraan Data Gender dan Anak bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan meningkatkan ketersediaan data gender dan anak. Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: a. **Spesifik**, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak; b. **Dapat dipercaya**, artinya dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; c. **Dapat diukur**, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan; d. **Relevan**, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan e. **Berkelanjutan**, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Metode Penyediaan Data Gender

- Pengumpulan Data. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder didasarkan pada instrumen kuesioner yang akan dimintakan kepada Perangkat Daerah (PD) pengampu. Data sekunder diolah dan ditinterpretasikan sehingga dapat memberikan informasi akurat dalam pengambilan keputusan. Data sekunder ini diperkuat dengan diperoleh melalui *desk* Perangkat Daerah (PD) khususnya menentukan isu gender dari hasil olahan data sekunder serta informasi berkaitan program dan kegiatan yang relevan.



- Pengolahan Data. Pengolahan data dilakukan dengan pengelompokan data sesuai variabel yang disusun, dan dirumuskan berdasarkan tahun. Data yang telah terkompilasi selanjutnya ditabulasikan atau disusun dalam bentuk grafik sehingga memudahkan untuk dibaca.
- Analisis Data. Analisis data sekunder merupakan analisis data survei yang telah tersedia. Analisis ini mencakup interpretasi, kesimpulan atau tambahan pengetahuan dalam bentuk lain. Dari data sekunder didapat dua manfaat yang menyertainya. Analisis sekunder dapat menjadi alternatif untuk mendapat jawaban yang tidak didapat dari penelitian primer. Analisis data sekunder bermanfaat sebagai alat komparasi dengan data yang telah ada untuk mencari perbedaan dengan temuan yang baru.
- Analisis lain yang digunakan adalah analisis gender. Analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil, dimana laki-laki maupun perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena sistem ketidakadilan gender tersebut. Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender (*practical gender needs*). Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah dikenali hasilnya.

GAMBARAN UMUM

GEOGRAFIS



Secara geografis Kota Cirebon terletak pada 108°33 Bujur Timur dan 6°41 Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ±11 km dengan ketinggian dari permukaan laut ±5 m (termasuk dataran rendah).

Batas-batas wilayah Kota Cirebon adalah sebelah Utara Sungai Kedung Pane, sebelah Barat Sungai Banjir Kanal, sebelah Selatan Sungai Kalijaga dan sebelah Timur Laut Jawa.

Kota Cirebon memiliki luas wilayah administrasi 39,48 km² yang terbagi ke dalam lima kecamatan, yaitu Harjamukti, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kejaksan dan Kesambi. Harjamukti memiliki luas wilayah yang paling besar mencapai 44,63 persen sementara Pekalipan paling kecil hanya mencapai 4,02 persen.

Komponen Pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Komponen Pembentukan IPM terdiri dari:

1. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun.

2. Standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan.

3. Pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.

IPM TAHUN 2025
78,99



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon

IPM Kota Cirebon dengan capaian nilai IPM sebesar 78,99 merupakan yang tertinggi di wilayah Ciayumajakuning. Dengan digunakannya UHH hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form (SP2020LF) maka lima kabupaten/kota yang berada di wilayah Ciayumajakuning berada pada kelas interval capaian IPM kategori tinggi.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah

Secara geografis Kota Cirebon terletak pada 108°33 Bujur Timur dan 6°41 Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ±11 km dengan ketinggian dari permukaan laut ±5 m (termasuk dataran rendah).

Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta.

Batas-batas wilayah Kota Cirebon adalah sebelah Utara Sungai Kedung Pane, sebelah Barat Sungai Banjir Kanal, sebelah Selatan Sungai Kalijaga dan sebelah Timur Laut Jawa.

Kota Cirebon memiliki luas wilayah administrasi 39,48 km² yang terbagi kedalam lima kecamatan, yaitu: Harjamukti, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kejaksan dan Kesambi. Harjamukti memiliki luas wilayah yang paling besar mencapai 44,63 persen, sementara Pekalipan paling kecil hanya mencapai 4,02 persen.

Ketinggian Kota Cirebon di atas permukaan air laut ± 5 m. Sedangkan kecamatan paling tinggi di atas permukaan air laut yaitu Kecamatan Harjamukti dengan ketinggian 6 s.d 200 m.

3.2 Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Kota Cirebon terdiri dari 5 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Harjamukti
2. Kecamatan Lemahwungkuk
3. Kecamatan Pekalipan
4. Kecamatan Kesambi
5. Kecamatan Kejaksan

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Cirebon dengan luas 39,48 km², pada tahun 2025 ini masih terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan. Perincian luas perkecamatan adalah

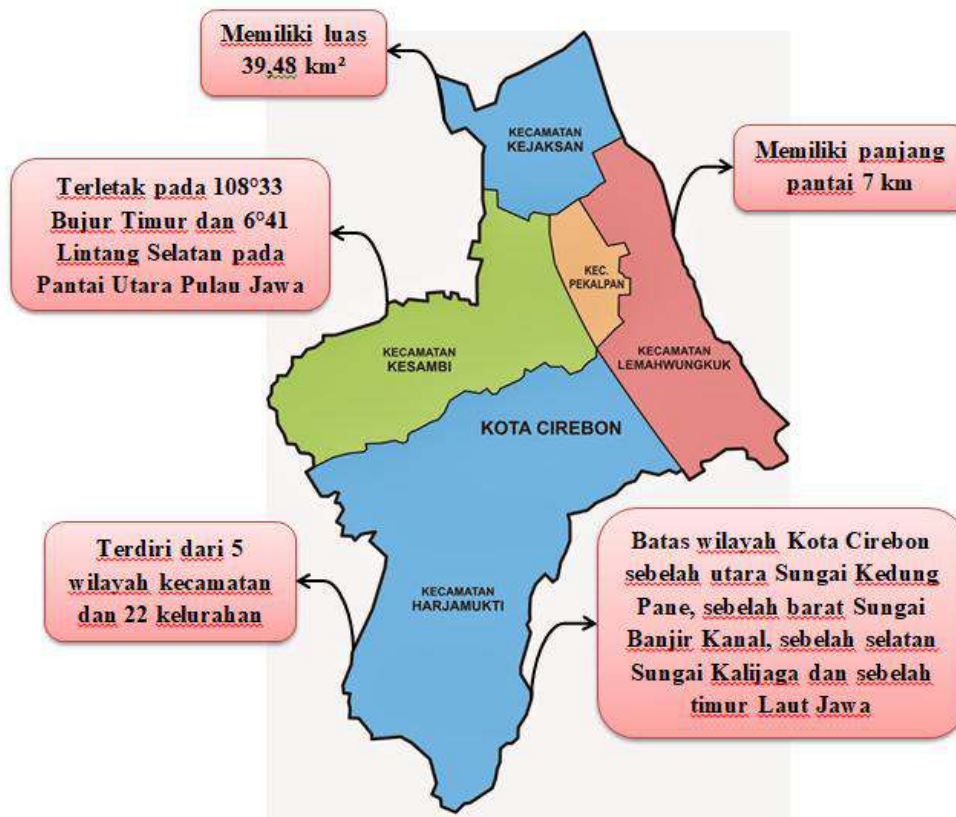
sebagai berikut:

Tabel 3.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Cirebon

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km ²)
(1)	(2)	(3)
Harjamukti	Kalijaga	17,62
Lemahwungkuk	Pegambiran	7,16
Pekalipan	Pekalipan	1,59
Kesambi	Kesambi	8,66
Kejaksan	Kesenden	4,45
Kota Cirebon	Kejaksan	39,48

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 3.1 Keadaan Geografis Kota Cirebon



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sejak awal, pembangunan manusia sudah menjadi tujuan dalam model pembangunan di Indonesia, setidaknya dalam tataran normatif yang tercermin dalam falsafah negara seperti Pancasila, UUD 1945, dan dokumen-dokumen kenegaraan lainnya. Berbagai model untuk mengukur keberhasilan pembangunan telah banyak dikembangkan, diantaranya konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), pembangunan sumber daya manusia (*human resource development*), kebutuhan dasar (*basic needs*), dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pembangunan sumber daya manusia memandang manusia sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya dengan faktor-faktor produksi lainnya yaitu, tanah, modal dan mesin. Manusia digunakan sebagai sarana untuk mengejar tingkat output yang tinggi tetapi dalam proses ini manusia bukan sebagai pewaris dari apa yang telah dihasilkan. Pembangunan yang mempunyai pendekatan kebutuhan dasar hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar dapat keluar dari perangkat kemiskinan tanpa memiliki pilihan-pilihan dalam meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan pembangunan dengan kesejahteraan manusia memandang manusia dalam proses pembangunan hanya sebagai penerima bukan sebagai peserta yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan (agen pembangunan). Semua model pembangunan tersebut dinilai masih bersifat parsial/tunggal.

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya "*Global Human Development Report*" memperkenalkan konsep "Pembangunan Manusia (*Human Development*)", sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka tersebut.

Konsep pembangunan diatas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pengembangan sumber daya manusia.



Menurut UNDP upaya ke arah "perluasan pilihan" hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur di atas, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan pada 4 (empat) indikator yaitu: Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age 0: AHH*), Angka Melek Huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate: AMH*), Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling: MYS*), dan *Purchasing Power Parity* (PPP). Angka harapan hidup mengukur dimensi "umur panjang dan sehat", angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi "pengetahuan dan keterampilan", dan *purchasing power parity* mengukur dimensi kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan HDI (*Human Development Index*) yang diterjemahkan menjadi IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Penghitungan IPM UNDP digunakan untuk perbandingan kemajuan pembangunan manusia antar negara. Sedangkan BPS mengaplikasikan penghitungan IPM tersebut untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di Indonesia baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

BPS melakukan beberapa penyesuaian pada penghitungan IPM, yaitu pada komponen pendidikan dan ekonomi. Pada komponen pendidikan, BPS menggunakan MYS bukan APS karena APS merupakan indikator input, sementara MYS merupakan indikator output yang lebih mampu menggambarkan pencapaian di bidang pendidikan. Kemudian pada komponen ekonomi, BPS menggunakan PPP dengan pendekatan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan karena lebih mampu menggambarkan daya beli masyarakat dibandingkan dengan *Gross Domestic Product* (GDP).

Gambar 3.2 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon Menurut Dimensi Pembentuknya, Tahun 2022-2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,87	75,17	75,48	75,97
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,14	13,16	13,17	13,45
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,33	10,37	10,53	10,54
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	12.087	12.506	12.869	13.341
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		75,89	77,45	78,09	78,99

Dimensi Umur Panjang dan Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 1,1 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,48 persen per tahun. Pada tahun 2022, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kota Cirebon adalah 74,87 tahun, dan pada tahun 2025 mencapai 75,97 tahun

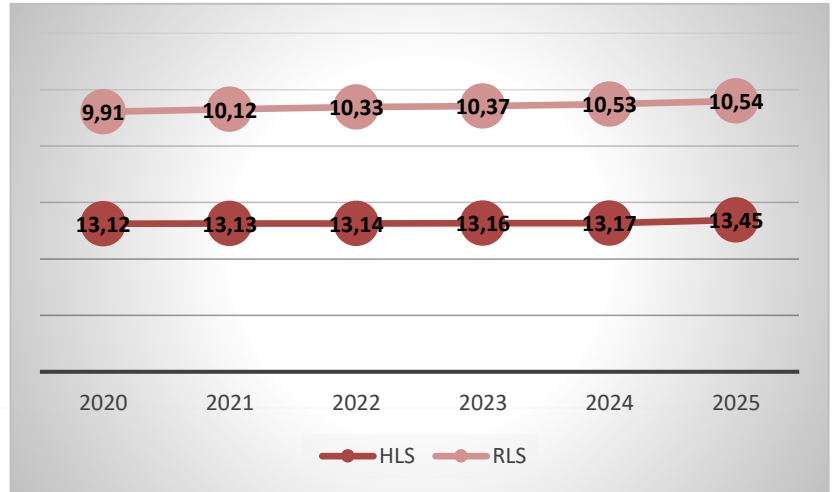
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025



Dimensi Pengetahuan

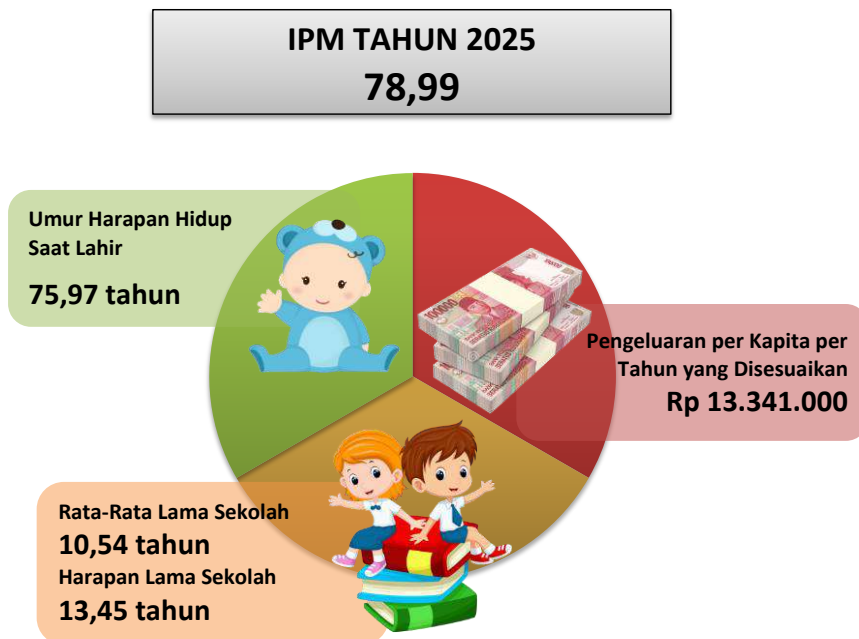
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, HLS Kota Cirebon telah meningkat 0,33 tahun atau secara rata-rata tumbuh 0,49 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,63 tahun atau rata-rata tumbuh 1,20 persen per tahun.

Gambar 3.3 Dimensi Pengetahuan



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

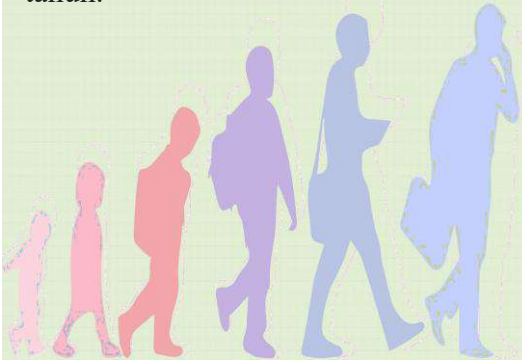
Gambar 3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2025, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kota Cirebon mencapai Rp13,34 juta per tahun atau mengalami pertumbuhan 3,67 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selama periode 2020-2025 pengeluaran per kapita yang disesuaikan meningkat Rp1,54 juta atau secara rata-rata tumbuh 2,49 persen per tahun.

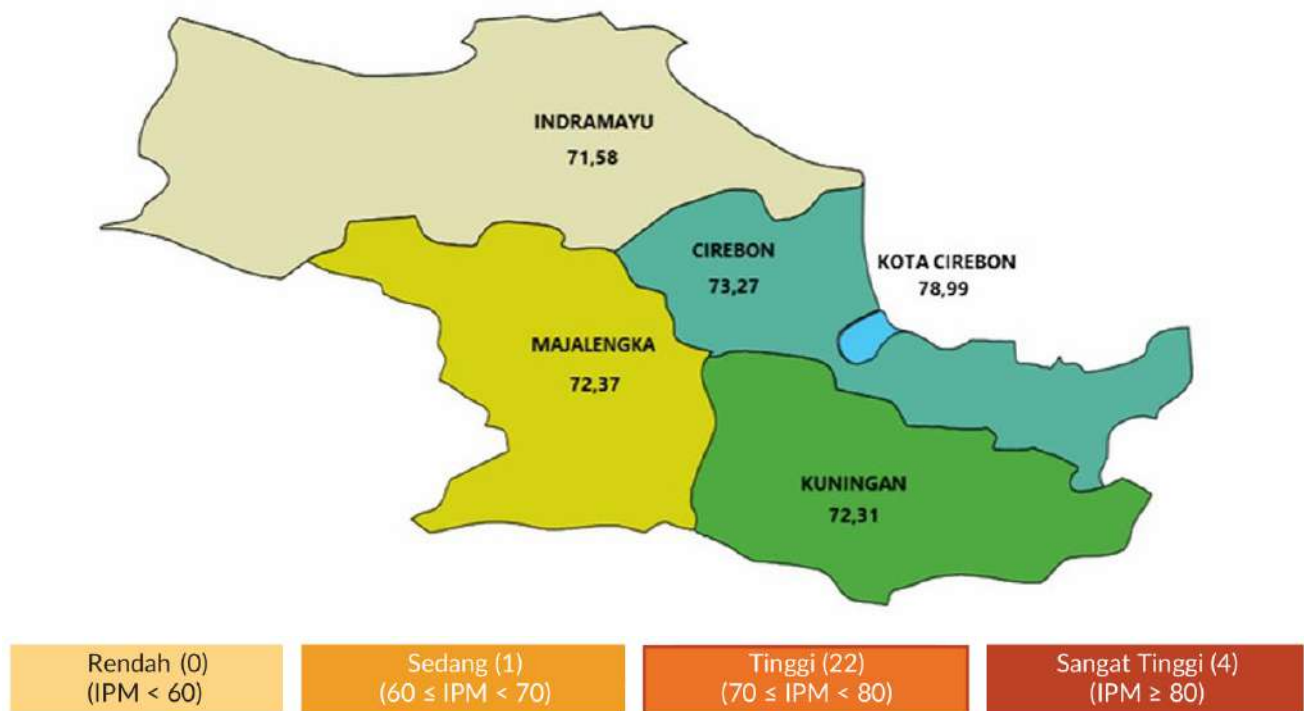


Gambar 3.5 Dimensi Standar Hidup Layak



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah III Ciayumajakuning Menurut Dimensi Pembentuknya Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 3.6 IPM Kota Cirebon dengan capaian nilai IPM sebesar 78,99 merupakan yang tertinggi di wilayah Ciayumajakuning. Dengan digunakannya UHH hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form (SP2020LF) maka lima kabupaten/kota yang berada di wilayah Ciayumajakuning berada pada kelas interval capaian IPM kategori tinggi.

Dari sisi perbandingan angka IPM antar daerah di wilayah Ciayumajakuning, capaian IPM tertinggi kedua adalah Kabupaten Cirebon dengan angka IPM senilai 73,27, sedangkan untuk urutan selanjutnya adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu dengan angka IPM berturut-turut 72,37; 72,31; dan 71,58.

GENDER BIDANG KEPENDUDUKAN

PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

Penduduk Kota Cirebon tahun 2025 sebesar 359.150 jiwa dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 180.165 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 178.985 jiwa.

ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Angka beban tanggungan Kota Cirebon pada tahun 2025 sebesar 43,90 yang berarti dari 100 orang penduduk produktif harus menanggung kebutuhan hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi sebanyak 43-44 orang.

KOMPOSISI UMUR

Kota Cirebon sebagian besar memiliki penduduk umur muda, khususnya kelompok umur 5-9 tahun, yaitu sebesar 8,41 persen dan kelompok umur 10-14 tahun yaitu mencapai 8,45 persen.

SEBARAN PENDUDUK

Sebaran penduduk di Kota Cirebon sebagian besar berada di Kecamatan Harjamukti, yaitu sekitar 36,79 persen dari keseluruhan penduduk Kota Cirebon (359.150 jiwa), disusul Kecamatan Kesambi sekitar 22,67 persen.



BAB IV

DATA GENDER

BIDANG KEPENDUDUKAN

Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat trend dinamika penduduk sebagai monitoring dan evaluasi program pembangunan. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri.

Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dinamika penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Penduduk Kota Cirebon Tahun 2025 sebesar 359.150 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (sex ratio). Sex Ratio penduduk Cirebon sebesar 100,66. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 100-101 penduduk laki-laki. Angka sex ratio ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan relatif seimbang dari penduduk laki-laki.

Jika pembahasan di fokuskan pada perempuan, terlihat bahwa dari sebanyak 178.985 jiwa jumlah perempuan, 95.114 jiwa (53,14 persen) diantaranya berusia 15-49 tahun yang dalam demografi termasuk kategori penduduk usia reproduksi yaitu penduduk wanita yang secara biologis memiliki potensi yang besar untuk hamil dan melahirkan.

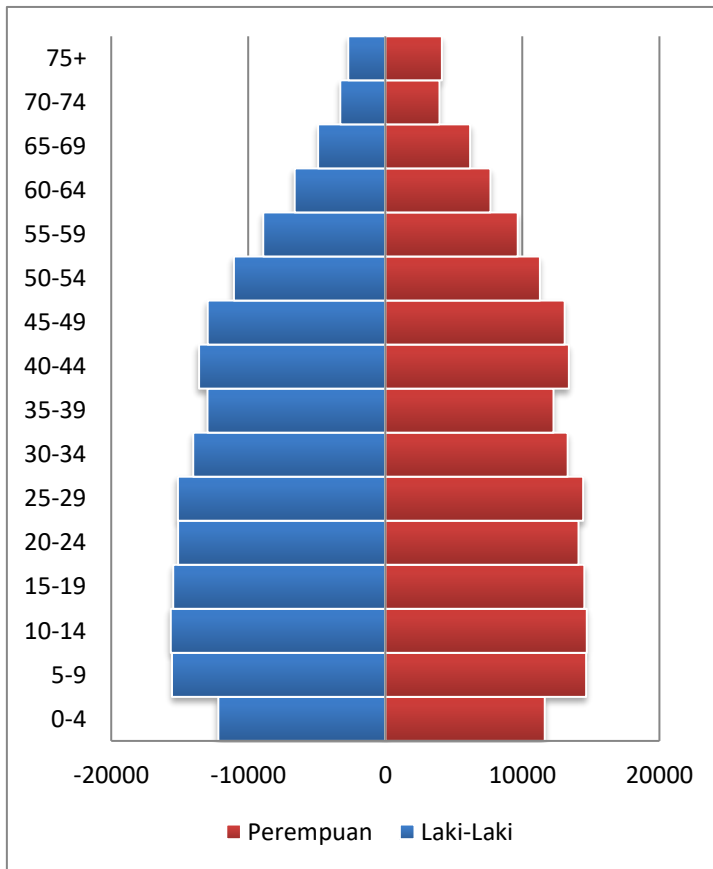
Jika dilihat menurut kelompok usia, terlihat bahwa semakin tua usia penduduk maka rasio jenis kelamin semakin mengecil. Penduduk usia 75 tahun ke atas jumlah penduduk perempuan hampir dua kali lipat penduduk laki laki (sex ratio sebesar 65,62). Hal ini

menunjukkan perempuan lebih bertahan hidup dari pada laki laki hingga dapat mencapai usia lansia.

Gambar 4.1 Piramida Penduduk Kota Cirebon, 2025

Laki-laki = 180.165
Perempuan = 178.985

SR = 100,66



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, 2025

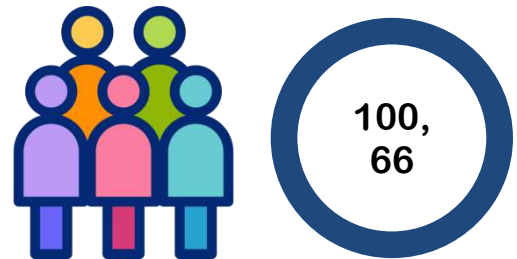
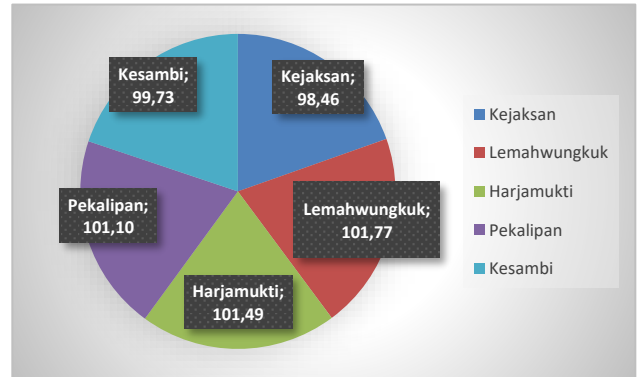
Jika dilihat dari komposisi umur seperti yang disajikan, penduduk Kota Cirebon sebagian besar memiliki penduduk umur muda, khususnya kelompok umur 5-9 tahun, yaitu sebesar 8,41 persen, dan kelompok umur 10-14 tahun, yaitu mencapai 8,45 persen. Tabel di atas juga menunjukkan komposisi penduduk Kota Cirebon berkumpul pada kelompok umur yang produktif dan kelompok umur muda, terutama pada kelompok umur 5-9 tahun, dan kelompok umur 10-14 tahun. Komposisi umur penduduk ini menghasilkan suatu indikator tentang beban ketergantungan dari kelompok penduduk nonproduktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap kelompok penduduk produktif (15-64 tahun) secara ekonomis. Artinya, semakin besar angka beban ketergantungan (ABT) maka semakin berat untuk menanggung penduduk yang nonproduktif secara ekonomis, baik penduduk usia muda maupun usia tua.

Angka beban ketergantungan Kota Cirebon pada tahun 2025 sebesar 43,90 yang berarti dari 100 orang penduduk produktif harus menanggung kebutuhan hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi sebanyak 43-44 orang. Atau setiap satu orang penduduk produktif harus menanggung sekitar dua orang penduduk nonproduktif.

4.2 Rasio Jenis Kelamin

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Angka SR pada tahun 2025 sebesar 100,66 yang berarti jumlah penduduk laki-laki hampir berimbang dengan penduduk perempuan, meskipun penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Hanya Kecamatan Kejaksan dan Kesambi yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, karena SR di kecamatan tersebut di bawah 100.

Gambar. 4.2 Rasio Jenis Kelamin, 2025



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, 2025

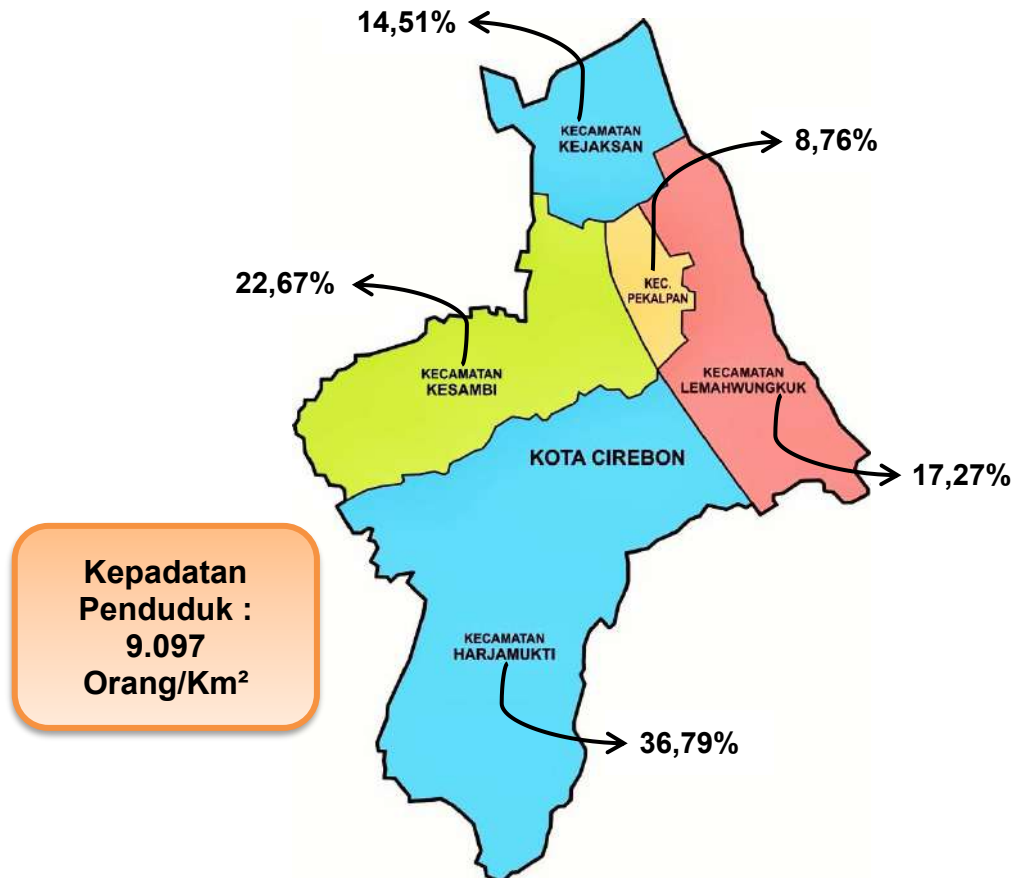
4.3 Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Cirebon pada kurun waktu tahun 2024-2025 sebesar 0,71 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, selain kelahiran. Diantaranya adalah migrasi penduduk. Kota Cirebon yang merupakan bagian wilayah III Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan).

Kemudian bila meninjau kepadatan penduduk Kota Cirebon pada tahun 2025 mencapai 9.097 orang per kilometer persegi. Kepadatan terbesar di Kota Cirebon berada di Kecamatan Pekalipan, yaitu sebesar 19.786 orang per kilometer persegi, dan diurutan kedua adalah Kecamatan Kejaksan yang mencapai 11.711 orang per kilometer persegi. Kedua kecamatan ini memiliki luas wilayah yang relatif kecil dibanding kecamatan-kecamatan

lainnya, yaitu masing-masing 1,59 kilometer persegi (Kecamatan Pekalipan), dan 4,45 kilometer persegi (Kecamatan Kejaksan), tetapi memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, sehingga kepadatan di dua kecamatan ini relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya.

Gambar 4.3 Distribusi Penduduk Kota Cirebon, 2025



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, 2025

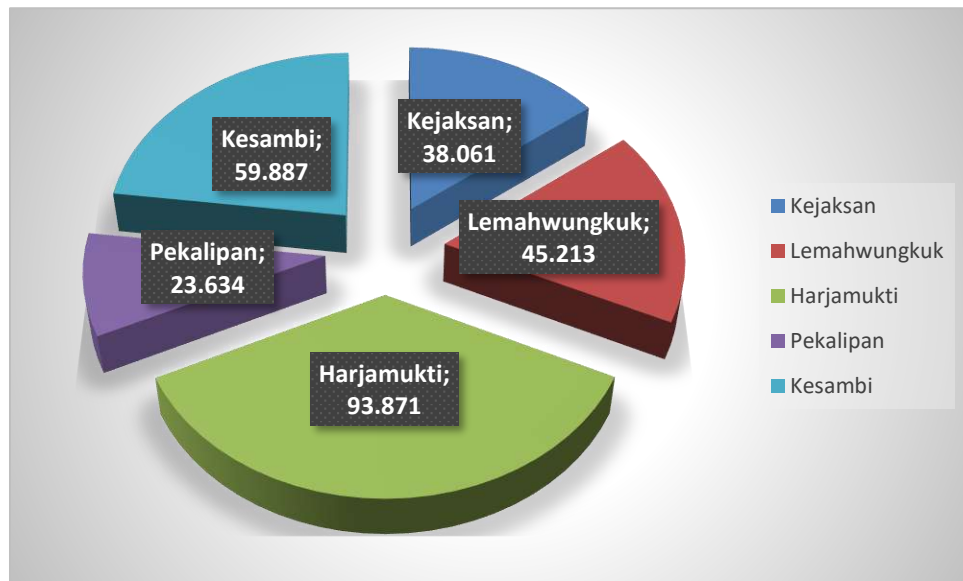
Sebaran penduduk di Kota Cirebon sebagian besar berada di Kecamatan Harjamukti, yaitu sekitar 36,79 persen dari keseluruhan penduduk Kota Cirebon (359.150 jiwa), disusul Kecamatan Kesambi sekitar 22,67 persen.

Penyebaran penduduk ini perlu disikapi dengan memperhatikan kelayakan lingkungan pemukiman dan sanitasi agar tidak terjadi suatu kondisi, dimana antara banyaknya penghuni dengan sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tersebut tidak memadai, sehingga akan berdampak pada permasalahan sosial.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh kelahiran dan penduduk yang datang (migrasi masuk) ke wilayah Kota Cirebon, dan dicatat sebagai penduduk Kota

Cirebon yang jumlahnya lebih banyak dibanding penduduk yang meninggal dan penduduk yang pindah keluar dari Kota Cirebon (migrasi keluar). Kemudian berdasarkan kepemilikan KTP, tercatat ada sebanyak 260.666 orang penduduk yang memiliki KTP, dengan jumlah terbesar di Kecamatan Harjamukti sebanyak 93.871 orang dan terkecil di Kecamatan Pekalipan sebanyak 23.634 orang.

Gambar 4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP, 2025



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, 2025

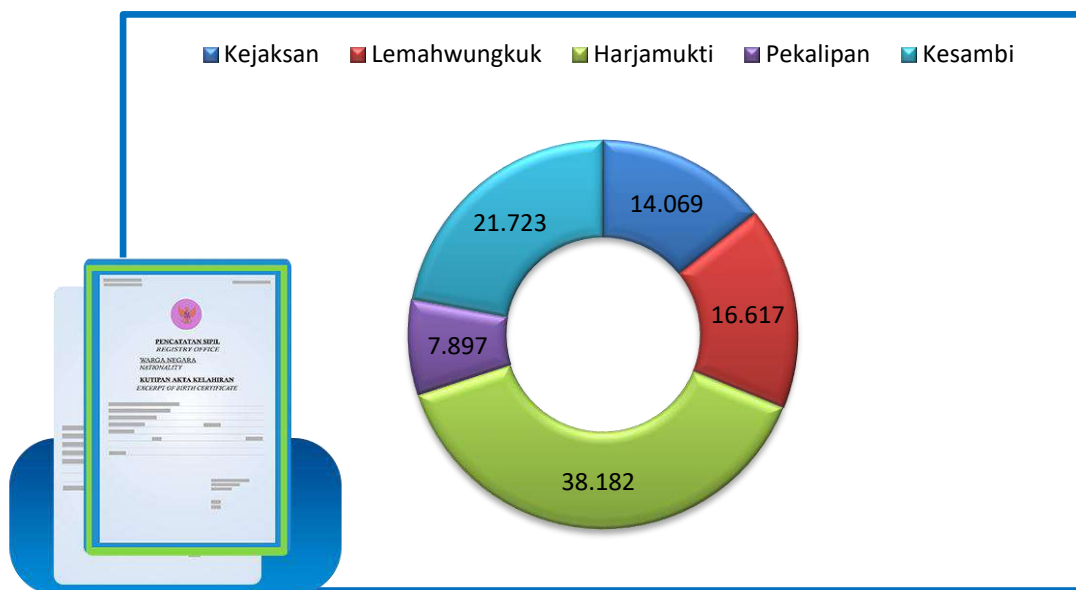
Tahun 2025 ada kenaikan jumlah kepemilikan KTP, yang sebelumnya pada tahun 2024 sebanyak 256.453 orang, pada tahun 2025 naik menjadi 260.666 orang. Hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya aplikasi SIAK Terpusat yang dioperasikan pada periode tahun 2023-2025.

4.4 Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Anak

Hak Sipil anak adalah hak asasi yang melekat pada pribadi seseorang (anak) sebagai seorang individu unik ditengah masyarakat sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa termasuk hak identitas anak. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal

5 yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, serta ayat 2 yaitu “identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran”. Lebih lanjut Akta Kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap warga negaranya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa untuk memiliki Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya (gratis), namun masih ada anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran dengan berbagai alasan.

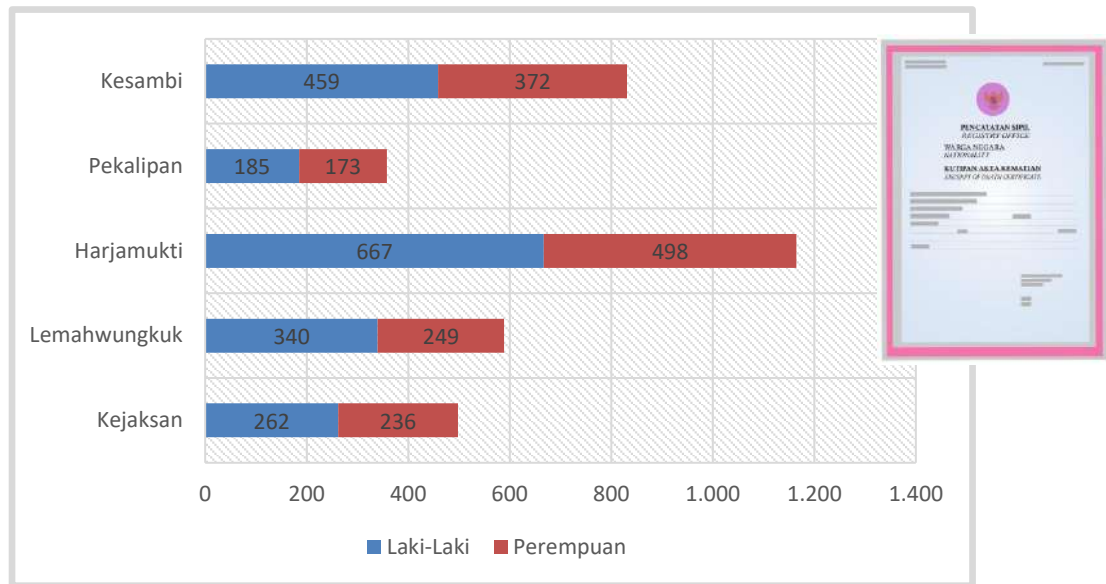
Gambar 4. 5 Akta Kelahiran yang Dikeluarkan Selama 2025



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, 2025

Akta Kelahiran dan Akta Kematian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon. Selama tahun 2025 persentase penduduk <18 tahun yang memiliki NIK dan Akta Kelahiran sebesar 96,04 persen. Artinya masih ada 3,96 persen lagi penduduk <18 tahun yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Sedangkan Akta Kematian yang dikeluarkan sebanyak 3.441 dokumen dengan 1.913 Akta Kematian laki-laki dan 1.528 Akta Kematian perempuan.

Gambar 4.6. Akta Kematian yang Dikeluarkan Selama 2025



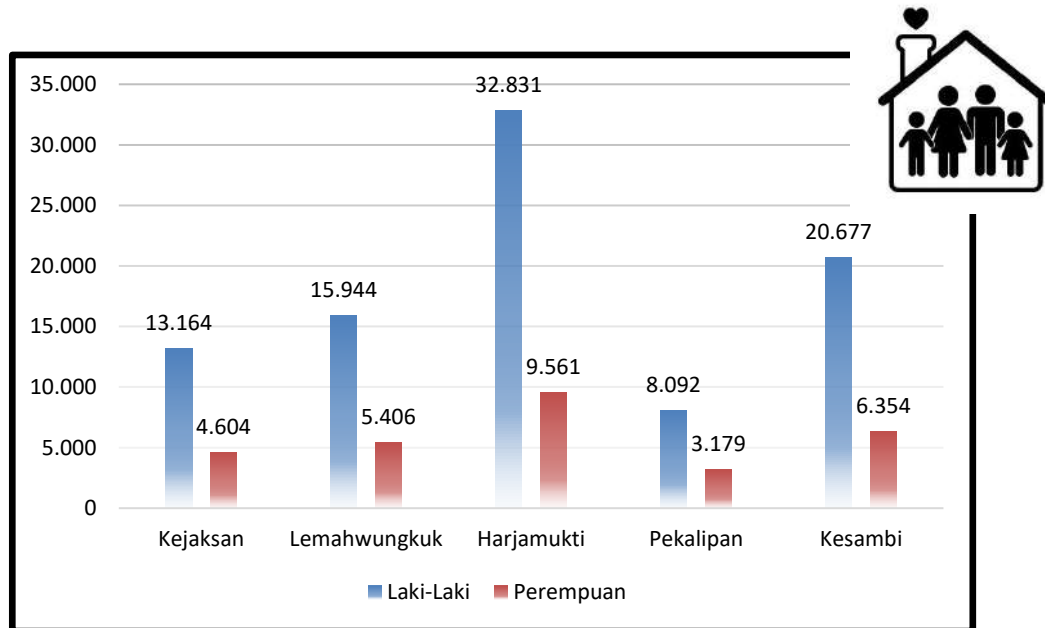
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, 2025

4.5 Kepala Rumah Tangga Perempuan

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta pemenuhan keperluan makan/minum/kebutuhan sehari-hari seluruh anggotanya dalam 1 (satu) pengelolaan (makan dari satu dapur). Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak. Sementara Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau yang dianggap/ditunjuk sebagai KRT. Kepala Rumah Tangga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu rumah tangga, bisa kepala keluarga/pasangannya atau anggota keluarga lainnya.

Pada 2025 terdapat 29.104 orang atau 24,29% kepala rumah tangga di Kota Cirebon adalah perempuan, hal ini berarti perempuan di Kota Cirebon memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya. Dan bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,94%, maka kepala rumah tangga perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,35%.

Gambar 4.7 Banyaknya Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin, 2025



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, 2025

DATA GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Penduduk di Kota Cirebon pada tahun 2025, sekitar 23,84 persen tidak/belum pernah sekolah. Sedangkan 76,16 persen sedang menempuh pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi



Pada tahun 2025, APS pada jenjang pendidikan SD/ sederajat sebanyak 99,98 persen, SMP/ sederajat sebanyak 94,31 persen, SMA/ sederajat sebanyak 84,39 persen, dan Perguruan Tinggi sebanyak 31,78 persen



APK SD/ sederajat pada tahun 2025 sebesar 109,21 persen, SMP/ sederajat sebesar 97,18 persen, dan SMA/ sederajat sebesar 92,41 persen



APM SD/ sederajat pada tahun 2025 sebesar 97,04 persen, SMP/ sederajat sebesar 73,31 persen, dan SMA/ sederajat sebesar 67,30 persen





BAB V

DATA GENDER

BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal dan nonformal. Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik.

Tolok ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, angka putus sekolah/angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolok ukur pembangunan sumber daya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi). Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam dimensi gender, perlu disajikan data terpisah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias-bias gender yang ditimbulkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah dicanangkan bahwa diberlakukan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, dianjurkan pula bahwa orang tua agar menyekolahkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki sekurang-kurangnya sampai menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat pertama.

Keberhasilan pembangunan pendidikan bagi perempuan akan mempercepat proses kesetaraan dan keadilan gender. Karena perempuan yang terdidik berarti perempuan yang berhasil keluar dari keterbelakangan sehingga akan menjadi kelompok masyarakat yang juga dapat memperjuangkan hak kesetaraannya tersebut. Selain itu perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih baik akan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan cara mendidik anaknya agar lebih baik.

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur



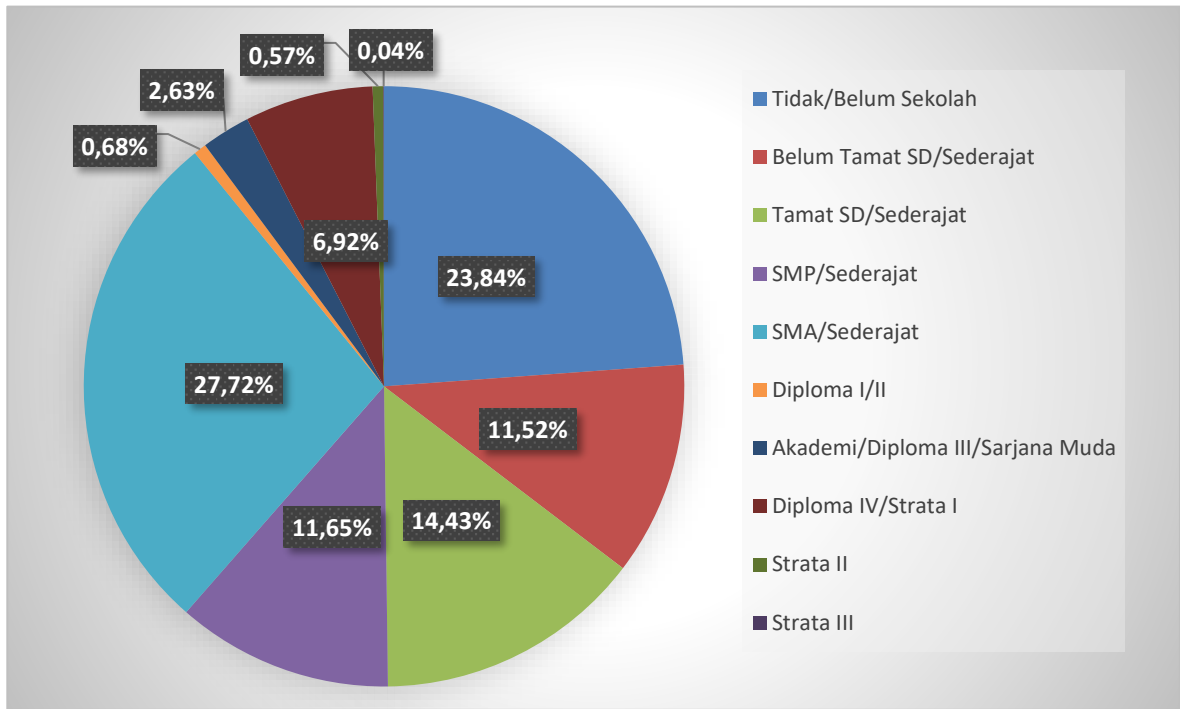
dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun nonformal. Pendidikan formal dititik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan segala atributnya seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian juga peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan nonformal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 12 tahun.

Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam membangun dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdayakan. Tanpa mengenyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Penduduk di Kota Cirebon pada tahun 2025, sekitar 23,84 persen tidak/belum pernah sekolah, sekitar 11,52 persen masih bersekolah di SD/ sederajat, sekitar 14,43 persen telah tamat SD/ sederajat, sekitar 11,65 persen berpendidikan SMP/ sederajat, sekitar 27,72 persen berpendidikan SMA/ sederajat, sekitar 0,68 persen berpendidikan Diploma I/II, sekitar 2,63 persen berpendidikan Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda, sekitar 6,92 persen berpendidikan Diploma IV/ Strata I, sekitar 0,57 persen berpendidikan Strata II, dan sekitar 0,04 persen berpendidikan Strata III.

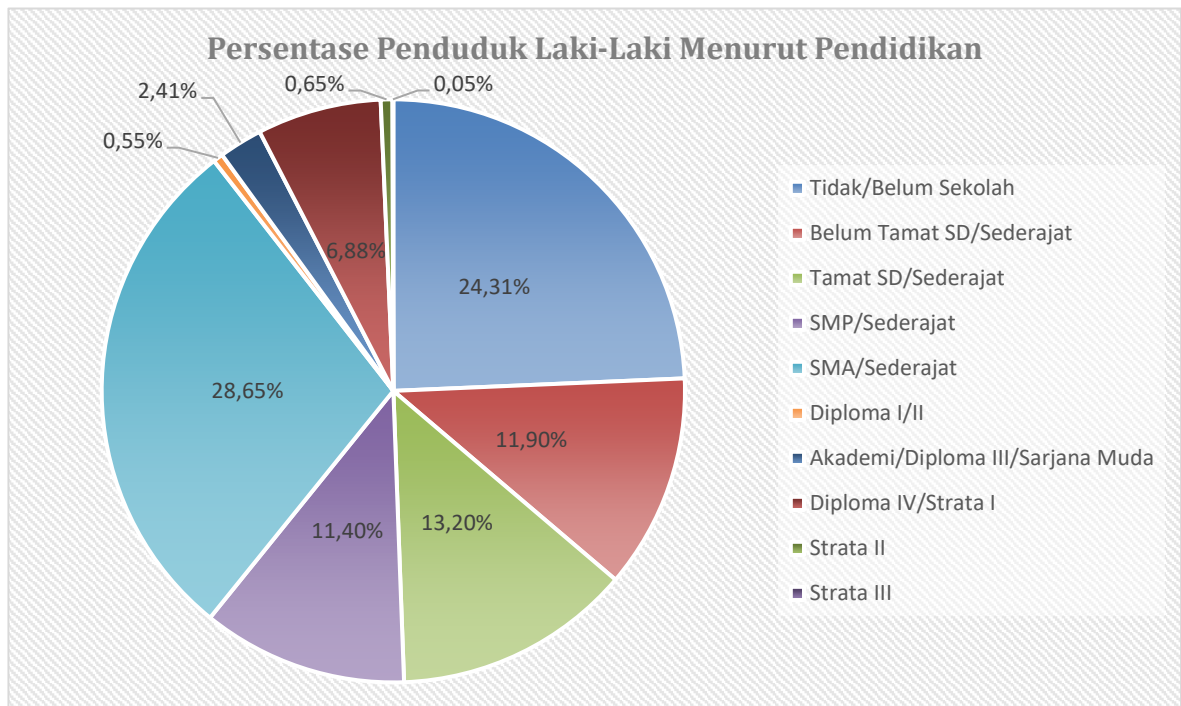


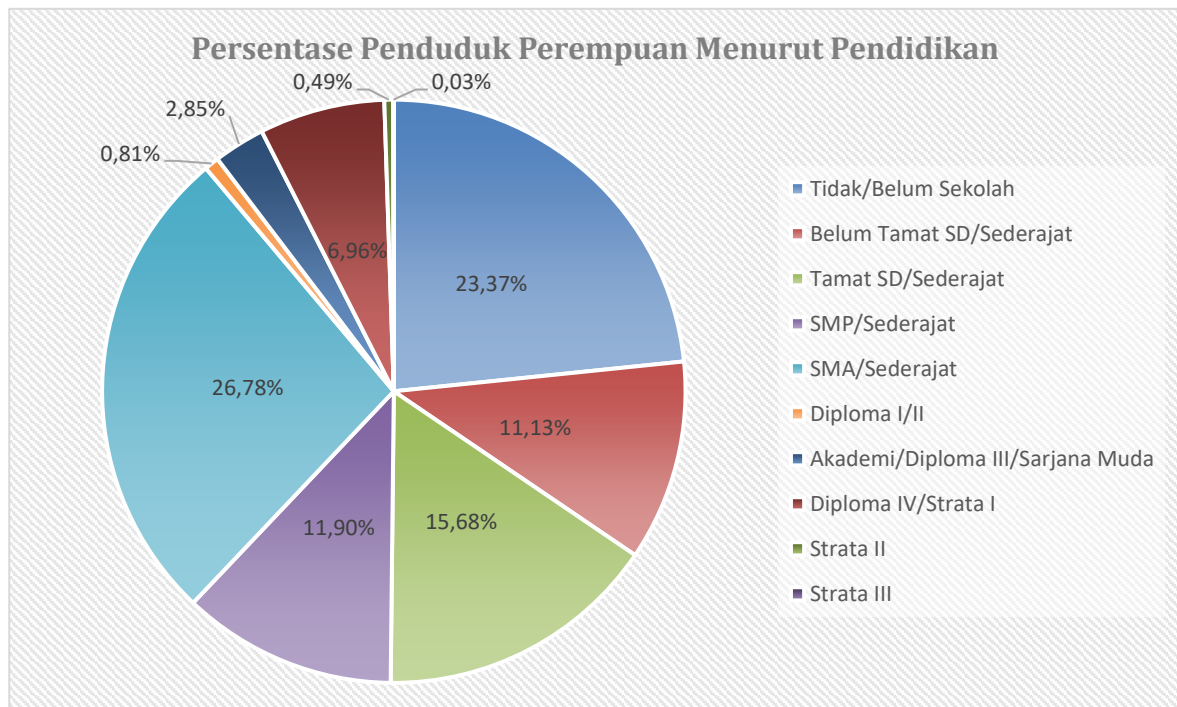
Gambar 5.1 Persentase Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, 2025

Gambar 5.2 Persentase Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025





Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, 2025

5.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi dalam suatu kegiatan penting diketahui, dengan mengetahui angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai masyarakat atau tidak disukai. Semakin besar angka partisipasi suatu program pendidikan berarti, program, lembaga, daerah tersebut berkualitas, sebaliknya kurang dan peserta banyak berhenti dalam proses pelaksanaan program berarti program, lembaga dan daerah tersebut tidak berkualitas.

Indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi anak usia sekolah dalam proses kegiatan belajar di pendidikan formal (sekolah) adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat di artikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula

dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Perluasan kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan telah menambah angka partisipasi wanita dalam pendidikan. Konsekuensinya terhadap perencanaan pembangunan yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja bagi penduduk perempuan. Kegunaan Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Pada tahun 2025, APS pada jenjang pendidikan SD/ sederajat sebanyak 99,98 persen, SMP/ sederajat sebanyak 94,31 persen, SMA/ sederajat sebanyak 84,39 persen, dan Perguruan Tinggi sebanyak 31,78 persen.

5.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

APK ini menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK

berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Menurut Badan Pusat Statistik, APK SD/ sederajat pada tahun 2025 sebesar 109,12 persen, SMP/ sederajat sebesar 97,18 persen, dan SMA/ sederajat sebesar 92,41 persen. APK SD/ sederajat lebih besar dari 100 artinya sekitar 9,12 persen terdapat anak yang sedang bersekolah di SD/ sederajat di luar umur 7-12 tahun. APK SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat kurang dari 100 artinya sekitar 2,82 persen anak usia 13-15 tahun tidak sedang bersekolah di SMP/ sederajat dan sekitar 7,59 persen anak usia 16-18 tahun tidak sedang bersekolah di SMA/ sederajat.

5.3 Angka Partisipasi Murni

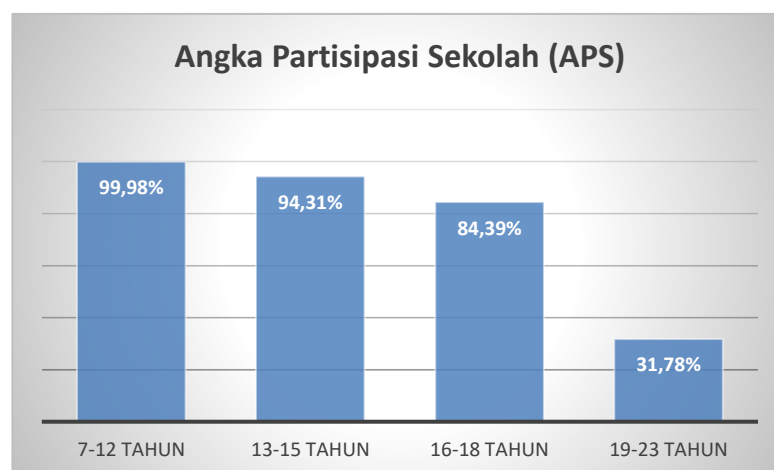
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Beberapa indikator dan manfaat Angka Partisipasi Murni (APM):

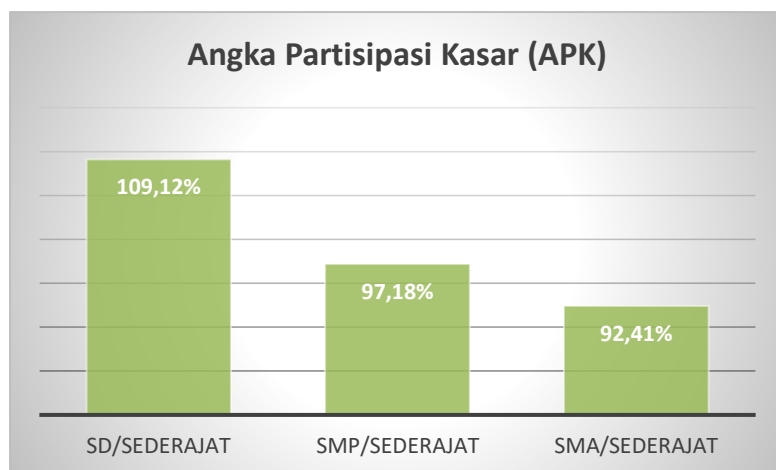
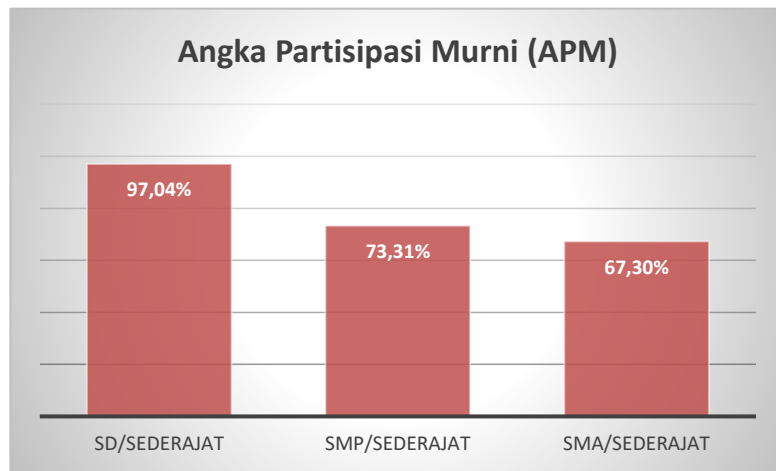
1. **Indikator Pendidikan:** APM adalah indikator yang penting untuk menilai sejauh mana akses masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi APM, semakin banyak anak-anak atau peserta didik yang terlibat dalam pendidikan pada tingkat tertentu, yang merupakan indikasi positif tentang partisipasi pendidikan.
2. **Pengukuran Kesenjangan:** APM dapat membantu dalam mengukur tingkat kesetaraan pendidikan di suatu wilayah. Jika APM tinggi, itu menunjukkan bahwa lebih banyak anak-anak atau peserta didik dari berbagai latar belakang mendapatkan akses ke pendidikan. Sebaliknya, APM yang rendah dapat menandakan kesenjangan dalam akses pendidikan di antara kelompok-kelompok sosial atau ekonomi.
3. **Perencanaan Pendidikan:** Data APM dapat digunakan untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya pendidikan secara lebih efektif. Informasi tentang jumlah potensial peserta didik di suatu wilayah akan membantu pemerintah atau lembaga pendidikan dalam mengambil keputusan terkait pembangunan infrastruktur, alokasi guru, perangkat pembelajaran, dan kebijakan lainnya.

4. **Penilaian Pencapaian Pendidikan:** Perbandingan APM antara tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran tentang kemajuan pendidikan di suatu negara atau wilayah. Jika APM meningkat dari tahun ke tahun, itu bisa menjadi tanda positif bahwa akses dan partisipasi dalam pendidikan semakin meningkat.
5. **Indikator Pembangunan Sosial:** Tingkat APM yang tinggi juga dapat diartikan sebagai indikator pembangunan sosial yang baik. Pendidikan yang lebih luas dapat meningkatkan kesempatan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
6. **Mengurangi Angka Buta Aksara:** Semakin tinggi APM, semakin sedikit orang yang buta aksara dalam masyarakat. Akses yang lebih besar ke pendidikan dapat membantu mengurangi angka buta aksara, yang pada gilirannya akan memberdayakan individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, APM SD/ sederajat pada tahun 2025 sebesar 97,04 persen, SMP/ sederajat sebesar 73,31 persen, dan SMA/ sederajat sebesar 67,30 persen. Ini berarti pada jenjang SD/ sederajat masih ada sekitar 2,96 persen anak usia 7-12 tahun, jenjang SMP/ sederajat sekitar 26,69 persen anak usia 13-15 tahun, dan jenjang SMA/ sederajat sekitar 32,70 anak usia 16-18 tahun yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Gambar 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Cirebon, 2025





Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Persoalan pendidikan di Kota Cirebon hingga kini sangatlah kompleks. Selain anggaran pendanaan, sarana dan prasarana, kualitas guru hingga kuantitas atau kebutuhan guru masih menjadi masalah serius dan pekerjaan rumah yang menghadang. Salah satu implikasi langsung teknologi abad modern adalah terjadinya percepatan perubahan di segala bidang. Teknologi selain mendorong cepatnya dinamika dalam kehidupan masyarakat, juga mensyaratkan perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang. Sektor pendidikan juga termasuk bidang yang ikut mengalami perubahan yang cepat itu. Sebagai bagian atau stakeholders dari proses pendidikan, kita harus mampu mengikuti tuntutan perubahan itu dengan terus bergerak agar tidak tertinggal dan tidak ditinggalkan oleh era yang berubah cepat itu. Ini harus sudah lebih dari cukup menyadarkan kita bahwa pendidikan itu sangat penting.

Tantangan dunia pendidikan ke depan adalah mewujudkan proses demokratisasi belajar. Pembelajaran yang mengakui hak anak untuk melakukan tindakan belajar sesuai



karakteristiknya. Hal penting yang perlu ada dalam lingkungan belajar yang demokratis adalah *realness*. Sadar bahwa anak memiliki kekuatan disamping kelemahan, memiliki keberanian di samping rasa takut dan kecemasan, bisa marah di samping juga bisa gembira.

Banyak hal yang menjadi faktor terjadinya perubahan tersebut seperti bervariasi dan keunikan peserta didik, lingkungan yang berkembang tiada henti, serta implikasinya bagi tujuan, muatan, guru, dan pengelolaan pembelajaran pada pendidikan menengah umum. Siswa adalah entitas yang unik. Masing-masing memiliki pengalaman, profil, minat dan kebutuhan yang tidak persis sama. Memberikan layanan pendidikan yang seragam bagi semua siswa berarti memaksakan sebuah ukuran pakaian yang sama bagi semuanya. Hasilnya, pasti akan mengecewakan. Itu sebabnya optimalisasi potensi belajar siswa hanya akan terjadi apabila guru dalam suatu kelas menerapkan penerapan kurikulum berdiferensiasi dalam pembelajaran. Diferensiasi itu dapat dilakukan seperti merujuk pada keragaman isi pelajaran, perangkat asesmen, tugas unjuk kerja, serta strategi instruksional, yang diselaraskan dengan pengalaman dan kebutuhan anak. Hal seperti ini harus dipahami secara cermat oleh para guru yang berinteraksi langsung dengan para muridnya.

Untuk itu tentunya para guru memang sudah memiliki standar kompetensi yang mumpuni yang bukan hanya sebatas aspek formalnya saja tetapi sampai pada aplikasinya. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah penyebaran guru yang berstandar ini ke berbagai wilayah pendidikan. Seperti halnya di banyak bidang lainnya, sektor pendidikan juga dipengaruhi faktor internal yang meliputi jajaran dunia pendidikan itu sendiri.

Faktor kedua yakni faktor eksternal atau masyarakat tidak kalah penting dalam menentukan kualitas pendidikan di Indonesia. Masyarakat di sini meliputi lingkungan dan keluarga. Dari lingkungan, jika lingkungan yang selalu memperhatikan aspek pendidikan tentunya suasana pendidikan akan nyaman serta akan memacu siswa untuk terus meningkatkan prestasi yang berimbang pada meningkatnya kualitas pendidikan di lingkungan tersebut khususnya. Dari keluarga, sebagian besar keluarga di Indonesia tak mementingkan aspek gizi yang terkandung dalam makanan yang mereka dan keluarga mereka makan setiap hari. Terkadang memang dianggap sepele, tetapi dari sinilah akan terbentuk pemuda yang sekaligus siswa yang sehat, cerdas serta penuh dengan ide-ide



setiap hari. Masih adanya pola keluarga dalam mendidik anak-anaknya dengan tidak mengedepankan perhatian dan motivasi untuk kemajuan anak-anaknya. Pendidikan, oleh sebagian keluarga masih dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang baru akan dipenuhi jika kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan sudah tercukupi. Lagi-lagi kemiskinan menjadi persoalan dalam perkembangan pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia.

Perhatian terhadap pendidikan memiliki pentingan yang luas dan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perhatian terhadap pendidikan sangat penting:

1. Peningkatan Kesempatan: Pendidikan memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Pendidikan yang baik membuka pintu untuk peluang pekerjaan yang lebih baik, mobilitas sosial, dan kemajuan dalam karier.
2. Pembangunan Ekonomi: Investasi dalam pendidikan berdampak positif pada pembangunan ekonomi suatu negara. Tenaga kerja yang terdidik dan terampil meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing suatu negara di pasar global. Pendidikan yang berkualitas juga mendorong perkembangan industri, teknologi, dan sektor ekonomi lainnya.
3. Peningkatan Kualitas Hidup: Pendidikan memberikan akses terhadap pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Individu yang terdidik cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, perumahan yang layak, pangan bergizi, dan kemungkinan kehidupan yang lebih panjang.
4. Pemajuan Sosial dan Budaya: Pendidikan berperan dalam memajukan masyarakat dan mempromosikan kesetaraan. Dengan pendidikan yang inklusif, individu dari berbagai latar belakang dan kelompok sosial memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.



5. Pembentukan Pikiran Kritis: Pendidikan membantu membentuk kemampuan berpikir kritis dan analitis. Individu yang terdidik memiliki kemampuan untuk menganalisis informasi, mempertanyakan gagasan, dan mengembangkan pandangan yang berdasarkan bukti dan pemikiran rasional.

DATA GENDER BIDANG KESEHATAN



Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI di Kota Cirebon tahun 2025 ditemukan sebanyak 6 kasus, terbanyak berada di Kecamatan Harjamukti

Persalinan Ibu Hamil

Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (Linakes) sebesar 96,82 persen

Berat Bayi Lahir Rendah

Semua bayi BBLR sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100 persen

Pelayanan Antenatal

Pada tahun 2025, ibu hamil di Kota Cirebon sebesar 91,87 persen sudah mendapatkan pelayanan antenatal pertama kali

Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB per 1.000 kelahiran hidup tahun 2025, terbanyak di Kecamatan Harjamukti, yaitu 26/1.000

Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah sebesar 99,80 persen untuk bayi laki-laki dan 99,08 persen untuk bayi perempuan





BAB VI

DATA GENDER

BIDANG KESEHATAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan maksimal sesuai dengan keluhan yang diderita serta dengan pembiayaan yang terjangkau.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan akan menodai tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus-menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Pengawasan dan evaluasi memerlukan data dan informasi yang akurat. Karena dari data dan informasi tersebut dapat dilihat apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan telah bermanfaat bagi masyarakat ataukah belum dan apakah program yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Data dan informasi tersebut biasanya berupa indikator-indikator yang berkaitan dengan kesehatan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan, ukuran fertilitas yang mencakup umur kawin pertama, keluarga berencana



(KB) yang meliputi status pemakaian alat KB dan jenis-jenis alat KB yang digunakan.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak melalui pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjangkau setiap lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tingginya disparitas dan perlunya percepatan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengelolaan pembangunan kesehatan menjadi penting.

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia seseorang adalah kesehatan. Orang yang sehat akan mampu melakukan segala kegiatan sehingga akan memperoleh hasil yang optimal. Oleh karenanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sangatlah penting. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan bertujuan guna memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat.

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka pembangunan di Kota Cirebon khususnya pembangunan kesehatan telah di arahkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Pembangunan di bidang kesehatan menjadi prioritas utama terutama berkaitan dengan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta prevalensi gizi kurang pada balita. Upaya pemerintah dalam pemerataan pelayanan kesehatan pada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama rumah sakit, klinik, dan puskesmas serta fasilitas air bersih. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan di bidang kesehatan bertujuan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang mana nantinya juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan yang lebih utama yakni menurunkan angka kematian bayi/balita.

Program kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kehidupan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat.

6.1 Pelayanan Kesehatan Ibu

6.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Kematian ibu menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 1.000 kelahiran hidup.

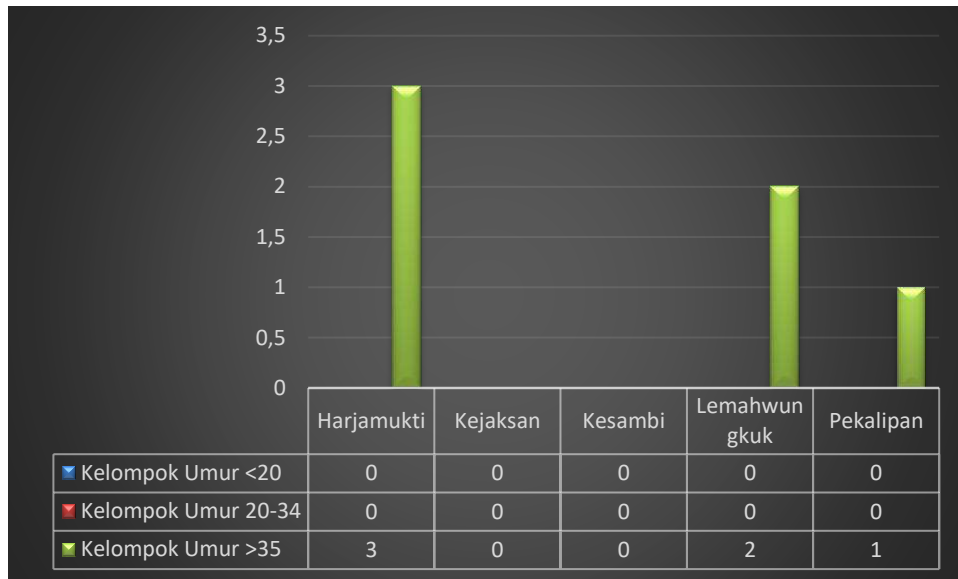
Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh :

1. Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan.
2. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran.
3. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetrik.

Kematian ibu dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Kasus kematian ibu meliputi kematian ibu selama kehamilan, persalinan dan ibu nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain di setiap 1.000 kelahiran hidup.

Tahun 2025 ditemukan sebanyak 6 kasus, terbanyak berada di Kecamatan Harjamukti sebanyak 3 kasus, Kecamatan Lemahwungkuk sebanyak 2 kasus, serta Kecamatan Pekalipan sebanyak 1 kasus. Sementara di Kecamatan Kejaksan dan Kesambi tidak ada kasus. Sedangkan kematian ibu pada kategori umur <20 tahun dan 20 - 34 tahun tidak ditemukan kasus.

Gambar 6.1 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, 2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

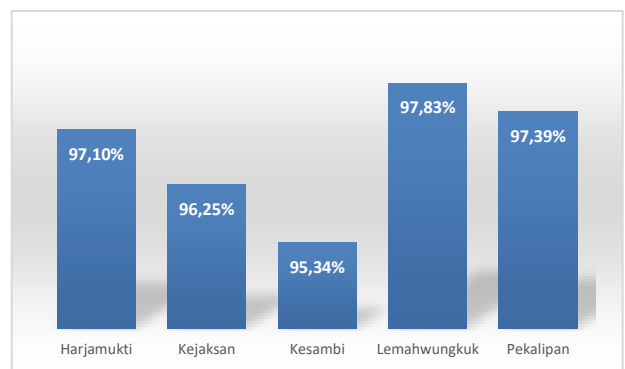
6.1.2 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes)

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu (AKI). Komplikasi serta kematian ibu dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional).

Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (linakes) adalah persentase balita (0-59 bulan) yang proses kelahirannya dibantu oleh tenaga kesehatan/medis.

Tabel 6.1 Cakupan Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan (Linakes)

No	Kecamatan	Sasaran	Absolut
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Harjamukti	1.724	1.674
2	Kejaksan	506	487
3	Kesambi	773	737
4	Lemahwungkuk	783	766
5	Pekalipan	268	261
Total		4.054	3.925



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

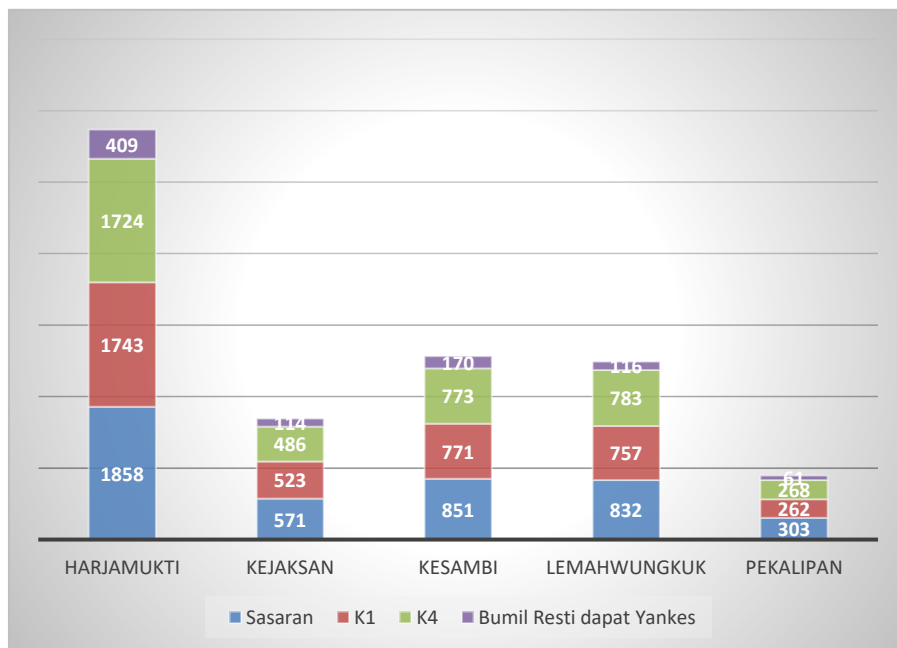
6.1.3 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Antenatal Care)

Ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam siklus pertumbuhan dan perkembangan anak, begitu juga dengan ibu hamil. Gangguan kesehatan yang di alami ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin dalam kandungan, bahkan gangguan tersebut jika tidak cepat ditanggulangi, akan berlanjut sampai setelah ia lahir, masa balita dan remaja.

Pelayanan Antenatal (ANC) pada ibu hamil adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (Nakes) profesional (dokter spesialis kandungan, bidan, dokter umum, dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif.

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Gambar 6.2 Cakupan Pelayanan Antenatal Care di Kota Cirebon Tahun 2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

Dari Gambar 6.2 di atas terlihat bahwa ibu hamil di wilayah Kota Cirebon sebesar 91,87 persen sudah mendapatkan pelayanan antenatal pertama kali, mengalami penurunan dibanding tahun lalu yaitu sebesar 100,00 persen, sedangkan persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal sebesar 91,37 persen.

6.2 Pelayanan Kesehatan Anak

6.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

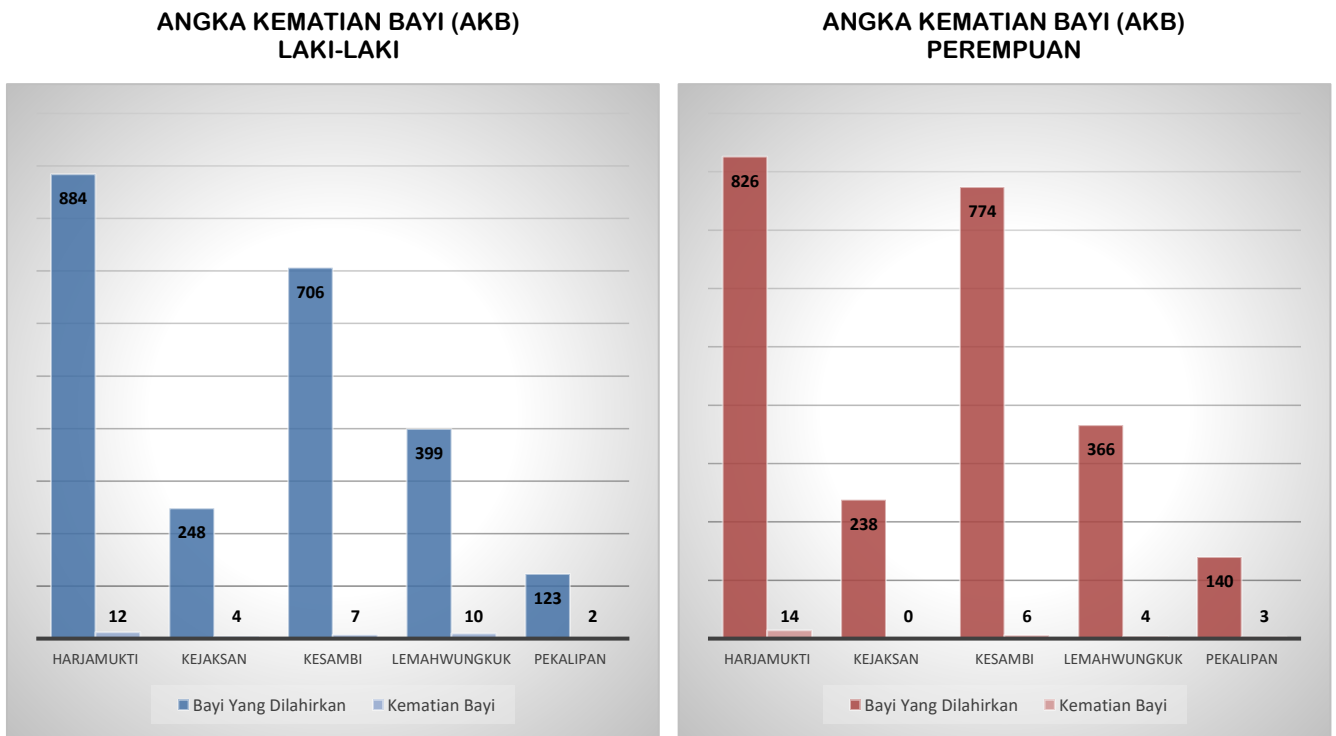
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau *infant mortality rate* (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Gambar 6.3 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup, 2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

Gambar 6.4 Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kecamatan per Jenis Kelamin, 2025



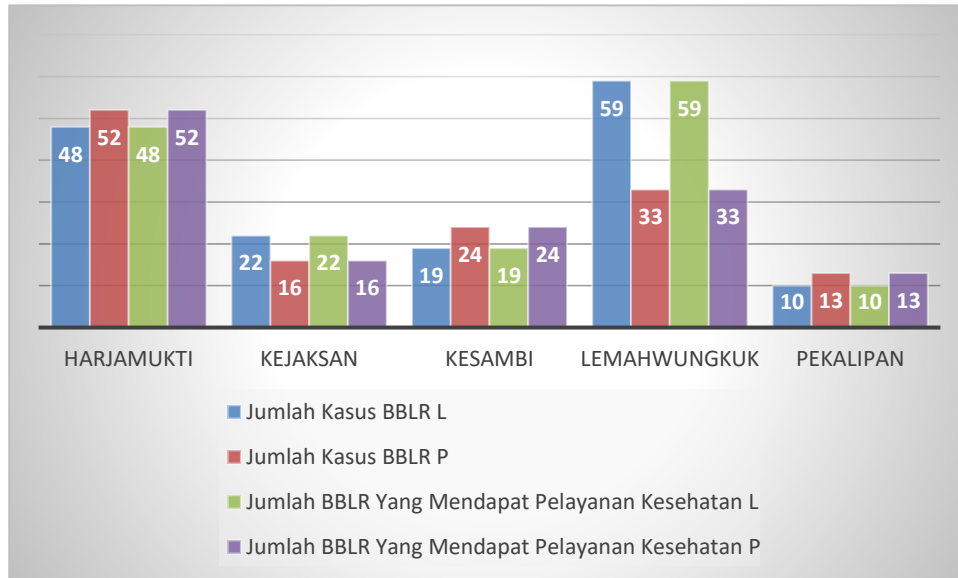
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

6.2.2 Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah

Salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah cakupan pelayanan kesehatan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang merupakan unsur terpenting dalam peningkatan kesehatan anak apalagi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) didefinisikan sebagai bayi lahir yang berat badannya kurang dari 2.500 gram. Bayi yang mempunyai Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan anak, cenderung mempunyai pertumbuhan fisik yang terhambat. Selain itu mudah terkena infeksi. Oleh karenanya penting untuk mendapatkan perhatian khusus dan perawatan medis yang tepat bagi bayi yang lahir dengan BBLR. Tim medis akan merawat bayi dan memantau kondisinya, memberikan nutrisi tambahan, memastikan kehangatan tubuh yang memadai, serta melakukan tes dan pengujian yang diperlukan untuk menentukan penyebab BBLR dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin timbul.

Jumlah bayi dengan BBLR di Kota Cirebon tahun 2025 sebanyak 296 kasus, dimana ditemukan 158 bayi laki-laki dan 138 bayi perempuan dengan berat badan lahir < 2.500 gram dari bayi yang lahir.

Gambar 6.5 Cakupan BBLR yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon, 2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua bayi BBLR baik perempuan maupun laki-laki sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

6.2.3 Cakupan Kunjungan Bayi

Bayi juga merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan maupun serangan penyakit. Oleh karena itu dilakukan upaya pelayanan kesehatan yang ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) minimal 4 kali. Program ini terdiri dari pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan campak). Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, 2 kali pemberian Vitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI eksklusif, MPASI, pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita serta lain-lain.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi.

Tabel 6.2 Cakupan Kunjungan Bayi ke Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di Satu Wilayah Kerja Kurun Waktu Yang Sama		Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Cakupan Kunjungan Bayi (%)	
		L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Harjamukti	884	826	885	805	100,11	97,46
2	Kejaksan	248	238	248	237	100,00	99,58
3	Kesambi	351	384	337	389	96,01	101,30
4	Lemahwungkuk	399	366	402	364	100,75	99,45
5	Pekalipan	123	140	129	141	104,88	100,71
Total		2.005	1.954	2.001	1.936	99,80	99,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

Selama tahun 2025, jumlah cakupan kunjungan bayi adalah sebesar 99,80 persen untuk bayi laki-laki dan 99,08 persen untuk bayi perempuan. Selama kunjungan bayi, tenaga kesehatan akan memeriksa berat badan, panjang, dan lingkar kepala bayi, memeriksa perkembangan motorik dan sosial, memeriksa fungsi organ, serta memberikan nasihat tentang gizi, imunisasi, keamanan, dan perawatan bayi secara umum.

6.2.4 Cakupan Kunjungan Anak Balita

Salah satu indikator yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan terkait dengan upaya kesehatan anak adalah pelayanan kesehatan pada anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan. Pelayanan kesehatan pada anak balita dilakukan oleh tenaga kesehatan dan memperoleh:

1. Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun penimbangan

- berat badan dan pengukuran tinggi badan minimal 8 kali dalam setahun.
2. Pemberian Vitamin A dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus.
 3. Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Balita minimal 2 kali dalam setahun.
 4. Pelayanan Anak Balita Sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Pada tabel di bawah ini menggambarkan bahwa kunjungan anak balita masih rendah pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan (99,63 persen dan 101,26 persen), hal ini berarti masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran orang tua untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Namun kesemuanya sudah mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.

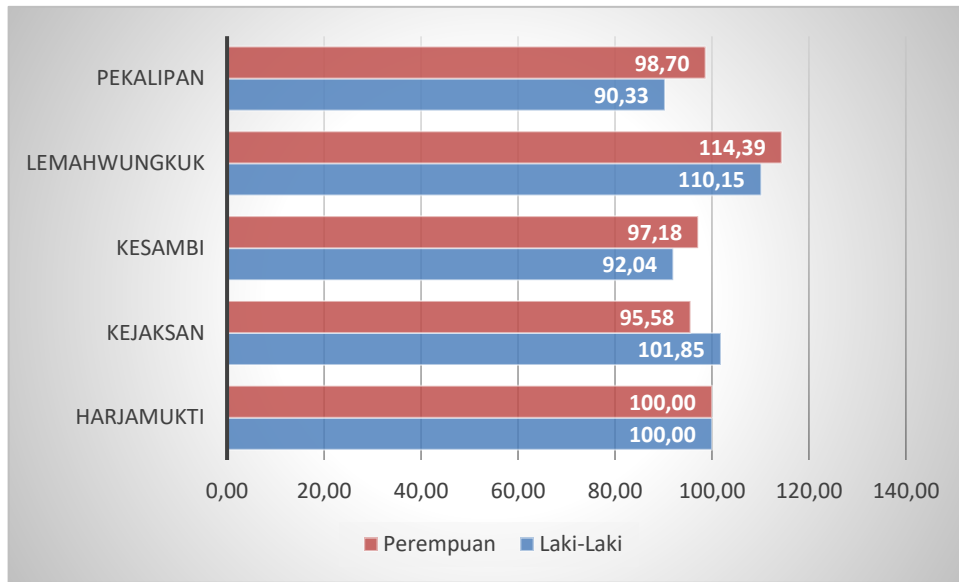
Cakupan kunjungan anak balita ke pelayanan kesehatan di Kota Cirebon selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.3 Cakupan Kunjungan Balita ke Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Seluruh Balita di Satu Wilayah Kerja Kurun Waktu Yang Sama		Jumlah Kunjungan Balita Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Cakupan Kunjungan Balita (%)	
		L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Harjamukti	3.829	3.694	3.829	3.694	100,00	100,00
2	Kejaksan	1.084	1.063	1.104	1.016	101,85	95,58
3	Kesambi	1.859	1.740	1.711	1.691	92,04	97,18
4	Lemahwungkuk	1.566	1.473	1.725	1.685	110,15	114,39
5	Pekalipan	662	616	598	608	90,33	98,70
Total		9.000	8.586	8.967	8.694	99,63	101,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

Gambar 6.6 Cakupan Kunjungan Balita (%), 2025



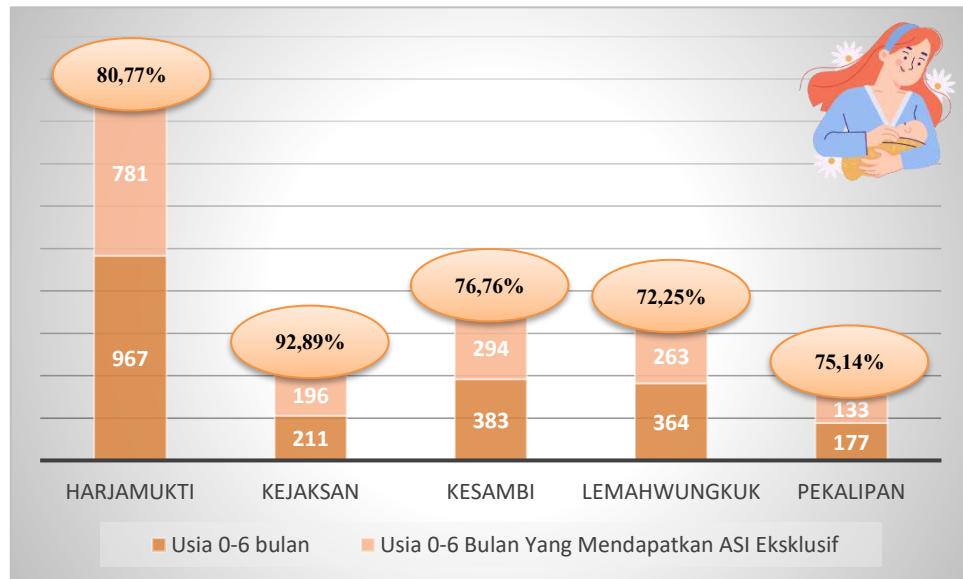
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

6.2.5 Bayi yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan (0–5 bulan 29 hari), tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali obat, vitamin dan mineral. Air Susu Ibu (ASI) eksklusif merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang merupakan hak asasi bagi bayi.

Pemberian ASI eksklusif kepada bayi usia kurang dari 6 bulan merupakan pemenuhan hak bayi yang sangat terkait dengan komitmen ibu dan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit (diare dan radang paru), meningkatkan kondisi kesehatan jangka pendek dan panjang, selain itu bermanfaat mempercepat pemulihan bila sakit.

Gambar 6.7 Cakupan Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Kecamatan, 2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

DATA GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN



Penduduk Usia Kerja

Komposisi penduduk usia kerja laki-laki sebesar 58,28 persen dan perempuan sebesar 41,72 persen. Untuk aspek angkatan kerja, penduduk laki-laki sebesar 58,55 persen dan perempuan sebesar 41,45 persen



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK laki-laki sebesar 81,05 persen dan perempuan 57,05 persen. TPAK Kota Cirebon tahun 2025 adalah sebesar 69,02 persen atau naik sekitar 0,47 persen dibanding tahun lalu



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT Kota Cirebon pada tahun 2025 sebesar 6,84 persen laki-laki dan 5,81 persen perempuan dengan Total TPT (laki-laki dan perempuan) sebesar 6,41 persen terhadap angkatan kerja



Lapangan Pekerjaan

Pada tahun 2025 lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah jasa yaitu sebesar 80,95 persen dan yang terkecil adalah pertanian sebesar 1,08 persen



Status Pekerjaan Utama

Sebagian besar atau sekitar 51,31 persen penduduk Kota Cirebon berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dan yang terkecil berstatus berusaha dibantu buruh tetap



Pemenuhan Lowongan Pekerjaan

Pemenuhan lowongan permintaan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha terbesar berada di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 32,24 persen

BAB VII

DATA GENDER

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Salah satu aspek yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan penduduk adalah ketenagakerjaan. Hal ini karena berkaitan erat dengan dimensi sosial dan dimensi ekonomi.

Dilihat dari dimensi sosial, pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Sedangkan dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika dapat memberikan sumber penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian diusahakan agar perekonomian dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian tersebut.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh BPS adalah yang disarankan oleh *The International Labour Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk yang secara potensial berperan dalam memproduksi barang dan jasa. Oleh karenanya untuk dapat menggambarkan potensi penduduk dalam menghasilkan output suatu daerah diperlukan adanya data ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan di daerah seperti peningkatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan usaha serta produktifitas tenaga kerja.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahtraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan

perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok Angkatan Kerja terdiri atas penduduk bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

7.1 Komposisi Penduduk Usia Kerja

Angkatan Kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun keatas. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk Angkatan Kerja, bisa jadi mereka tergolong Bukan Angkatan Kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok Angkatan Kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Dengan kata lain penduduk yang termasuk Angkatan Kerja merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu penduduk yang terlibat dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa (secara ekonomi), seperti pekerja yang mendapat upah, mempunyai usaha sendiri, termasuk pekerja yang membantu pihak lain untuk memproduksi barang dan jasa tanpa mendapat upah atau penduduk yang sedang mencari pekerjaan.

Perhatian terhadap komposisi penduduk usia kerja sangat penting, disebabkan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Produktivitas Ekonomi: Pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja cenderung mencapai puncaknya pada usia kerja. Oleh karena itu, memiliki proporsi penduduk yang besar dalam kelompok usia ini dapat meningkatkan produktivitas ekonomi suatu negara. Lebih banyak tenaga kerja yang produktif berarti lebih banyak kontribusi terhadap produksi barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Sistem Keuangan dan Kesejahteraan Sosial: Penduduk usia kerja adalah tulang punggung sistem keuangan dan kesejahteraan sosial suatu negara. Melalui pajak penghasilan dan kontribusi ke program-program sosial, seperti jaminan sosial atau

pensiun, mereka mendukung pembiayaan pelayanan publik dan jaring pengaman sosial. Dengan memiliki jumlah penduduk usia kerja yang cukup besar, negara dapat memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakatnya.

3. **Pertumbuhan Demografis yang Seimbang:** Komposisi penduduk usia kerja yang seimbang membantu menghindari masalah pertumbuhan demografis yang tidak seimbang. Jika terlalu banyak penduduk usia tua dibandingkan dengan penduduk usia kerja, bisa terjadi tekanan pada sistem pensiun dan kesehatan, serta penurunan daya beli dan konsumsi. Di sisi lain, jika terlalu banyak penduduk usia muda dibandingkan dengan penduduk usia kerja, bisa terjadi tekanan pada sektor pendidikan dan kesulitan dalam menyediakan lapangan kerja yang cukup.
4. **Inovasi dan Perubahan:** Penduduk usia kerja cenderung menjadi sumber inovasi, perubahan, dan kemajuan dalam suatu masyarakat. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan ambisi untuk menghadapi tantangan baru. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, memiliki populasi usia kerja yang beragam dan terampil sangat penting untuk menghadapi perubahan yang cepat dan memanfaatkan peluang yang muncul.

Kebijakan yang tepat dalam pendidikan, pelatihan, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan demografi dapat membantu mencapai komposisi yang optimal, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Komposisi penduduk usia kerja yang seimbang antara laki-laki dan perempuan penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam dunia kerja akan menjamin partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi lebih besar bagi suatu negara atau masyarakat. Dengan memastikan kesempatan yang adil, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta penghapusan hambatan yang menghambat partisipasi perempuan, kita dapat mencapai komposisi yang merata dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Di Kota Cirebon pada bulan Agustus 2025, komposisi penduduk usia kerja jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk laki laki yang bekerja lebih banyak dari penduduk perempuan yang masing-masing sebesar 58,28 persen untuk laki-laki dan 41,72 persen untuk perempuan. Begitu pula ditinjau dari aspek Angkatan Kerja, penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan, yaitu sebesar 58,55 persen sedangkan perempuan sebesar 41,45

persen. Hal ini wajar karena laki laki dalam rumah tangga terutama yang sudah kawin mempunyai kewajiban mencari nafkah bagi keluarganya, sebaliknya perempuan mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga.

Tabel 7.1. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kota Cirebon, 2025

Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja	108.855	77.067	185.922
a. Bekerja	101.413	72.590	174.003
b. Pengangguran Terbuka	7.442	4.477	11.919
II. Bukan Angkatan Kerja	25.451	58.012	83.463
a. Sekolah	9.921	9.802	19.723
b. Mengurus Rumah Tangga	7.685	45.198	52.883
c. Lainnya	7.845	3.012	10.857
Jumlah (I+II)	134.306	135.079	269.385

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pertambahan jumlah penduduk secara otomatis akan meningkatkan jumlah angkatan kerjanya. Indikator yang dapat menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan perekonomian adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK menunjukkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi berdasarkan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor demografis dan sosial ekonomi. Faktor tersebut antara lain seperti umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, tempat tinggal, pendapatan, dan agama. Pengaruh faktor-faktor tersebut berbeda-beda menurut jenis kelamin.

Pada TPAK laki-laki faktor-faktor tersebut tidak begitu besar, sebab pada umumnya laki-laki merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga, sehingga hampir semua laki-laki yang telah mencapai usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Pada TPAK perempuan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan

budaya. Hal ini berkaitan dengan fungsi pokok mereka untuk melaksanakan tugas rumah tangga, melahirkan dan membesarkan anak. Akibatnya TPAK wanita terlihat tidak begitu dominan bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki dan secara keseluruhan sangat berbeda jika dilihat dari kelompok umur. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan hasil perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mencari kerja dengan total penduduk usia 15 tahun keatas.

TPAK merepresentasikan persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK Kota Cirebon tahun 2025 adalah 69,02 persen atau naik sekitar 0,47 persen dibanding tahun lalu.

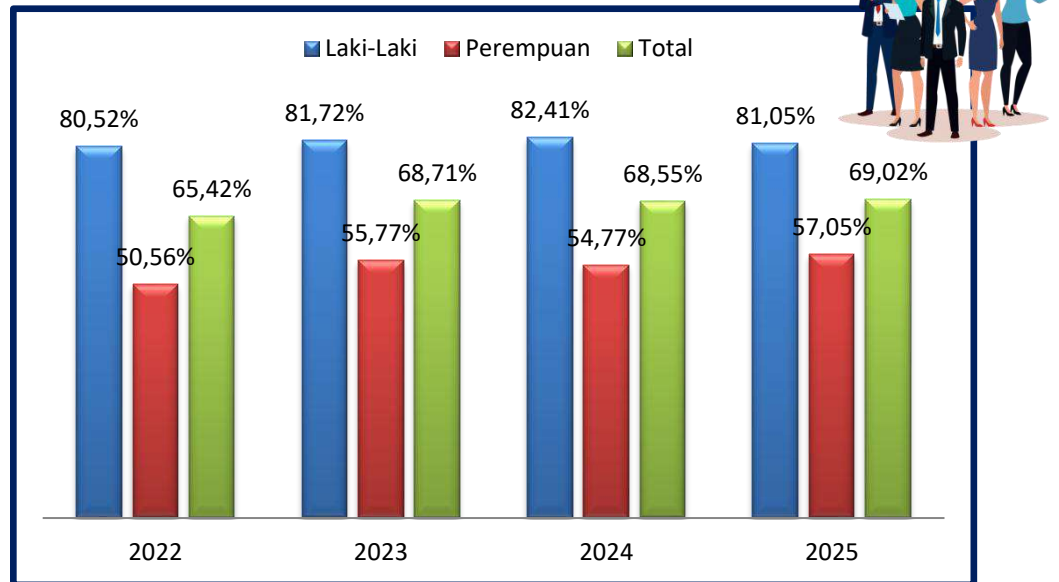
TPAK di Kota Cirebon Tahun 2025 laki-laki adalah 81,05 persen dan angka untuk perempuan 57,05 persen. Angka tersebut menunjukkan keterlibatan penduduk perempuan usia 15 tahun keatas dalam kegiatan ekonomi berdasarkan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan 57,05 persen.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa TPAK menjadi penting:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Tingkat partisipasi angkatan kerja berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin banyak orang yang terlibat dalam tenaga kerja, semakin banyak sumber daya manusia yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, serta memberikan kontribusi kepada perekonomian melalui pembayaran pajak.
2. **Produktivitas:** Dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja, potensi produktivitas ekonomi dapat ditingkatkan. Lebih banyak tenaga kerja aktif berarti lebih banyak potensi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan.
3. **Stabilitas Sosial:** TPAK yang tinggi dapat membantu menjaga stabilitas sosial dalam suatu negara. Ketika lebih banyak orang memiliki pekerjaan yang layak, ada peluang ekonomi yang lebih baik, dan tingkat kemiskinan dapat ditekan. Hal ini dapat mengurangi ketidakpuasan sosial, mengurangi ketegangan, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik sosial.
4. **Kesejahteraan Masyarakat:** Partisipasi angkatan kerja yang tinggi berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika orang-orang memiliki kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, mereka dapat memenuhi

kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup individu dan mengurangi kesenjangan sosial.

Gambar 7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2022-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

7.3 Tingkat Pengangguran

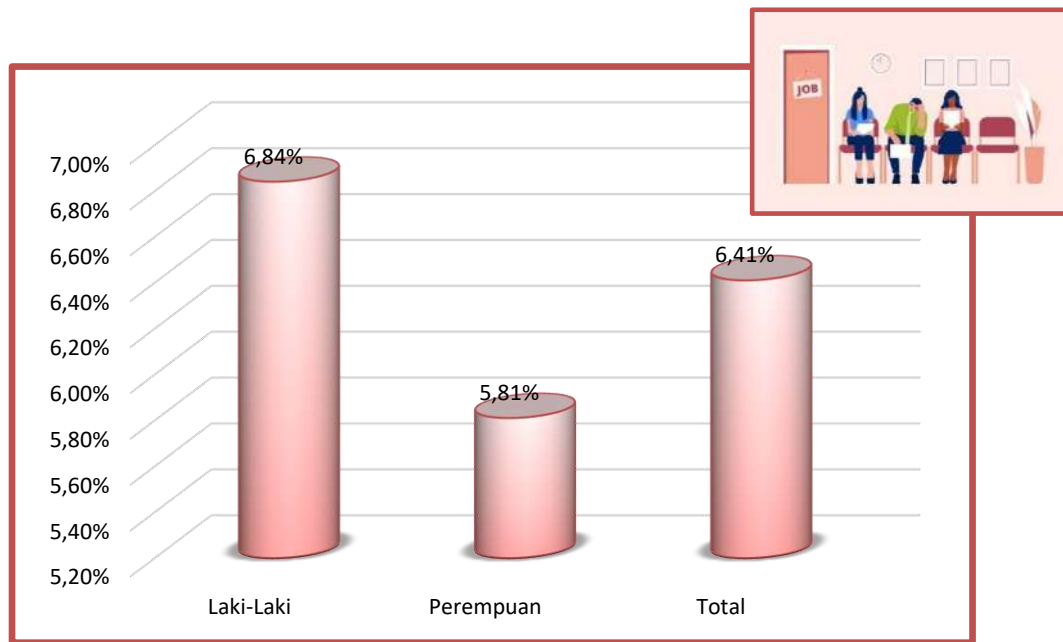
Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Permasalahan tersebut terkait erat dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi yang dipicu oleh tingkat kelahiran atau fertilitas sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung hal tersebut. Untuk mengatasi permasalahan itu pemerintah telah berusaha untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran di masa yang akan datang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data mengenai tingkat pengangguran memiliki alasan penting, diantaranya:

1. Indikator Kesehatan Ekonomi: Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Data ini

- memberikan gambaran tentang jumlah orang yang aktif mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkannya. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan masalah dalam perekonomian, seperti perlambatan pertumbuhan atau ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.
2. Kebijakan Ketenagakerjaan: Data tingkat pengangguran terbuka memberikan informasi penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan ketenagakerjaan dalam merancang kebijakan yang efektif. Dengan memahami tingkat pengangguran dan karakteristik populasi penganggur, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok yang rentan dan mengembangkan strategi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mengatasi masalah ketenagakerjaan, seperti pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, atau reformasi kebijakan.
 3. Perencanaan Karier dan Pendidikan: Data tingkat pengangguran terbuka dapat membantu individu dalam merencanakan karier dan pendidikan mereka. Dengan mengetahui tingkat pengangguran di berbagai sektor atau industri, individu dapat membuat keputusan yang lebih informan tentang pilihan karier dan pendidikan yang mereka pilih. Mereka dapat mencari bidang yang memiliki peluang kerja yang baik dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.
 4. Evaluasi Kebijakan Pemerintah: Data tingkat pengangguran terbuka juga penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Pemerintah dapat menggunakan data ini untuk memantau hasil kebijakan yang telah diterapkan, menilai dampaknya terhadap tingkat pengangguran, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Data ini dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan atau kegagalan strategi yang diterapkan dan membantu pemerintah mengarahkan upaya mereka dengan lebih baik.

Gambar 7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cirebon, 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

TPT Kota Cirebon pada tahun 2025 sebesar 6,84 persen laki-laki dan 5,81 persen perempuan dengan total TPT (laki-laki dan perempuan) sebesar 6,41 persen terhadap angkatan kerja.

7.4 Lapangan Usaha

Data lapangan usaha dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam pengembangan ekonomi regional. Data ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan ekonomi lokal, membantu merencanakan pembangunan yang berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Adanya data lapangan usaha memberi manfaat untuk:

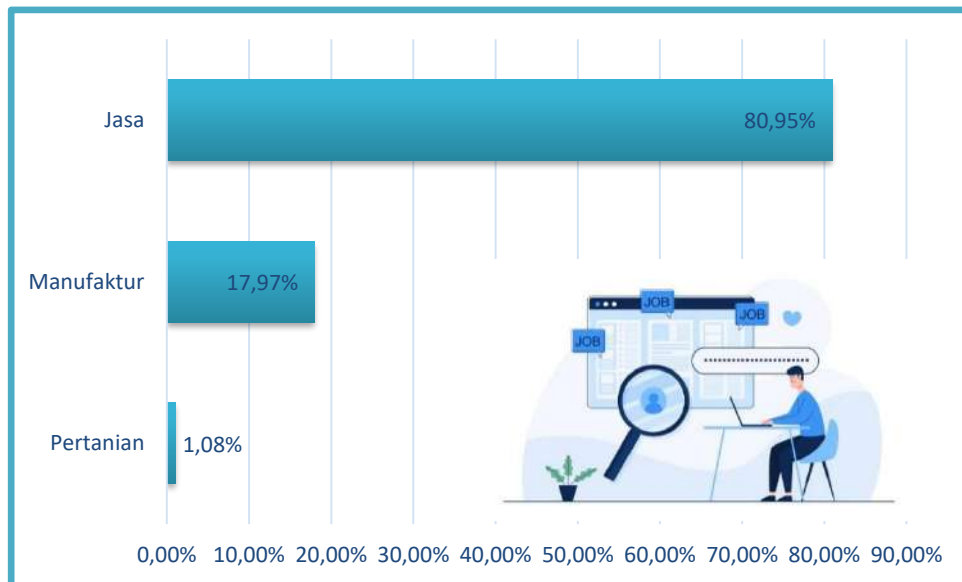
1. Identifikasi Potensi Ekonomi: Data lapangan usaha memungkinkan kita untuk mengidentifikasi potensi ekonomi suatu daerah. Informasi tentang jenis-jenis industri yang ada dan seberapa besar kontribusinya terhadap perekonomian daerah dapat membantu dalam merencanakan pengembangan ekonomi lokal. Data ini dapat memberikan wawasan tentang sektor-sektor yang sedang berkembang atau menonjol, serta peluang untuk diversifikasi ekonomi.

2. Perencanaan Pembangunan Regional: Dengan mengetahui data lapangan usaha, pemerintah daerah dapat merencanakan pembangunan regional dengan lebih baik. Data ini membantu dalam menentukan sektor-sektor yang perlu mendapat perhatian dan dukungan lebih lanjut. Misalnya, jika sektor manufaktur tumbuh pesat, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan kebijakan penarikan investasi untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut.
3. Penciptaan Lapangan Kerja: Data lapangan usaha membantu dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan mengetahui jenis pekerjaan yang paling dibutuhkan dan sektor-sektor yang mempekerjakan banyak orang, pemerintah dapat mengarahkan upaya mereka dalam menciptakan peluang kerja yang relevan. Hal ini berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Evaluasi Kebijakan Ekonomi: Data lapangan usaha juga penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi yang telah diterapkan. Dengan memantau perkembangan sektor-sektor usaha, pemerintah dapat menilai dampak kebijakan yang telah diimplementasikan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Data ini dapat membantu dalam menilai keberhasilan strategi pembangunan ekonomi dan membuat keputusan yang lebih informan dalam perencanaan kebijakan di masa depan.
5. Investasi dan Pengembangan Bisnis: Data lapangan usaha juga penting bagi investor dan pengusaha yang tertarik untuk berinvestasi atau mengembangkan bisnis di suatu daerah. Informasi tentang kondisi bisnis, pasar potensial, dan kegiatan ekonomi dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas. Data ini dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang bisnis yang menjanjikan dan mengurangi risiko investasi.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon tahun 2025, lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Jasa yaitu sebesar 80,95 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan tahun 2024.

Berbeda dengan kategori Jasa dibandingkan tahun 2024, lapangan pekerjaan Pertanian dan Manufaktur justru mengalami penurunan. Lapangan Usaha kategori Pertanian mengalami penurunan menjadi 1,08 persen. Sedangkan Lapangan Usaha kategori Manufaktur mengalami penurunan menjadi 17,97 persen.

Gambar 7.3 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2025



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, 2025

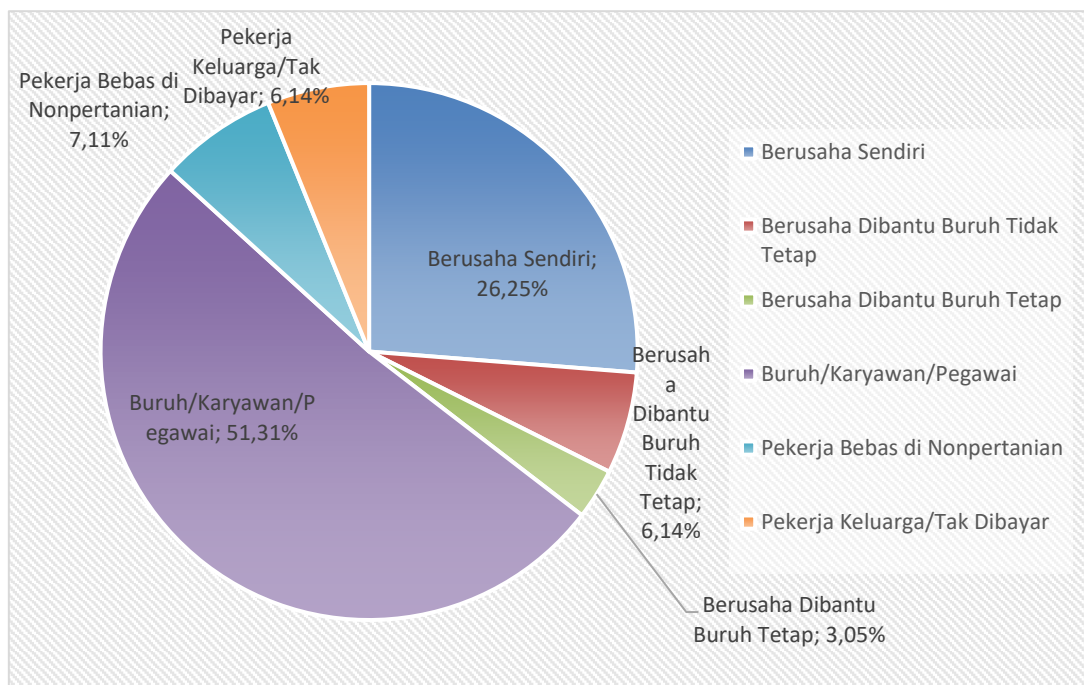
7.5 Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan disuatu unit usaha/kegiatan. Data status pekerjaan utama pada suatu daerah memiliki kepentingan yang signifikan dalam memahami struktur pekerjaan dan kondisi ekonomi di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa data status pekerjaan utama penting:

1. Pemetaan Struktur Pekerjaan: Data status pekerjaan utama membantu dalam pemetaan struktur pekerjaan di suatu daerah. Ini mencakup informasi tentang jumlah pekerja yang terlibat dalam sektor formal, sektor informal, sektor publik, atau sektor swasta.
2. Pengukuran Produktivitas Ekonomi: Data status pekerjaan utama juga membantu dalam mengukur produktivitas ekonomi di suatu daerah.
3. Analisis Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Data status pekerjaan utama juga membantu dalam analisis ketimpangan sosial dan ekonomi di suatu daerah.

4. Perencanaan Pelatihan dan Pendidikan: Data status pekerjaan utama membantu dalam perencanaan program pelatihan dan pendidikan di suatu daerah.
5. Evaluasi Kebijakan Ketenagakerjaan: Data status pekerjaan utama memungkinkan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan yang ada. Pemerintah dapat menganalisis dampak kebijakan yang telah diterapkan terhadap jenis pekerjaan yang dominan di daerah tersebut. Jika ada kebijakan yang tidak efektif atau memerlukan perbaikan, data ini memberikan dasar untuk penyesuaian kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

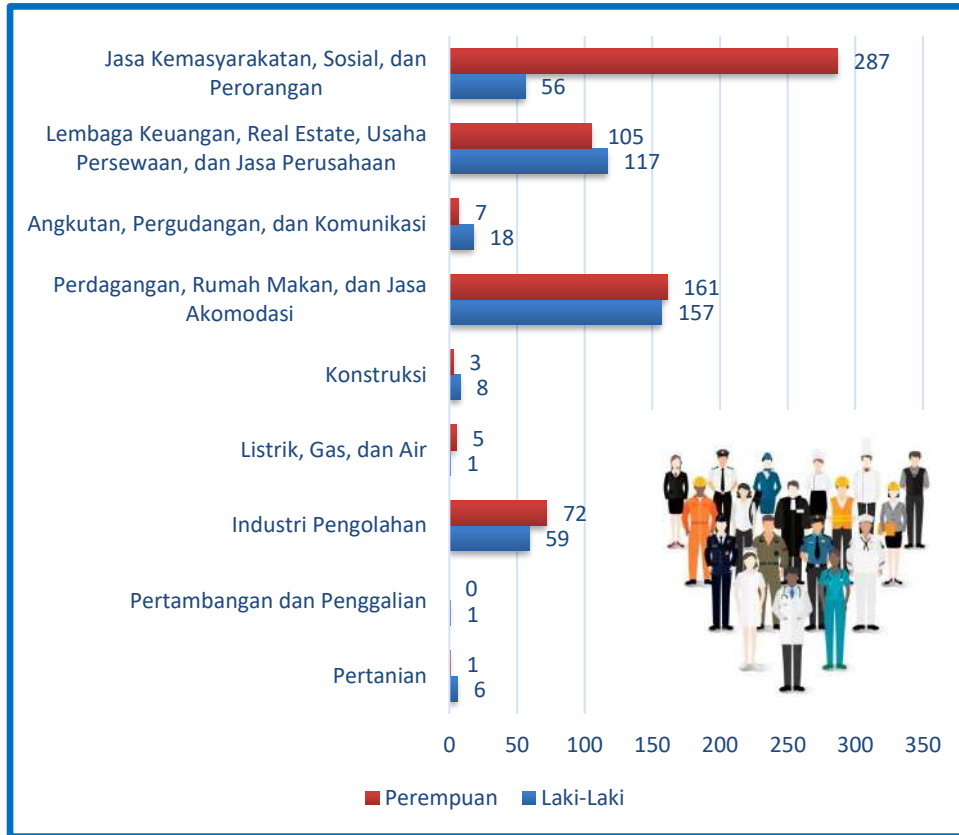
Gambar 7.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2025



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, 2025

Berdasarkan Tabel 7.4 sebagian besar atau sekitar 51,31 persen penduduk Kota Cirebon berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Kemudian berstatus berusaha sendiri sebesar 26,25 persen. Sedangkan persentase dengan status pekerjaan terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap.

Gambar 7.5 Pemenuhan Lowongan Permintaan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2025



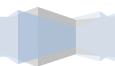
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, 2025

Data pemenuhan lowongan permintaan tenaga kerja/*job vacancy* merupakan informasi yang penting untuk memahami hubungan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di suatu daerah. Diantaranya adalah untuk melakukan analisis kebutuhan pasar kerja. Informasi ini memberikan gambaran tentang sektor-sektor yang mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja, serta jenis pekerjaan yang paling dicari. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pasar kerja, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengarahkan upaya pelatihan dan pendidikan ke bidang-bidang yang diinginkan oleh pasar kerja.

Di Kota Cirebon, pemenuhan lowongan permintaan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha terbesar berada di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 32,24 persen, kemudian perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi sebesar 29,89 persen. Sedangkan terkecil berada di sektor pertambangan dan penggalian serta



sektor listrik, gas dan air. Jika dilihat menurut jenis kelamin pemenuhan lowongan permintaan tenaga kerja didominasi oleh perempuan, yaitu 39,76 persen laki-laki dan 60,24 persen perempuan. Hal ini menunjukkan sudah adanya kesetaraan di bidang gender dalam pemenuhan lowongan tenaga kerja di Kota Cirebon.



DATA GENDER BIDANG EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN



EKONOMI

Banyaknya pencari kerja didominasi oleh penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan SLTA Kejuruan/SMK sebanyak 1.149 orang atau sekitar 49,59 persen dari jumlah tersebut perempuan memiliki kontribusi sebesar 47,43 persen

Perempuan yang ditempatkan dalam pemenuhan tenaga kerja sebanyak 60,24 persen. Pemenuhan tenaga kerja perempuan tersebut terbanyak pada lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 32,24 persen

PEMBERDAYAAN

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cirebon tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,11 poin. Kenaikan IDG mengindikasikan terjadinya kenaikan kesetaraan gender di suatu daerah

Kenaikan IDG di Kota Cirebon tahun 2024 terjadi pada komponen keterlibatan perempuan di parlemen

BAB VIII

DATA GENDER

BIDANG EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN

Dalam era otonomi daerah saat ini data pada indikator ekonomi memberikan peranan yang besar dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkeadilan gender. Dengan mengetahui indikator tersebut, suatu daerah diharapkan dapat diketahui besarnya potensi penduduk (baik laki-laki maupun perempuan) yang dapat aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat diperkirakan *output* yang dihasilkan.

8.1. Pencari Kerja dan Pemenuhan Lowongan Pekerjaan

Data pencari kerja dan pemenuhan lowongan memiliki peran penting dalam ekonomi dan masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keduanya sangat penting:

1. Menghubungkan pencari kerja dengan lowongan yang sesuai: Data pencari kerja membantu dalam mengidentifikasi keterampilan, kualifikasi, dan preferensi pekerjaan dari individu yang mencari pekerjaan. Dengan informasi ini, sistem dapat mencocokkan pencari kerja dengan lowongan yang sesuai, meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat.
2. Mengurangi pengangguran: Data tentang lowongan pekerjaan membantu dalam memahami permintaan tenaga kerja di berbagai sektor dan industri. Dengan memahami di mana ada kekurangan tenaga kerja, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan peluang pencari kerja. Informasi ini memungkinkan pemerintah, organisasi, dan lembaga terkait lainnya untuk merancang kebijakan, program pelatihan, dan inisiatif lainnya untuk mengurangi tingkat pengangguran.
3. Peningkatan efisiensi perekrutan: Data pencari kerja dan lowongan dapat membantu meningkatkan efisiensi proses perekrutan. Dengan memiliki akses ke informasi yang komprehensif tentang pencari kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, perusahaan dapat mengoptimalkan proses perekrutan mereka. Hal ini membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencocokkan kandidat dengan



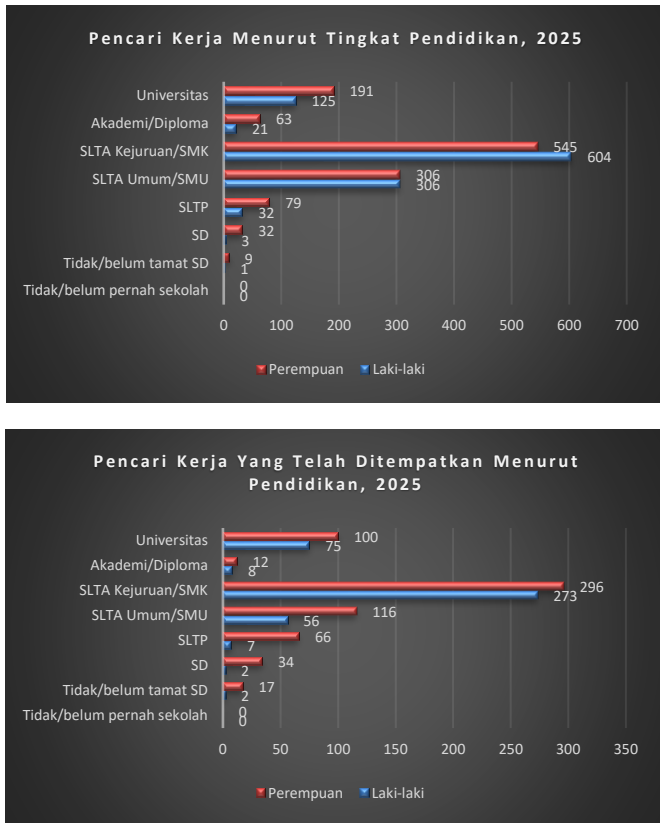
pekerjaan yang tepat, sehingga mengurangi biaya yang terkait dengan pengangguran dan kesenjangan pekerjaan.

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi: Data tentang pemenuhan lowongan dapat memberikan wawasan tentang kesehatan ekonomi suatu negara atau daerah. Dengan memahami sejauh mana pasar tenaga kerja terpenuhi, pemerintah dan pengambil kebijakan dapat mengidentifikasi sektor yang berkembang atau mengalami kesulitan. Informasi ini memungkinkan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan dan program yang relevan.
5. Pengembangan karir yang lebih baik: Data pencari kerja dapat memberikan wawasan tentang tren karier, persyaratan kualifikasi, dan pasar pekerjaan. Informasi ini memungkinkan pencari kerja untuk mengambil keputusan yang lebih baik tentang peluang karier yang tersedia, pengembangan keterampilan yang diperlukan, dan jalur yang dapat diikuti untuk mencapai tujuan mereka. Dengan akses ke informasi yang akurat, pencari kerja dapat merencanakan dan mengelola karier mereka dengan lebih efektif.

Dalam rangka memanfaatkan potensi penuh data pencari kerja dan pemenuhan lowongan, penting bagi pemerintah, organisasi, dan lembaga terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan data tersebut secara efisien. Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dapat terjadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesesuaian.

Pada Gambar 8.1 menunjukkan banyaknya pencari kerja didominasi oleh penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan SLTA Kejuruan/SMK sebanyak 1.149 orang atau sekitar 49,59 persen dari jumlah tersebut perempuan memiliki kontribusi sebesar 47,43 persen. Sedangkan secara total pencari kerja di Kota Cirebon perempuan sebanyak 1.225 orang atau sekitar 52,87 persen dari total 2.317 orang yang tercatat mencari kerja. Dan bila dibandingkan perempuan yang ditempatkan dalam pemenuhan tenaga kerja sebanyak 60,24 persen. Pemenuhan tenaga kerja perempuan tersebut terbanyak pada lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 32,24 persen.

Gambar 8.1 Pencari Kerja dan Pemenuhan Lowongan Pekerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2025



Pencari kerja didominasi oleh penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan SLTA Kejuruan/SMK sebanyak 1.149 orang atau sekitar 49,59 persen. Dari jumlah tersebut perempuan memiliki kontribusi sebesar 47,43 persen. Sedangkan pencari kerja yang ditempatkan juga didominasi tamatan SLTA Kejuruan/SMK sebesar 53,48 persen. Dari jumlah tersebut kontribusi perempuan sebesar 52,02 persen. Hal ini mengindikasikan kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dibidang pencari kerja dan penempatan kerja sudah baik.

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, 2025

Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi adalah prinsip yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki dalam hal ekonomi. Ini menghilangkan ketidakadilan, diskriminasi, dan kesenjangan gender yang terjadi dalam kesempatan kerja, akses ke sumber daya ekonomi, gaji, dan mobilitas karir. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir dalam mencapai kesetaraan gender dalam bidang ekonomi, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Beberapa masalah yang masih ada termasuk:

1. Kesenjangan Gaji: Perempuan masih mendapatkan rata-rata upah yang lebih rendah daripada laki-laki dalam banyak sektor. Kesetaraan upah adalah elemen penting dalam mencapai kesetaraan gender di tempat kerja.



2. Akses ke Posisi Pimpinan: Perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam mencapai posisi pimpinan atau kepemimpinan dalam organisasi. Terdapat kurangnya perwakilan perempuan di tingkat manajemen tertinggi dan dewan direksi perusahaan.
3. Ketidakseimbangan Pekerjaan dan Kehidupan Pribadi: Perempuan sering menghadapi beban ganda antara tanggung jawab karier dan keluarga. Kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi dapat membantu mendorong kesetaraan gender dalam bidang ekonomi.
4. Kewirausahaan Perempuan: Meskipun ada peningkatan jumlah wirausaha perempuan di seluruh dunia, perempuan masih menghadapi tantangan dalam memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Dukungan yang lebih besar untuk kewirausahaan perempuan dapat membantu mengurangi kesenjangan gender di bidang ini.

Untuk mencapai kesetaraan gender dalam bidang ekonomi, diperlukan langkah-langkah seperti kebijakan yang mendukung kesetaraan upah, kesempatan pendidikan yang setara, perlindungan hukum terhadap diskriminasi gender di tempat kerja, penghapusan bias gender, serta dukungan untuk pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi perempuan. Penting juga untuk melibatkan pria sebagai sekutu dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi.

8.2 Upah Rata-Rata Pekerja Per Bulan Menurut Jenis Kelamin

Upah rata-rata pekerja per bulan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada Gambar 8.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2025 upah rata-rata perempuan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2024. Upah rata-rata perempuan pada periode 2023-2025 selalu lebih rendah dari upah rata-rata yang diterima oleh laki-laki.

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan upah perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, yaitu:

1. Diskriminasi Gaji: Diskriminasi langsung atau tidak langsung terhadap perempuan dalam penetapan gaji masih menjadi masalah. Perempuan seringkali dibayar lebih rendah meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama dengan laki-laki dalam posisi yang serupa.

2. Pekerjaan yang Didominasi Perempuan: Beberapa sektor atau jenis pekerjaan yang didominasi oleh perempuan, seperti pekerjaan di sektor layanan, cenderung memiliki upah yang lebih rendah secara keseluruhan dibandingkan dengan pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki.
3. Posisi Pimpinan dan Mobilitas Karier: Perempuan sering menghadapi kesulitan dalam mencapai posisi pimpinan atau kemajuan karier yang setara dengan laki-laki. Ini bisa disebabkan oleh bias gender, kurangnya dukungan, atau kesulitan memadukan tanggung jawab keluarga dengan tuntutan karier.
4. Perbedaan Pendidikan dan Keterampilan: Meskipun perempuan telah membuat kemajuan signifikan dalam akses pendidikan, masih ada perbedaan dalam pilihan bidang studi dan keterlibatan dalam industri tertentu. Beberapa sektor yang lebih teknis atau berorientasi keuangan sering kali memiliki gaji yang lebih tinggi, dan perempuan mungkin kurang terwakili di bidang ini.
5. Faktor Keluarga dan Peran Rumah Tangga: Tanggung jawab perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibagikan secara adil antara laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi kesempatan karier perempuan dan waktu yang dapat mereka habiskan untuk pekerjaan yang dibayar.

Gambar 8.2 Upah Rata-Rata Pekerja Per Bulan Menurut Jenis Kelamin, 2023-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

8.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pemberdayaan gender dalam suatu negara atau wilayah tertentu. IDG menyediakan gambaran tentang kesetaraan gender dalam beberapa dimensi utama, termasuk partisipasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kekuasaan politik.

IDG dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme/UNDP*) dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995. Tujuan utama IDG adalah untuk menganalisis dan membandingkan kemajuan dalam pemberdayaan gender antara negara-negara, mengidentifikasi kesenjangan yang ada, dan mendorong tindakan perbaikan.

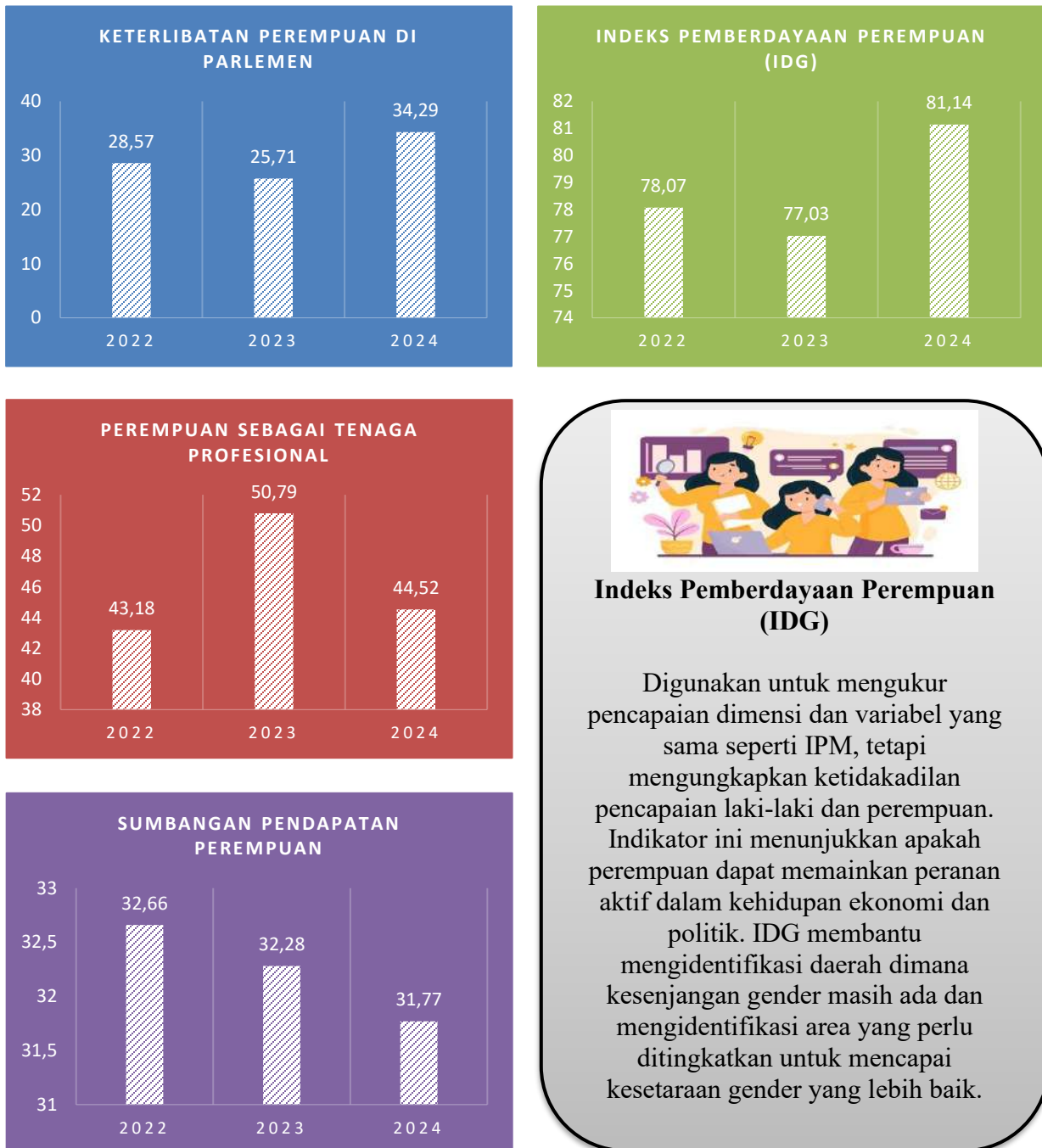
IDG menggabungkan beberapa indikator yang relevan untuk kesetaraan gender, seperti proporsi perempuan dan laki-laki dalam tenaga kerja terampil, rasio partisipasi sekolah, harapan hidup perempuan dan laki-laki, serta perwakilan perempuan dalam posisi kekuasaan politik. Indeks ini menghasilkan skor yang menunjukkan tingkat kesetaraan gender, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pemberdayaan gender yang lebih baik.

IDG membantu mengidentifikasi daerah dimana kesenjangan gender masih ada dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Ini memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk merancang dan melaksanakan tindakan yang bertujuan memperbaiki kondisi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Namun, perlu diingat bahwa IDG adalah alat pengukuran agregat yang mendasarkan pada data yang tersedia dan dapat memiliki keterbatasan dalam mencakup semua aspek pemberdayaan gender. Oleh karena itu, penting untuk melengkapi IDG dengan penilaian yang lebih terperinci dan kontekstual untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kondisi kesetaraan gender di suatu wilayah atau negara.

IDG Kota Cirebon tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,11 poin. Kenaikan IDG mengindikasikan terjadinya kenaikan kesetaraan gender suatu daerah. Kenaikan IDG di Kota Cirebon tahun 2024 terjadi pada komponen keterlibatan perempuan di parlemen.

Gambar 8.3 Indeks Pemberdayaan Perempuan di Kota Cirebon, 2022 - 2024



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025



DATA GENDER BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA



Jumlah perceraian yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cirebon tahun 2025 adalah sebanyak 737 kasus, dengan rincian cerai talak sebanyak 153 kasus dan cerai gugat sebanyak 584 kasus



Sepanjang tahun 2025 jumlah pemohon dispensasi menikah ke Pengadilan Agama Cirebon sebesar 100 persen perempuan dengan alasan dispensasi menikah 100 persen karena usia pemohon < 18 tahun



Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan didominasi oleh laki-laki sebesar 0,60 persen dari total penduduk laki-laki dan 0,08 persen untuk perempuan dari total penduduk perempuan di Kota Cirebon

BAB IX

DATA GENDER

BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

9.1 Gender Bidang Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Hukum sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan, lingkungan, peraturan atau tindakan militer.

Banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan agama berhubungan dengan aspek gender. Perkara tersebut antara lain ijin poligami, cerai talak, cerai gugat, isbat nikah dan lainnya. Terkait dengan perceraian, penyebab terbanyak kasus perceraian disebabkan karena faktor tanggung jawab. Umumnya yang dikatakan tidak bertanggung jawab itu adalah dari pihak laki-laki yaitu tidak memberikan nafkah lahir, batin atau keduanya. Namun tidak menutup kemungkinan yang tidak bertanggung jawab adalah dari pihak perempuan, misalnya dengan meninggalkan suami untuk tinggal bersama orang tuanya. Penyebab perceraian karena tidak tanggung jawab bisa dikaitkan dengan penyebab ekonomi. Tinggi rendahnya pendapatan keluarga ditentukan oleh jumlah yang bekerja dan jenis pekerjaan. Karena laki-laki dan perempuan semua berhak terjun ke dunia publik, maka jika perempuan juga bekerja kemungkinan terjadi perceraian akibat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah lahir dapat diminimalkan.

Ketersediaan data perceraian merupakan hal yang penting dalam konteks analisis kebijakan, dan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan dan perceraian. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya ketersediaan data perceraian:

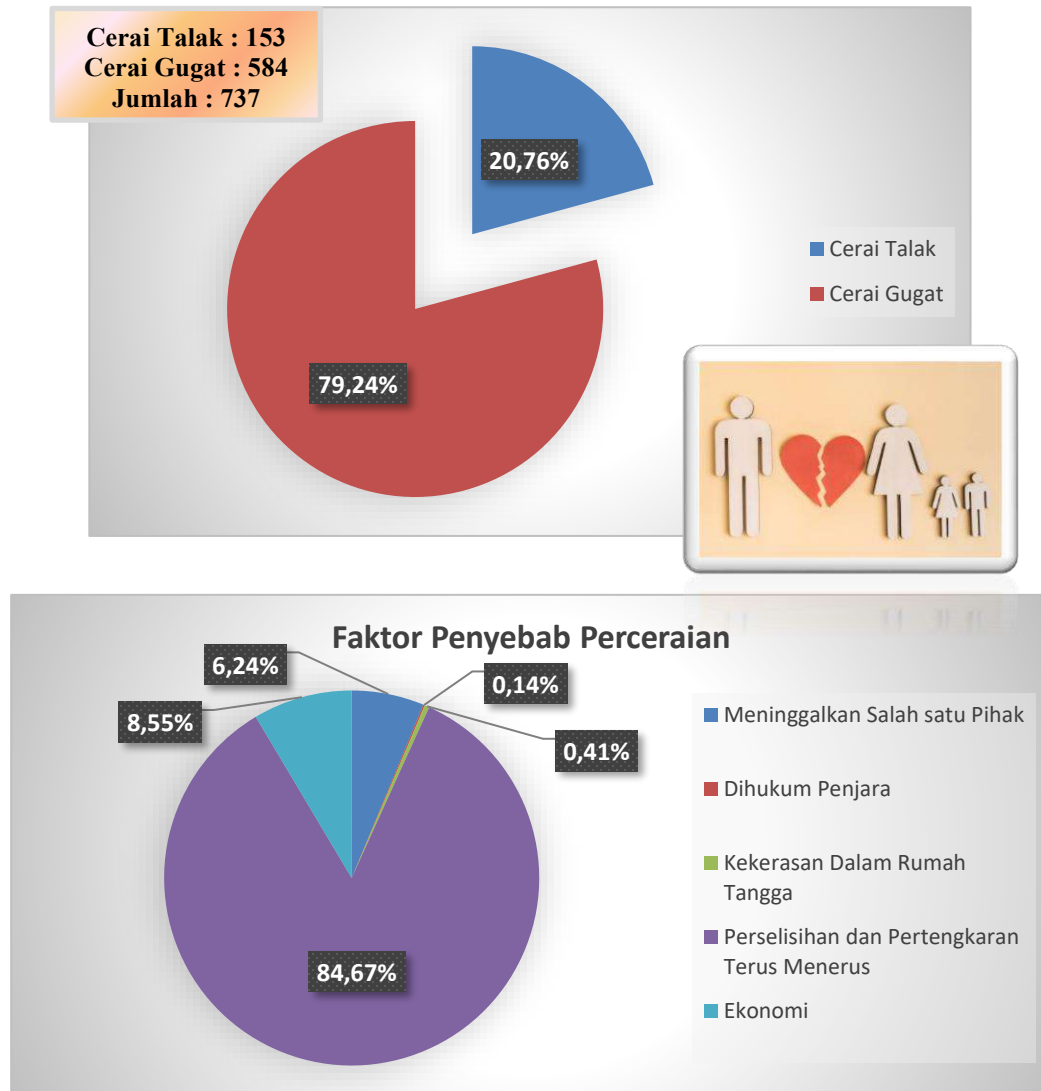


1. Penelitian dan analisis kebijakan: Data perceraian dapat memberikan wawasan yang berharga bagi penelitian dan analisis kebijakan dalam berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dengan menggunakan data perceraian, para peneliti dan pembuat kebijakan dapat memahami tren perceraian, dampak sosial dan ekonomi dari perceraian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan perkawinan. Informasi ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung keluarga dan meminimalkan risiko perceraian.
2. Pemahaman sosial dan budaya: Data perceraian membantu dalam memahami dinamika sosial dan budaya di suatu masyarakat. Melalui analisis data perceraian, kita dapat melihat perubahan tren perkawinan dan perceraian dari waktu ke waktu, pola perceraian di berbagai kelompok sosial, dan faktor-faktor yang berperan dalam keputusan untuk bercerai. Ini dapat memberikan wawasan tentang perubahan nilai-nilai sosial, peran gender, dan dinamika keluarga di masyarakat.
3. Pelayanan dan dukungan: Ketersediaan data perceraian penting untuk menginformasikan penyediaan pelayanan dan dukungan bagi individu dan keluarga yang mengalami perceraian. Data ini dapat membantu pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan lembaga masyarakat lainnya untuk merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, berdasarkan data perceraian, pemerintah dapat mengembangkan program konseling, mediasi, atau dukungan hukum bagi pasangan yang menghadapi masalah perkawinan.
4. Perencanaan keluarga dan kebijakan demografi: Data perceraian juga penting dalam perencanaan keluarga dan kebijakan demografi. Informasi tentang angka perceraian, usia saat bercerai, dan jumlah anak dalam keluarga yang bercerai dapat membantu dalam perencanaan populasi, peramalan pertumbuhan penduduk, dan alokasi sumber daya yang tepat. Data ini juga dapat digunakan dalam merancang program-program pendidikan, dukungan sosial, dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga yang bercerai.

Dalam rangka memastikan ketersediaan data perceraian yang akurat, penting bagi pemerintah dan lembaga statistik untuk mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan data dengan baik. Hal ini akan mendukung penelitian yang berkualitas, pengambilan

keputusan kebijakan yang tepat, serta pemberian pelayanan dan dukungan yang efektif bagi individu dan keluarga yang terkena dampak perceraian.

Gambar 9.1 Persentase Data Perceraian di Kota Cirebon, 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pada Gambar 9.1 menjelaskan bahwa persentase jenis perceraian yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B, lebih didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri sebesar 79,24 persen, sedangkan untuk cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebesar 20,76 persen. Untuk faktor penyebab perceraian paling banyak disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebesar 84,67 persen serta faktor ekonomi sebesar 8,55 persen.

Gambar 9.2 Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah di Kota Cirebon, 2025



Sumber : Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B, 2025

Dispensasi nikah adalah proses di mana seseorang diberikan izin khusus untuk menikah meskipun tidak memenuhi persyaratan hukum yang biasanya diperlukan untuk pernikahan. Dispensasi ini diberikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah pengadilan agama untuk mengeluarkan izin khusus dalam situasi-situasi tertentu, misalnya: dispensasi usia, dispensasi kekerabatan, dispensasi agama campuran dan dispensasi hukum atau administrasi. Berdasarkan Gambar 9.2 menunjukkan sepanjang tahun 2025 jumlah pemohon dispensasi menikah ke Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B sebesar 100 persen perempuan. Alasan dispensasi menikah 100 persen karena usia pemohon < 18 tahun.

9.2 Gender Bidang Sosial Budaya

Gender dalam bidang sosial budaya merujuk pada peran, perilaku, dan identitas yang diatribusikan kepada individu berdasarkan konstruksi sosial dan budaya terkait dengan jenis kelamin. Konsep gender melampaui perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan mencakup sejumlah besar variasi dan kompleksitas dalam cara individu mengidentifikasi diri mereka sendiri dan berinteraksi dengan masyarakat.



Pemahaman gender dalam konteks sosial budaya mempertimbangkan bahwa konstruksi sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi, ekspresi, dan pengalaman individu tentang diri mereka sendiri. Sebagai hasilnya, setiap masyarakat memiliki sistem gender yang unik dengan norma, nilai, dan ekspektasi yang berbeda tergantung pada konteks budaya, agama, dan tradisi.

Peran gender dalam budaya dan masyarakat bisa sangat bervariasi. Misalnya, di beberapa masyarakat, peran laki-laki mungkin dilihat sebagai yang dominan dalam hal kepemimpinan politik dan ekonomi, sementara perempuan mungkin lebih dihubungkan dengan peran perawatan dan rumah tangga. Namun, peran-peran ini tidak bersifat universal, dan tidak ada satu cara yang benar untuk mengartikan atau mengungkapkan gender.

Selain itu, gender juga melibatkan ekspresi gender, yang mencakup cara individu menyampaikan identitas gender mereka melalui pakaian, gaya rambut, cara berbicara, atau perilaku lainnya. Ekspresi gender juga bervariasi secara signifikan di seluruh budaya dan norma-norma sosial. Budaya dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang merasa bebas untuk mengungkapkan diri mereka sesuai dengan identitas gender mereka.

Pemahaman gender dalam bidang sosial budaya menekankan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang kompleks dan beragam. Peran, identitas, dan ekspresi gender dapat berubah serta berevolusi seiring waktu dan konteks budaya. Masyarakat yang inklusif dan beragam sering kali bekerja untuk mengakui dan menghargai keberagaman gender serta mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan berdasarkan gender.

Selain itu, data kejahatan yang disegmentasi berdasarkan gender membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren kejahatan yang spesifik terhadap gender tertentu. Misalnya, wanita mungkin lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan pelecehan dibandingkan pria. Pada tahun 2024 di Kota Cirebon persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan,

pelecehan seksual didominasi oleh laki-laki sebanyak 0,60 persen dari total penduduk laki-laki dan 0,08 persen untuk perempuan dari total penduduk perempuan di Kota Cirebon.

Gambar 9.3 Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

DATA GENDER DI SEKTOR PUBLIK

Di Kota Cirebon kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, hanya saja apabila dibandingkan dengan laki-laki, keterlibatan perempuan lebih rendah, sebanyak 12 orang (34,29 persen) perempuan yang duduk di legislatif dibandingkan laki-laki 23 orang (65,71 persen)

Di Kota Cirebon kiprah perempuan dalam bidang pemerintahan, dari 7.280 orang jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada terdapat 3.762 perempuan atau 51,68 persen dan 3.518 laki-laki atau 48,32 persen. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan memberikan kontribusi paling besar terhadap persentase jumlah ASN perempuan di Kota Cirebon.



BAB X

DATA GENDER DI SEKTOR PUBLIK

Gender dalam sektor publik mengacu pada pemahaman, dan tindakan terkait kesetaraan gender dan integrasi perspektif gender dalam kebijakan, program, dan praktik pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan gender, mempromosikan keadilan sosial, dan mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin ada dalam sistem pemerintahan dan layanan publik.

Berikut ini adalah beberapa aspek tentang gender di sektor publik:

1. **Kebijakan dan Perencanaan:** Integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan perencanaan sektor publik penting untuk memastikan bahwa kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi dari semua kelompok gender dipertimbangkan secara adil dan setara. Ini melibatkan analisis gender yang cermat dalam merancang kebijakan dan mengidentifikasi dampaknya terhadap pria, wanita, dan kelompok gender lainnya.
2. **Pengambilan Keputusan:** Mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari pria dan wanita dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik adalah aspek penting dari pendekatan yang inklusif gender. Penting untuk mendorong kehadiran yang seimbang dan representasi gender yang adil dalam lembaga-lembaga pemerintahan, serta melibatkan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan yang berdampak pada isu-isu gender.
3. **Pembiayaan dan Anggaran:** Menerapkan perspektif gender dalam alokasi anggaran dan penggunaannya di sektor publik dapat membantu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara adil dan efektif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mencapai hasil yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengawasan anggaran yang seksama untuk memastikan adanya alokasi yang cukup bagi kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender.
4. **Layanan Publik:** Mengintegrasikan perspektif gender dalam desain dan penyediaan layanan publik penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua kelompok gender. Ini termasuk pelayanan kesehatan,

pendidikan, keamanan, transportasi, dan berbagai bidang layanan publik lainnya. Praktik terbaik adalah untuk mengakomodasi kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dari pria, wanita, dan kelompok gender lainnya dalam menyediakan layanan yang inklusif dan responsif secara gender.

5. **Monitoring dan Evaluasi:** Memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan dan program sektor publik terhadap kesetaraan gender adalah langkah penting dalam memastikan efektivitas dan kesuksesan upaya tersebut. Ini melibatkan pengumpulan data yang terpisah berdasarkan jenis kelamin, pemantauan indikator gender yang relevan, dan melakukan evaluasi secara seksama untuk memahami hasil dan dampak kebijakan serta program.
6. **Advokasi dan Kesadaran:** Promosi kesadaran gender dan advokasi untuk kesetaraan gender adalah bagian penting dari upaya di sektor publik.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG mengukur hal yang sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan yang pada prinsipnya IDG melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam politik, merupakan sebuah keharusan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara politis. Dikhawatirkan rendahnya keterlibatan perempuan di partai politik dan parlemen, berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan, karena kebijakan-kebijakan dibuat tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehingga perempuan hanya diposisikan sebagai objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahtraannya terabaikan.

Di Kota Cirebon kiprah perempuan dalam politik dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik, hanya saja apabila dibandingkan dengan laki-laki keterlibatan

perempuan lebih rendah.

Kondisi ini terkait dengan dominasi budaya patriarki yang masih kuat mempengaruhi dunia politik, termasuk iklim partai politik yang berbau maskulin. Dengan lebih banyak keterwakilan perempuan dilembaga legislatif, diharapkan akan mempengaruhi kebijakan yang lebih berpihak terhadap kebutuhan perempuan.

Selanjutnya ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif.

- 1) Berhubungan dengan konteks budaya yang masih sangat kental.
- 2) Berhubungan dengan proses seleksi partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai yang hampir semua laki-laki.
- 3) Berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen.
- 4) Tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.
- 5) Selain persoalan di atas kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan wanita, faktor-faktor keluarga sering mengalami hambatan khususnya persoalan izin dari pasangan mereka.

10.1. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut sehingga terwujud kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Di Kota Cirebon kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam

bidang politik, hanya saja apabila dibandingkan dengan laki laki, keterlibatan perempuan lebih rendah, sebanyak 12 orang (34,29 persen) perempuan yang duduk di legislatif dibandingkan laki-laki sebanyak 23 orang (65,71 persen).

Gambar 10.1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Jenis Kelamin di Kota Cirebon, 2025



Sumber : Sekretariat DPRD Kota Cirebon, 2025

Keberadaan perempuan di DPRD akan terlihat peranannya di komisi yang ada. Misalnya tugas Komisi I terkait Bidang Pemerintahan yang meliputi administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi, informatika, persandian dan statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, hukum dan HAM, pemberdayaan masyarakat, kepegawaian dan aparatur, serta sosial politik.

Komisi II mempunyai tugas di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, keuangan daerah, serta lingkungan hidup.

Sedangkan Komisi III terkait Bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, tenaga kerja, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kearsipan.

10.2. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena ASN sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah ASN yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas. ASN juga berperan sebagai pelayan dari pada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut. Saat ini, di Kota Cirebon terdapat 7.280 orang ASN yang akan melayani 359.150 penduduk Kota Cirebon.

Dari 7.280 orang jumlah ASN yang ada di Kota Cirebon terdapat 3.762 perempuan atau 51,68 persen dan 3.518 laki-laki atau 48,32 persen. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan memberikan kontribusi paling besar terhadap persentase jumlah ASN perempuan, hal ini sangat wajar karena tenaga kerja di kedua sektor tersebut peran perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki.

Tabel 10.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Dinas/Instansi Pemerintah, 2025

No	Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	22	46
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	13	31
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36	9	45
4	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	80	34	114
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	29	31	60
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24	20	44
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	21	39



No	Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Dinas Kesehatan	704	1.340	2.044
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	47	41	88
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	48	33	81
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	36	23	59
12	Dinas Lingkungan Hidup	222	58	280
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	146	31	177
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	240	28	268
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	31	45
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	23	13	36
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	16	36
18	Dinas Pendidikan	1.068	1.663	2.731
19	Dinas Perhubungan	80	17	97
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29	34	63
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	82	24	106
22	Dinas Sosial	21	24	45
23	Dinas Tenaga Kerja	25	7	32
24	Inspektorat Daerah	31	23	54
25	Kecamatan Harjamukti	84	30	114
26	Kecamatan Kejaksan	30	22	52
27	Kecamatan Kesambi	43	21	64
28	Kecamatan Lemahwungkuk	42	20	62
29	Kecamatan Pekalipan	39	17	56
30	Satuan Polisi Pamong Praja	65	9	74



No	Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	Sekretariat Daerah	107	64	171
32	Sekretariat DPRD	43	23	66
Total		3.518	3.762	7.280

Sumber : BKPSDM Kota Cirebon, 2025

Ketersediaan data ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan jenis kelamin merupakan hal penting dalam mengamati keberagaman dan kesetaraan gender di sektor publik. Diantaranya:

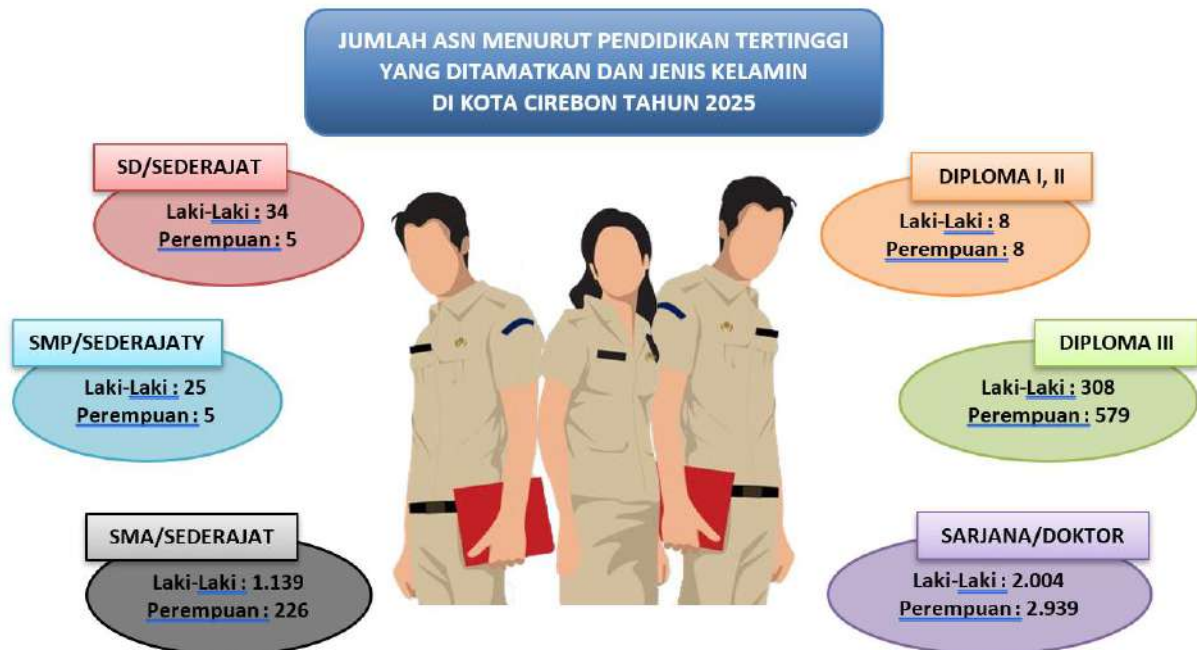
1. Pemantauan kesetaraan gender: Dengan memiliki data yang terperinci tentang jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin, pemerintah dan lembaga terkait dapat memantau tingkat kesetaraan gender dalam sektor publik. Data ini memungkinkan untuk mengidentifikasi ketimpangan gender yang mungkin terjadi, baik dalam hal jumlah ASN maupun dalam distribusi mereka di berbagai tingkatan atau jabatan.
2. Perencanaan kebijakan yang inklusif: Data ASN berdasarkan jenis kelamin membantu dalam perencanaan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang jelas tentang proporsi ASN laki-laki dan perempuan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendorong partisipasi aktif dan kesempatan yang adil bagi kedua jenis kelamin dalam sektor publik. Ini termasuk mengidentifikasi area di mana perempuan mungkin menghadapi hambatan atau diskriminasi, serta mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan tersebut.
3. Evaluasi dampak kebijakan: Ketersediaan data ASN berdasarkan jenis kelamin memungkinkan evaluasi dampak kebijakan yang telah dilaksanakan terkait kesetaraan gender. Dengan memantau perubahan dalam komposisi ASN dari waktu ke waktu, pemerintah dapat mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang ada dan menentukan apakah tindakan lebih lanjut diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.

4. Pengawasan publik: Ketersediaan data ASN berdasarkan jenis kelamin juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kepegawaian publik. Masyarakat dapat menggunakan informasi ini untuk melacak tingkat partisipasi dan representasi gender dalam sektor publik, serta memantau perkembangan dalam hal kesetaraan gender. Hal ini dapat mendorong pengawasan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesetaraan gender di dalam pemerintahan.

Pentingnya ketersediaan data ASN berdasarkan jenis kelamin adalah untuk memastikan bahwa kesetaraan gender diakui dan dipromosikan dalam sektor publik. Dengan memahami ketimpangan yang ada dan melalui tindakan yang tepat, pemerintah dapat mencapai lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi ASN, serta mendorong partisipasi aktif dari kedua jenis kelamin untuk membangun masyarakat yang lebih maju dan berkelanjutan.

Bila dilihat dari jenis pendidikan terdapat pendidikan terbanyak adalah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 67,90 persen, Diploma III/Sarjana Muda sebanyak 12,18 persen, Diploma I /II sebanyak 0,22 persen, SMA/ sederajat sebanyak 18,75 persen, SMP/ sederajat sebanyak 0,41 persen, dan SD/ sederajat sebanyak 0,54 persen.

Gambar 10.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Cirebon, 2025



Sumber : BKPSDM Kota Cirebon, 2025

PROFIL ANAK KOTA CIREBON

Kelembagaan

Kebijakan antar pemangku kepentingan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Hak Sipil dan Kebebasan

hak dasar anak untuk diakui identitasnya dan diberikan ruang berpartisipasi

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Menjamin hak anak mendapatkan pengasuhan yang aman dan nyaman

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

pemenuhan hak anak atas pendidikan berkualitas, pemanfaatan waktu luang yang aman, dan akses kegiatan budaya/kreativitas

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pemenuhan hak anak atas kesehatan fisik, mental, dan sosial

Perlindungan Khusus

Pencegahan, penyediaan layanan, dan penanganan kasus AMPK



BAB XI

PROFIL ANAK

11.1 Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Arti kata sipil adalah kelas yang melindungi hak-hak kebebasan individu dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan memastikan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa diskriminasi atau penindasan.

Hak-hak sipil yang ada di setiap negara dijamin secara konstitusional. Hak-hak sipil bervariasi di setiap negara karena perbedaan dalam demokrasi, namun demikian beberapa hak sipil universal yang sudah dipahami oleh kebanyakan orang seperti kebebasan berbicara, berpikir dan berekspresi, beragama serta pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Dalam materi muatan pada kluster hak sipil dan kebebasan dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat beberapa uraian tentang:

11.1.1 Akta Kelahiran

Akta kelahiran atau biasa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak. Akta lahir dapat mengacu kepada setiap catatan resmi berlandaskan undang-undang yang resmi menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak dan juga berlaku pada salinan lembaran pencatatan akta lahir yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dengan memiliki akta lahir dan memastikan data yang terkandung di dalamnya akurat sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan berbagai keperluan administratif. Sehingga data ini harus disimpan dengan aman dan dijaga kerahasiaannya karena mengandung informasi pribadi yang sensitif.

Tabel 11.1 Kepemilikan NIK dan Akta Kelahiran Anak di Kota Cirebon, 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk < 18 Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk < 18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Harjamukti	39.656	38.182
2	Kejaksan	14.652	14.069
3	Kesambi	22.534	21.723
4	Lemahwungkuk	17.504	16.617
5	Pekalipan	8.202	7.897
Total		102.548	98.488

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, 2025

11.1.2 Fasilitas Informasi Layak Anak

- Fasilitas informasi layak anak berupa fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut haruslah mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah.
- Fasilitas publik tersebut seperti sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain sebagainya. Seluruh fasilitas yang disyaratkan haruslah memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, diskriminasi dan rasialisme, pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak. Contoh konkretnya, bebasnya jalanan dari berbagai iklan rokok yang dapat menyesatkan persepsi anak.

Tabel 11.2 Lembaga Layanan Informasi Anak di Kota Cirebon, 2025

Jenis Lembaga Layanan Informasi Anak	Nama Lembaga Layanan Informasi Anak	Alamat Lembaga dan Nomor Kontak	Ketua	Jenis Produk (buku, KIE, aplikasi, dll)	Aktivitas lembaga layanan informasi anak	Jumlah Keanggotaan Anak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Layanan Masyarakat	Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Kota Cirebon bersama DKIS Kota Cirebon melaksanakan Program Literasi Digital di bulan Ramadhan melalui kegiatan Roadshow KOLAK CANDIL (Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan dengan Digital Literasi)	Jl. Brigjen Dharsono (Bypass) No. 1 Kota Cirebon	Bayu Purnama	KOLAK CANDIL (Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan dengan Digital Literasi)	Yayasan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Ichsan	30
					Yayasan/LKSA Al Falah	30
					Yayasan/LKSA Parahita	30
					Yayasan Darul Ulum	30
Pendidikan	Perpustakaan DISPUSIP Kota Cirebon	Jl. Brigjen Dharsono No. 11 Kota Cirebon	Gunawan, ATD, DEA	Buku dalam berbagai bentuk		5.194

Sumber : DKIS dan Dispusip Kota Cirebon, 2025

Tabel 11.3 Rekapitulasi Pemustaka Anak, 2025

Uraian	TK/SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengunjung Perpustakaan	4.544	1.166	1.721
Peminjam Buku	62	14	153
Anggota Baru	1	1	11
Pengguna Loker	18	3	18
Pengunjung Referensi	8	95	205
Jumlah	4.633	1.279	2.108
Jumlah TK/SD+SMP	5.912		
Jumlah TK/SD+SMP+SMA	8.020		

Sumber : Dispusip Kota Cirebon, 2025

Tabel 11.4 Jumlah Fasilitas Layanan Anak di Kota Cirebon, 2025

No	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Status Fasilitas	
			Pemerintah	Masyarakat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Form pendataan	1 dokumen	✓	
2	Mekanisme koordinasi	1 dokumen	✓	
3	Kelompok relawan peduli anak	270 orang	✓	✓
4	Shelter yang aman	1 posko	✓	
5	Tenda yang melindungi anak	30 unit	✓	
6	Toilet yang aman/sesuai usia anak	-	-	-
7	Makanan yang sesuai usia anak	33 dus	✓	
8	Pengisian waktu luang bagi anak	19 paket	✓	
9	Ketersediaan fasilitas belajar	16 paket	✓	
10	Layanan Psikososial /penguatan motivasi	19 paket	✓	
11	Pemenuhan kebutuhan spesifik anak	98 paket	✓	
12	Fasilitas belajar	16 paket	✓	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon, 2025

11.1.3 Forum Anak

Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak, yang di kelola oleh anak-anak berusia belum 18 tahun, bekerjasama dengan pemerintah, dan berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang terdiri dari kelompok-kelompok dan organisasi anak yang ada di suatu wilayah.

Forum Anak Nasional (FAN) adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum Anak dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal. Forum ini dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kota, provinsi hingga tingkat nasional.

Kegiatan Forum Anak Nasional tidak hanya merumuskan suatu deklarasi,

melainkan fokus pada peningkatan kapasitas anak di bidang penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, nasionalisme, patriotisme, serta pengembangan karakter bangsa (*nation character building*) yang di sampaikan dalam suasana bermain, partisipatif dan rekreatif berdasarkan tema-tema yang ditentukan. Forum Anak Nasional dapat dihadiri oleh seluruh anak Indonesia yang memiliki prestasi, menjadi pengurus provinsi, kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh pemerintah setempat.

Tabel 11.5 Kegiatan Forum Anak di Kota Cirebon Selama Tahun 2025

No	Deskripsi Kegiatan	Dokumentasi Kegiatan
1	Forum Anak Kota Cirebon berpartisipasi dalam peresmian Rumah Kasih Sayang dengan membantu mengkoordinasikan semua anak untuk pengecekan kesehatan dan menyuarakan tentang pentingnya isu stunting pada anak-anak serta memberi sedikit informasi mengenai stunting	
2	Forum Anak Kota Cirebon berpartisipasi dalam wawancara yang membahas tentang bentuk kekerasan seksual, persepsi sebagai anak dalam melihat isu kekerasan seksual, hingga diskusi terkait langkah-langkah pencegahan dan penanganan	
3	Forum Anak Kota Cirebon berpartisipasi dalam podcast yang membahas isu-isu penting seputar anak. Mulai dari peran Forum Anak Kota Cirebon dalam menyuarakan aspirasi untuk pembangunan daerah, pentingnya pola asuh yang tepat dari orang tua, jaminan layanan kesehatan yang ramah anak, pentingnya Pusat Kreativitas Anak sebagai ruang aman untuk tumbuh dan berkembang, serta urgensi penanganan serius terhadap kasus kekerasan anak yang masih sering terjadi	
4	Aksi Angkatan Vidyakarana hadir melalui karya nyata sebagai wujud kepedulian terhadap alam. Dengan mengusung tema “Satu Langkah untuk Lingkungan”, kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Kejawanen Kota Cirebon, berupa penanaman 100 bibit mangrove dan aksi bersih pantai bersama	

Sumber : DP3APPKB Kota Cirebon, 2025

11.2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Altematif

11.2.1 Perkawinan Anak

Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di lingkungan masyarakat. Di antaranya adalah kemiskinan, ketidaksetaraan gender, nilai budaya dan agama, perilaku berisiko, pendidikan seksual yang tidak memadai, serta kehamilan yang diinginkan. Di Indonesia, perkawinan anak dengan dalih memutus rantai keluarga dan ketidaksetaraan gender kerap dijadikan alasan utama anak. Tapi sekarang, ada tren menikah muda, yang inisiatif (menikah muda) datang dari anak-anak itu sendiri termasuk ada gerakan menikah muda.

Gambar 11.1 Permohonan Dispensasi Nikah, 2025



Sumber : Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B, 2025

11.2.2 Lingkungan Keluarga (LKSA dan PSAA)

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar.

Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak. Pengasuhan terbaik untuk anak ada dalam keluarga. Ini juga melekat tanggung jawab anak yang pertama ada pada keluarga. Konsep dasar pengasuhan anak dalam keluarga menitik beratkan pada kemampuan lingkungan untuk

menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih dan asuh. Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian dan produktivitas. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat (*bounding*) dan kepercayaan dasar (*basic trust*) antara anak dan orang tua. Kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Namun tidak semua anak dapat diasuh langsung oleh orang tua baik ayah dan atau ibu dalam keluarga. Anak yang belum berkesempatan mendapatkan haknya diasuh dalam keluarga maka harus tetap mendapatkan perlindungan melalui pengasuhan alternatif salah satunya pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik anak asuh di dalam maupun di luar panti.

Tabel 11.6 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Cirebon, 2025

No	Nama LKSA	Kecamatan	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kampoeng Belajar Al Hijrah	Harjamukti	Jl. Ledeng Sitopeng Komplek Griya Bintang Blok B 18 RT/RW 04/09, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
2	LKSA Al Mu'thi	Harjamukti	Kedung Mendeng RT/RW 03/03, Kel. Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
3	LKSA Al – Falah	Harjamukti	Jl. Kebon Pelok No. 3 RT/RW 03/04 Tugu Dalam, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
4	LKSA Al – Hidayah	Harjamukti	Jl. Situgangga No. 165 Kalitanjung, Kota Cirebon
5	LKSA Amal Mulya	Kesambi	Jl. Sekar Kemuning RT/RW 03/03, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon
6	Ashabul Kahfi	Harjamukti	Jl. Kalitanjung RT/RW 05/06, Kota Cirebon



No	Nama LKSA	Kecamatan	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
7	LKSA Daarun Naim	Harjamukti	Jl. Khatib Batu No. 136 RT/RW 04/06, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
8	LKSA Muawanah	Harjamukti	Jl. Cendrawasih 2 RT/RW 05/10 Penggung Utara, Kota Cirebon
9	Yayasan Daarut Taubah/LKSA Daarul Hijrah (Az Zahra)	Harjamukti	Jl. Kedung Menjangan RT/RW 05/06, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
10	LKSA Siti Khadijah Al Zahroh	Kesambi	Jl. Satria GG. Dahlia No. 66B RT/RW 04/07, Kel. Kesambi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon
11	Yayasan Siti Khadijah	Kesambi	Karang Jalak/Karang Malang RT/RW 01/09, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon
12	LKSA Madinatunnajah	Harjamukti	Jl. Cirebon Permai III No. 370 RT/RW 06/03 Dukuh Semar, Kota Cirebon
13	Budhi Asih	Kejaksan	Jl. Wahidin No. 22, Kota Cirebon
14	Cirebon Peduli Anak Bangsa	Kesambi	Jl. Perjuangan GG. Citra No. 5, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon
15	LKSA Mekar Arum	Harjamukti	Ciremai Biri Blok E 2 No. 9 RT/RW 04/17, Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
16	LKSA Arisan Nasi Indonesia	Harjamukti	Jl. Ciremai Giri W 1 No. 10, Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
17	LKSA Darul Ulum	Harjamukti	Jl. Bhakti Abri RT/RW 04/10 Suket Duwur, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
18	LKSA Parahita	Lemahwungkuk	Silakaca No. 68 RT/RW 03/09 Griya Jati, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
19	Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri	Lemahwungkuk	Jl. Raya Kalijaga GG. Empang Kp. Api-Api RT/RW 01/09, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon
20	LKSA Daarul Ilmi	Harjamukti	Jl. Silakaca III RT/RW 02/09, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon



No	Nama LKSA	Kecamatan	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
21	LKSA El-Mubaarok	Kesambi	Jl. Sekar Kemuning RT/RW 03/13 Mekar Sicalung, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon
22	LKSA Robbani	Kesambi	Jl. Kesambi Dalam No. 15/95 RT/RW 01/04, Kota Cirebon
23	Yayasan Ashefa Griya Pusaka	Kejaksan	Jl. Veteran No. 13, Kel. Kejaksan, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon
24	LKSA Nawasena Parahita Lestari	Pekalipan	Jl. Lemahwungkuk No. 52 RT/RW 01/10, Kel. Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon
25	Yayasan Sabilul Qur'an	Kesambi	Jl. Sekar Kemuning No. 5 RT/RW 01/13, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon
26	Yayasan Manarusalam Pondok Pesantren Hidayatullah	Kesambi	Jl. Sekar Kemuning RT/RW 03/03, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon
27	Yayasan Agraha Swa Karya	Harjamukti	Jl. Ketilang Raya No. 224 RT/RW 01/14, Kel. Larangan, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
28	Yayasan Pelita Ilmu	Harjamukti	Jl. Dukuh Semar GG. Masjid No. 227B RT/RW 07/03, Kota Cirebon

Sumber : Dinas Sosial Kota Cirebon, 2025

11.2.3 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif

Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai dengan 24 bulan, dan usia 2 sampai dengan 6 tahun. Pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.



Pengintegrasian Posyandu dengan BKB dan PAUD ini memiliki peran penting dan strategis dalam upaya mengatasi kesenjangan karena terlibat langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan orang tua dan anak dalam berbagai aspek. Posyandu memantau kesehatan ibu dan anak, PAUD memfasilitasi balita bermain dan belajar bersama yang dibimbing oleh mentor/guru PAUD, sementara BKB memberikan ruang untuk orang tua menggali pengetahuan dan keterampilan mengenai pengasuhan anak yang baik. Hal ini membawa harapan agar orang tua dan anak memiliki wadah untuk memantau dan menstimulasi tumbuh kembang anak secara optimal.

Tabel 11.7 Banyaknya Posyandu di Kota Cirebon, 2025

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu				Jumlah
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Harjamukti	0	12	26	75	113
2	Kejaksan	0	1	14	41	56
3	Kesambi	0	1	21	54	76
4	Lemahwungkuk	0	0	8	52	60
5	Pekalipan	0	0	8	32	40
Total		0	14	77	254	345

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

Tabel. 11.8 Anak Usia Dini yang Mengikuti Pendidikan PAUD di Kota Cirebon, 2025

No	PAUD	Siswa		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PAUD Kunci Kencana	20	16	36
2	PAUD Athohiriyah	12	10	22
3	PAUD/Kober Al Fatah	26	24	50
4	PAUD Al Hidayah	12	18	30
5	SPS Bunga Soka	23	20	43
6	PAUD Bina Bakti Wanita	30	26	56
7	PAUD Mawar	11	8	19
8	PAUD Al Fadilah	13	20	33
9	PAUD Baiturahim Merapi	5	9	14
10	PAUD CPAB	10	12	22



No	PAUD	Siswa		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	PAUD Kemuning	32	37	69
12	PAUD Tunas Bangsa	8	10	18
13	PAUD Cemara	9	13	22
14	PAUD At-Ta Awun	1	2	3
15	PAUD Tunas Melati	20	14	34
16	PAUD Umeriz	12	9	21
17	KB Al Azzam	35	37	72
18	KB Al Mulia	14	8	22
19	KB Permata Suket Duwur	8	18	26
20	KB Bina Insani	12	11	23
21	KB Daarul Hijrah	9	25	34
22	KB Sekar Sari	11	5	16
23	KB Lentera Ilmu	6	10	16
24	KB Teratai	17	18	35
25	SPS Berlian	12	9	21
26	SPS Subulussalam	6	12	18
27	KB Al Latif	15	13	28
28	KB Nusantara	8	5	13
29	SPS Burung Camar	11	13	24
30	SPS Nurul Ilmi	19	14	33
31	KB Palinggihan	21	26	47
32	KB Ar Ridlo	19	27	46
33	KB Handayani	40	40	80
34	SPS Al Amin	28	31	59
35	KB Mutiara Anggrak	23	21	44
36	SPS Mandiri Sejahtera	30	31	61
37	SPS Al Hijrah	25	27	52
38	KB Ar Rayyan	32	45	77
39	KB Cibogo	14	17	31
40	KB Sitojut Thobilin	7	7	14
41	KB Lebak Ngok	12	14	26
42	KB Husnul Khotimah	28	19	47
43	KB Bintang Mora	24	16	40
Jumlah		730	767	1.497

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon, 2025

11.2.4 Ruang Bermain Anak yang Ramah Anak

Lokasi tempat bermain yang ramah khususnya untuk anak kecil dan anak dengan kecacatan. Ruang bermain ramah anak secara khusus difasilitasi pemerintah untuk memenuhi hak anak khususnya hak bermain. Selain itu anak juga mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan transportasi umum dengan mengakses transportasi umum yang baik merupakan hal yang esensial. Untuk memenuhi hak anak, bagaimana pun transportasi yang aman adalah berjalan kaki, naik sepeda atau mengakses transportasi yang tidak menghasilkan polusi, dan ramah anak.

Tabel 11.9 Ruang Bermain Anak di Kota Cirebon, 2025

No	Ruang Bermain Anak (RBA)	Lokasi	Jumlah RBA	Lembaga Pengelola
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Taman Pedati Gede	Jl. Pasuketan RT/RW 03/03, Kel. Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon	1	DPRKP
2	Taman Ramah Anak (Eks Taman Pamitran)	Jl. K.S. Tubun RT/RW 01/03, Kel. Kejaksan, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon	1	DPRKP

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon, 2025

11.2.5 Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penggunaan jaringan jalan, pengendalian lalu lintas dan penyediaan sarana angkutan umum dari lokasi pemukiman menuju sekolah. Bentuk rute aman ke sekolah antara lain, yaitu Zona Selamat Sekolah (ZoSS), zebra cross, pita pengejut, trotoar dan marka jalan untuk memberi akses anak dari dan ke sekolah secara aman. Dengan adanya rute aman sekolah, keselamatan siswa dalam perjalanan ke dan dari sekolah meningkat, mengurangi risiko kecelakaan dan memberikan pengawasan yang lebih baik. Manfaat kesehatan termasuk peningkatan aktivitas fisik dan kebiasaan hidup sehat di kalangan anak-anak.

Tabel 11.10 Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Cirebon, 2025

No	Jenis Program RASS	Deskripsi Program
(1)	(2)	(3)
1	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Program untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan kepada anak-anak ketika berangkat, pulang atau menyebrang di jalan depan sekolah terdapat 16 titik lokasi
2	Penyuluhan Keselamatan Berlalu Lintas	Program penyuluhan keselamatan yang diberikan kepada anak-anak terutama anak usia dini guna menanamkan rasa tertib berlalu lintas sejak dini

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cirebon, 2025

11.2.6 Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Aksesibilitas penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas dan lansia. Maka diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia.

Tabel 11.11 Kontribusi Pemerintah Kota Cirebon terhadap Penyandang Disabilitas, 2025

No	Bentuk-Bentuk Kontribusi	Ada/Tidak	Penerima
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendataan dan pemutahiran data	Ada	-
2.	Sosialisasi	Ada	-
3.	Pelatihan orang tua anak disabilitas	Ada	Orang tua anak disabilitas
4.	Bantuan keuangan	Ada	Penyandang disabilitas
5.	Pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak disabilitas	Tidak	-
6.	Bantuan peralatan/ sarana prasarana	Ada	Penyandang disabilitas

Sumber : Dinas Sosial Kota Cirebon, 2025

Tabel 11.12 Nama Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Cirebon, 2025

No	Nama Lembaga	Lokasi	Jenis Disabilitas yang Ditangani
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SLB Budi Utama	Jl. Melati, Kel. Kesambi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon	Anak disabilitas
2	SLB Mekar Arum	Jl. Ciremai Giri Blk. E2 No. 9, Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon	Anak disabilitas
3	SLB B Pancaran Kasih	Jl. Dr. Wahidin, Kel. Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon	Anak disabilitas
4	SLB B Sayange	Jl. Terusan Sekar Kemuning, Jl. Wanagati, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon	Anak disabilitas
5	SLB C Pancaran Kasih	Jl. Perjuangan No. 45, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon	Anak disabilitas

Sumber : Dinas Sosial Kota Cirebon, 2025

11.3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Kesehatan dasar dan kesejahteraan menjadi salah satu tolak ukur untuk memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama. Hal yang terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan seperti:

11.3.1 Gizi Kurang, Gizi Lebih, Pendek (Stunting)

a. Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Gizi buruk adalah kondisi gizi kurang hingga tingkat yang berat dan disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama.

b. Gizi Lebih

Gizi lebih terjadi jika terdapat ketidakseimbangan antara konsumsi energi dan pengeluaran energi. Asupan energi yang berlebihan secara kronis akan menimbulkan kenaikan berat badan, berat badan lebih (*overweight*) dan obesitas. Makanan dengan kepadatan energi yang tinggi (banyak mengandung lemak atau gula) turut menyebabkan sebagian besar keseimbangan energi.

c. Pendek (Stunting)

Stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan *severel*. Dengan kata lain stunting dapat diketahui bila seorang balita sudah ditimbang berat badannya dan diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada dibawah normal. Jadi secara fisik balita akan lebih pendek dibandingkan balita seumurnya.

Tabel 11.13 Data Status Gizi Anak Usia 0-5 Tahun di Kota Cirebon, 2025

No	Kecamatan	Status Gizi Balita			
		Stunting	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Wasting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Harjamukti	1.024	43	541	584
2	Kejaksan	223	30	107	137
3	Kesambi	414	33	199	232
4	Lemahwungkuk	381	28	178	206
5	Pekalipan	185	29	96	125
Total		2.227	163	1.121	1.284

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

11.3.2 Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Persalinan

Pelayanan prenatal/antenatal merupakan pelayanan kesehatan yang didapatkan

dari bidan maupun dokter saat seorang wanita menjalani masa kehamilan. Tujuan dari pelayanan prenatal ini adalah untuk menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu dan anak selama masa kehamilan sehingga ibu hamil dan janin dalam kandungan tetap sehat. Seorang bayi yang ibunya tidak menjalani pelayanan prenatal memiliki kecenderungan sebanyak 3 kali lebih tinggi untuk mengalami berat bayi lahir rendah dan 5 kali lebih tinggi untuk meninggal. Ibu hamil yang menjalani pelayanan prenatal dapat mengetahui berbagai risiko dan komplikasi kehamilan secara dini sehingga dapat diarahkan untuk melakukan rujukan ke rumah sakit.

Kunjungan pelayanan prenatal dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan.

- Kehamilan trimester pertama (<14 minggu) 1 kali kunjungan;
- Kehamilan trimester kedua (14-28 minggu) 1 kali kunjungan;
- Kehamilan trimester ketiga (28-36 minggu dan setelahnya) 2 kali kunjungan.

Tabel 11.14 Cakupan BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Kota Cirebon, 2025

No	Kecamatan	Jumlah Kasus BBLR		Jumlah BBLR Yang mendapat Pelayanan Kesehatan		% BBLR Yang mendapat Pelayanan Kesehatan Cakupan BBLR Yang mendapat Pelayanan Kesehatan	
		L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Harjamukti	48	52	48	52	100	100
2	Kejaksan	22	16	22	16	100	100
3	Kesambi	19	24	19	24	100	100
4	Lemahwungkuk	59	33	59	33	100	100
5	Pekalipan	10	13	10	13	100	100
Total		158	138	158	138	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

11.3.3 Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

ASI eksklusif adalah intervensi yang paling efektif untuk mencegah kematian anak. Oleh sebab itu sebuah deklarasi yang disahkan oleh WHO/UNICEF dan ditandatangani seluruh negara-negara anggotanya pada tahun 1990 di Italia, memuat

eksklusif selama 4-6 bulan. Kemudian pada tahun 1999 deklarasi ini diperbarui dengan menetapkan bahwa jangka waktu minimal menjadi 6 bulan. Kini ASI eksklusif ditetapkan secara resmi menjadi 0-6 bulan wajib bagi bayi.

Tabel 11.15 Bayi Usia 0-6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Cirebon, 2025

No	Kecamatan	Usia 0-6 Bulan	Usia 0-6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Harjamukti	967	781	80,77
2	Kejaksan	211	196	92,89
3	Kesambi	383	294	76,76
4	Lemahwungkuk	364	263	72,25
5	Pekalipan	177	133	75,14
Total		2.102	1.667	79,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

11.3.4 Layanan Kesehatan Ramah Anak

Keselamatan ibu dan anak adalah upaya pelayanan terpadu yang bertujuan melindungi ibu dan anak mulai dari masa kehamilan sampai usia remaja berdasarkan konsep pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan, yang bukan hanya melakukan intervensi pada saat ibu sudah hamil dan bersalin, namun dimulai sejak usia bayi, anak, usia remaja, dan dewasa dalam siklus pelayanan berkesinambungan dan sedapat mungkin mengintegrasikan pelayanan dari hulu sampai hilir dari semua bentuk pelayanan atau program yang menempatkan ibu dan anak sebagai sasaran, baik lintas program maupun lintas sektor.

Gambar 11.2 Layanan Kesehatan Ramah Anak di Kota Cirebon, 2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2025

11.3.5 Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau memrosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah upaya perlindungan untuk masyarakat (termasuk anak-anak) terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan kawasan tersebut perlu dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, kantor dan tempat lain yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat.

Gambar 11.3 Implementasi Sekolah Tanpa Rokok di Kota Cirebon, 2025



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, 2025

11.3.6 Air Layak Minum

Air layak minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Menurut Kementerian Kesehatan, syarat-syarat air layak untuk diminum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Maka dari itu, rumah tangga perlu memiliki fasilitas air yang layak dikonsumsi untuk keperluan hidup sehari-hari.

Tabel 11.16 Program Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Akses Penyediaan Air Minum Layak di Rumah Tangga, 2025

Upaya	Deskripsi	Cakupan Pelaksanaan		
		Waktu	Lokasi	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemeriksaan kualitas air internal	Peningkatan akses terhadap air minum yang aman untuk mencegah rekontaminasi, melalui pemeriksaan kualitas air yang rutin dilaksanakan setiap bulan, baik secara internal maupun eksternal (bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Cirebon)	Setiap bulan	SPAM Kota Cirebon	Monitoring kualitas air

Sumber : PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon, 2025

Tabel 11.17 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Selama Dua Tahun Terakhir

Klasifikasi Tarip	Realisasi Total			Realisasi Total		
	Desember 2024			Desember 2025		
	Pel	M3	%	Pel	M3	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kelompok II						
B1. Semi Permanen	22	664	0,05%	22	759	0,05%
B2. Rumah Permanen A	16.419	334.313	24,42%	16.762	346.362	24,94%
	16.441	334.977	24,47%	16.784	347.121	25,00%
2 Kelompok III						
C2. Rumah Permanen B	22.651	378.878	27,67%	22.741	380.630	27,41%
C3. Rumah Praktek A	5.447	101.766	7,43%	5.424	98.680	7,11%
C4. Rumah Praktek B	3.850	101.515	7,41%	3.842	96.716	6,97%
	31.948	582.159	42,52%	32.007	576.026	41,48%
Total Pelanggan Rumah Tangga	48.389	917.136	66,98%	48.791	923.147	66,48%
Total Pelanggan PAM TGN	56.776	1.369.174		57.172	1.388.558	

Sumber : PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon, 2025

11.4 Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

11.4.1 Wajib Belajar 12 Tahun

Hak anak selanjutnya yang harus dipenuhi adalah pendidikan. Anak mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan hingga 12 tahun, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pendidikan wajib selama 12 tahun memiliki banyak manfaat penting yang dapat memengaruhi individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.

Tabel 11.18 Banyaknya Siswa SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat di Kota Cirebon, 2025

No	Kecamatan	Data Siswa SD		Data Siswa SMP		Data Siswa SMA		Total
		L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Harjamukti	5.445	5.017	2.231	2.196	1.745	1.831	18.465
2	Kejaksan	5.967	5.420	2.717	2.506	2.156	2.928	21.694
3	Kesambi	2.893	2.792	1.857	1.869	5.770	6.205	21.386
4	Lemahwungkuk	2.357	2.307	2.548	2.468	1.167	951	11.798
5	Pekalipan	935	863	50	19	84	5	1.956
Total		17.597	16.399	9.403	9.058	10.922	11.920	75.299

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon, 2025

11.4.2 Kebudayaan yang Melibatkan Anak Kota Cirebon

Dalam pelaksanaan kota yang layak untuk anak, kegiatan kebudayaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga melibatkan anak, agar kebudayaan daerah/nasional terus berkembang dan pada akhirnya pelaku yang melestarikan kebudayaan tersebut adalah anak-anak.

Gambar 11.4 Implemetasi Kebudayaan Anak, 2025



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, 2025

11.4.3 Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan

mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Terdapat sejumlah indikator sekolah ramah anak yang dikembangkan baik oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, *ChildFund* maupun NGO internasional yang lain.

a. Konsep SRA

Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah, melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman.

b. Tujuan Dibentuknya SRA

- 1) Mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya;
- 2) Mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat;
- 3) Mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam;
- 4) Mencegah anak menjadi perokok dan pengguna NAPZA;
- 5) Menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas.

Gambar 11.5 Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Cirebon, 2025



Sumber : DP3APPKB Kota Cirebon, 2025

11.5 Perlindungan Khusus

11.5.1 Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran

a. Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terjadi di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis dan pelecehan seksual anak.

Tabel 11.19 Banyaknya Kasus Kekerasan pada Anak di Kota Cirebon, 2025

Jenis Kelamin	Usia (Tahun)			Jumlah (Kasus)
	0 - 5	6 - 12	13 - 17	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki + Perempuan	5	12	22	39

Sumber : DP3APPKB Kota Cirebon, 2025

b. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Tabel 11.20 Banyaknya Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Cirebon, 2025

No	Jenis Kelamin	Jumlah Kasus	Jenis Pidana	Memenuhi Kriteria Proses Diversi (Ya/Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laki-laki	8	1 orang (Informasi dan Transaksi Elektronik)	Tidak
			2 orang (Undang-Undang Darurat (Senjata Tajam))	
			1 orang (Narkotika)	
			1 orang (Pencurian)	
			1 orang (Lalu lintas)	
			2 orang (Pencurian)	
2	Perempuan	1	1 orang (Informasi dan Transaksi Elektronik)	Tidak

Sumber : Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dan Pengadilan Negeri Cirebon, 2025

c. Anak Terlantar, Jalanan dan Pekerja Anak

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protectoin*), karena suatu sebab mereka tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani maupun secara jasmani. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu atau kedua orang tua, tetapi terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, kurangnya pengertian orang tua ataupun karena kesenjangan. Padahal mereka seharusnya mendapatkan atau terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan makanan dengan gizi yang cukup, pemeliharaan kesehatan, pakaian, curahan kasih sayang, perlindungan, bimbingan dan pendidikan karena anak harus mendapat perhatian khusus dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

Tabel 11.21 Banyaknya Anak Terlantar di Kota Cirebon, 2025

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Harjamukti	17	21	38
2	Kejaksan	5	1	6
3	Kesambi	17	17	34
4	Lemahwungkuk	6	0	6
5	Pekalipan	3	3	6
Total		48	42	90

Sumber : Dinas Sosial Kota Cirebon, 2025

11.5.2 Anak Rentan Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

Penyebab penambahan jumlah remaja yang terkena HIV/AIDS adalah kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan pendampingan kepada para remaja. Teknologi sekarang yang lebih longgar, membuat para remaja kaget dengan hal tersebut. Mereka menemukan hal baru seperti hal yang terkait pornografi karena belum dibekali mengenai hal tersebut, mereka penasaran dan mencoba. Untuk mencegah semakin bertambahnya remaja yang terpapar HIV/AIDS,

perlu ada pendidikan seks sejak dini. Anak-anak dan remaja perlu dibekali pendidikan primer dan sekunder mengenai organ reproduksi mereka. Pendidikan seks bukan hanya bagi mereka yang mau menikah, tetapi juga anak-anak dan remaja. Dengan begitu mereka mempunyai bekal dan diharapkan dapat mengurangi pertumbuhan penderita HIV/AIDS dikalangan remaja.

Tabel 11.22 Data Anak Terinfeksi HIV/AIDS di Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Umur, 2025

No	Kelompok Usia	Jumlah Anak
(1)	(2)	(3)
1	0 - 4 tahun	4 orang
2	5 - 14 tahun	1 orang
3	15 - 19 tahun	12 orang

Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cirebon, 2025

Tabel 11.23 Daftar Penerima Bantuan Dana Pendidikan Bagi Anak Terdampak HIV/AIDS di Kota Cirebon, 2025

No	Jumlah Anak	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6 orang	P = 2 orang L = 4 orang	Kesambi = 2 orang Harjamukti = 1 orang Lemahwungkuk = 2 orang	Sebesar Rp 300.000,-/ anak/bulan

Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cirebon, 2025

Tabel 11.24 Daftar Penerima Bantuan Susu Formula Bagi Anak Terdampak HIV/AIDS di Kota Cirebon, 2025

No	Jumlah Anak	Jenis Kelamin	Alamat	Jenis Bantuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	15 orang	P = 8 orang L = 7 orang	Kesambi = 5 orang Pekalipan = 1 orang Harjamukti = 9 orang	- Susu Formula Merk Frisian Flag Indonesia (FFI) 800 gram sebanyak 4 dus/ anak/ bulan = 20 orang - Susu Formula Merk SGM Indonesia 800 gram sebanyak 4 dus/ anak/ bulan = 2 orang

Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cirebon, 2025

KONTAK PERASAAN

**Konsultasi Keluarga dan Pengaduan
Kekerasan Perempuan & Anak**

CURHAT DAN KONSULTASIKAN MASALAH ANDA KEPADA KAMI

KONSELING TENTANG PEREMPUAN

- » Kekerasan Fisik
- » Kekerasan Psikis
- » Kekerasan Seksual
- » Perdagangan Manusia
(*Human Trafficking*)

KONSELING KELUARGA SEJAHTERA

- » Konseling KB
- » Kesehatan Reproduksi
- » Konseling Remaja
- » Pendewasaan Usia Perkawinan
- » Pengasuhan Anak

KONSELING TENTANG ANAK

- Kekerasan Fisik Anak <<
- Kekerasan Psikis Anak <<
- Kekerasan Seksual Anak <<
- Konsultasi Anak <<

Melalui Telepon



Melalui Video Call



Melalui Email



Melalui Online Chat



Anda Dapat Menghubungi



081 71 222 71



kontakperasaan@cirebonkota.go.id



081 71 222 71